Dr. Dwi Ratnasari, M.Ag.

Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Islam

PASCASARJANA
FITK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Studi Kasus di Pondok Pesantren Tremas Pacitan

Dr. Dwi Ratnasari, M.Ag.

PASCASARJANA
FITK UIN Suman Kalijaga Yogyakarta

Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Islam
Studi Kasus di Pondok Pesantren Tremas Pacitan

vi + 128 hlm.; 15,50 x 23,01 cm

ISBN: 978-623-6095-28-7

Penulis:
Dr. Dwi Ratnasari, M.Ag.

Editor:
Dr. Nur Saidah

© 2021

Diterbitkan oleh:
PASCASARJANA
FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yoyakarta 55281

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan ungkapan terima kasih ke hadirat Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, atas izin-Nya buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menebarkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan.

Buku dengan judul "Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tremas Pacitan)" ini pada awalnya merupakan penelitian penulis untuk menyelesaikan studi pada Prodi Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2003. Buku ini merupakan hasil studi lapangan tentang proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh sebuah pesantren di Jawa Timur. Bukan maksud hati untuk selalu berpihak pada perempuan, tapi realitas perempuan yang selalu terpinggirkan, mengusik penulis untuk menelusuri cikal-bakal marjinalisasi yang dialami kaum perempuan. Bukan pula dimaksudkan untuk menyalahkan dan mendiskreditkan sosok laki-laki sebagai person, karena mereka, perempuan dan laki-laki, hidup dalam arena yang sama yaitu sebuah budaya yang mengunggulkan citra maskulinitas. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk membantu menyibak sekat-sekat ketimpangan tersebut dengan menelusuri faktor dominan yang menyebabkan perempuan tidak berdaya yaitu tradisi dan budaya masyarakat yang disosialisasikan secara sistematis sejak berabad-abad yang lampau hingga saat ini.

Buku ini dapat diterbitkan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka semua, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu penyelesaian tugas mulia ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga, Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Dekan dan Wakil Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga, Kaprodi Magister PAI FITK, para kolega sesama dosen di FITK, para staf dan pegawai, juga para mahasiswa yang telah menjadi mitra diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas. Rasa hormat dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr Hj. Alef Theria Wasim, MA selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk dengan penuh keterbukaan dan keikhlasan sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam membantu penulis memperoleh data yang diperlukan. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada segenap karyawan di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga yang secara tidak langsung membantu proses penyelesaian buku ini.

Sembah Sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orang tua yang tiada henti-hentinya membacakan doa kehadirat Ilahi memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya, dan semoga Allah swt mengampuni dosa keduanya.

Atas bantuan pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas, penulis berdoa semoga keikhlasan mereka diterima-Nya sebagai amal kebaikan. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Rahim senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan yang berlipat ganda. Kiranya dengan penuh kerendahan hati penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, kritik dan saran konstruktif selalu diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Yogyakarta, November 2021
Dr. Dwi Ratnasari, M.Ag.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Pengantar 1
B. Bagaimana Buku Ini Ditulis? 10
BAB II DISKURSUS TEORITIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM 13
A. Pemberdayaan Perempuan dalam Islam 13
1. Konsep Pemberdayaan Perempuan 14
2. Analisis Gender dan Feminisme Islam 17
3. Kedudukan Perempuan dalam Islam 22
4. Pemberdayaan Perempuan dalam Islam ... 30
B. Pendidikan Islam 36
1. Konsep Pendidikan Islam 36
2. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam 39
3. Problematika Pendidikan Pesantren 42
4. Pendidikan Pesantren Sebagai Paradigma Pemberdayaan Perempuan 47
BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PONDOK TREMAS 51
A. Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Tremas 51
1. Sejarah Perkembangan Pesantren Tremas 52

2. Sistem pendidikan dan pengajaran 62
B. Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Pesantren Tremas 64
1. Perspektif Pesantren Tremas Mengenai Perempuan 64
2. Perspektif Pesantren Tremas Mengenai Perempuan Ideal 72
3. Perspektif Pesantren Tremas Mengenai Upaya Pemberdayaan Perempuan 78
C. Implementasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan di Pesantren Tremas 80
1. Pendidikan Formal 80
2. Pendidikan Non-formal 83
3. Pendidikan In-formal 85
BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM 91
A. Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan di Pesantren Tremas 91
1. Faktor-faktor Pendukung Pemberdayaan Perempuan 91
2. Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan 97
B. Pendidikan Pesantren Sebagai Media Pemberdayaan Perempuan 106
1. Materi atau Kurikulum Sensitif Gender 107
2. Metode Pembelajaran Kritis 109
3. Profesionalisme Tenaga Pendidik 113
BAB V PENUTUP 117
Daftar Pustaka 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah konsep gender[1]. Gender sebagai suatu keyakinan dan konstruksi sosial yang disosialisasikan secara turun-temurun dan terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat[2] ternyata mengembangkan suatu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui konstruksi sosial, kodrat, nilai-nilai, dan adat istiadat setempat, gender membentuk suatu hubungan atau relasi sosial yang cenderung merugikan kaum perempuan.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk diantaranya adalah subordinasi atau penomorduaan. [3] Misalnya ketika sebuah rumah tangga menghadapi masalah finansial dan harus mengambil keputusan untuk melanjutkan sekolah anak laki-laki dan perempuannya, maka biasanya anak laki-laki akan mendapat prioritas utama tanpa mempertimbangkan mana yang lebih cerdas di antara keduanya. Alasan klasik yang sering dikemukakan adalah "Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya akan masuk ke dapur juga".[4] *Stereotype* atau pelabelan terhadap

---

[1] Gender adalah atribut yang didekatkan secara sosial maupun kultural kepada kaum laki-laki dan perempuan. Konsep gender harus dibedakan dengan konsep seks karena gender merupakan bentukan sosial, berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, bisa dipertukarkan, sementara seks adalah kodrat alias pemberian Tuhan, tidak berubah, universal, tidak bisa dipertukarkan, contohnya: berpenis, berpayudara, berahim, menstruasi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnys Lihat Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 3-9.

[2] Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj: Hartian Silawati, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC dan Pustaka Pelajar, 1996), hlm 2.

[3] Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Trasformasi*,... hlm. 15-16.

[4] Yustina Rostiawati, "Memutus Sosialisasi Ketimpangan Peran Gender" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm 295. Lihat juga Susi Eja Yuarsi, "Wanita dan Akar

kaum perempuan sebagai pekerja di sektor domestik ini mengakibatkan pendidikan kaum perempuan di nomorduakan.[5] Sehingga hal ini telah menyebabkan bahwa hingga sekarang angka buta huruf perempuan dewasa masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka buta huruf laki-laki[6].

Disamping itu kondisi pendidikan perempuan yang lebih rendah juga berpengaruh pada posisi perempuan sebagai pelaku ekonomi. Perempuan biasanya mengalami marginalisasi karena keterbatasan pendidikan dan keterampilannya. Sehingga hal ini juga menyebabkan perempuan tidak mampu bersaing secara ekonomis dengan laki-laki pada umumnya. Apa yang dikerjakan perempuan biasanya juga dinilai lebih rendah, baik secara ekonomis maupun sosial[7], karena memang dalam masyarakat berlaku anggapan bahwa *male value* lebih dihargai dibandingkan dengan *female value*.[8] Kondisi ekonomi kaum perempuan semacam ini menyebabkan proses pemiskinan yang hingga sekarang kebanyakan masih melekat pada kaum perempuan.

Apa yang dipaparkan di atas merupakan gambaran bagaimana kondisi kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kondisi tersebut merupakan hasil dari proses sosialisasi nilai-nilai gender dalam keluarga dan

---

Kultural Ketimpangan Gender" dalam *Sangkan Paran Gender*, ed: Irwan Abdullah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 246.

[5] Mansour Faqih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 58.

[6] Ace Suryadi, "Perempuan Indonesia dalam Peta Pendidikan" dalam *Agama dan Gender News*, Edisi 12, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2002), hlm. 4

[7] Saparinah Sadli, "Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif HAM" dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm. 6. "pekerjaan Perempuan" seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan laki-laki", serta dikategorikan sebagai "kerja yang bukan produktif" sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Lihat Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*..., hlm. 21. Lihat juga Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*..., hlm. 58-59.

[8] Miranti Hidajadi, "Perempuan dan Pembangunan", dalam Jurnal *Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 17, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001), hlm. 7.

masyarakat yang akhirnya membentuk *image* pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perlu diadakannya upaya-upaya untuk merubah pola hubungan yang tidak seimbang itu, yaitu dengan pemampuan atau pemberdayaan kaum perempuan.

Pemberdayaan (*empowerment*) perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan baik secara intelektual, material maupun spiritual[9]. Melalui upaya tersebut diharapkan perempuan dapat membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dan dengan usaha tersebut diharapkan adanya penempatan perempuan secara seimbang dengan laki-laki supaya terjalin hubungan secara *equal* baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.

Dengan demikian maka pemberdayaan perempuan bukanlah sebuah upaya pemampuan perempuan untuk menyaingi atau melawan laki-laki tapi sekedar memberi kesempatan kepada perempuan untuk bisa mengaktualisasikan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mansour Fakih yang menegaskan bahwa perjuangan untuk memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan tidaklah berarti perjuangan yang melawan kaum laki-laki melainkan perjuangan yang ingin menciptakan hubungan dan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan.[10]

Proses pemberdayaan mencakup beragam kegiatan di semua bidang dan pada semua level kehidupan. Tapi yang harus disadari sejak awal adalah bahwa proses pemberdayaan perempuan harus berawal dari pikiran perempuan, dari kesadaran tentang dirinya, hak-haknya, perannya, kemampuan serta potensinya. Disamping juga kesadaran tentang bagaimana ketimpangan gender dan kekuatan politik, sosial, budaya, serta ekonomi yang menghambat upaya mereka dalam

---

[9] Melly G Tan, "Perempuan dan Pemberdayaan" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indeesia, 1997), hlm. 9. Lihat juga, Ratha Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

[10] Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*…., hlm.164-165.

rangka membebaskan diri dari belenggu yang selama ini melilitnya.[11]

Agar perempuan dapat mengaktualisasikan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, mandiri, dan dapat melakukan fungsi dan perannya dengan baik maka perempuan harus berpendidikan cukup. Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan sangat diperlukan agar mereka bisa mengejar berbagai ketertinggalannya selama ini.[12] Dengan demikian berarti bahwa pemampuan intelektualitas menjadi sangat penting dan aspek intelektualitas ini merupakan hal yang niscaya dalam proses pemberdayaan.

Adapun kemampuan intelektualitas ini bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia, diantaranya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan dimana nilai-nilai moral Islam diajarkan, dipahami, dihayati, dan diamalkan serta dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari. [13] Ajaran Islam yang disampaikan berupa Al-Qur'an dan hadis disamping juga beberapa kitab klasik yang disebut kitab kuning.[14]

Kitab kuning merupakan produk budaya abad pertengahan yang cenderung didominasi oleh cita rasa budaya yang secara keseluruhan sangat laki-laki. Sehingga mudah dimengerti jika prasangka dan kepentingan laki-laki yang mewarnai pembahasannya.[15] Dalam rentang waktu yang panjang dan

---

[11]A Sulasikin Murpratomo, "Pengaruh Kekuasan dalam Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Perempuan", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed: Mursyidah Tahir, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 24.

[12] *Ibid.,* hlm. 24.

[13] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55.

[14] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 17. Kitab kuning adalah buku-buku klasik berisikan tafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra-modern, dan yang dimaksud dengan kitab kuning dalam penelitian ini adalah kitab kuning yang secara luas dan populer digunakan oleh kalangan pesantren. Untuk lebih jelasnya baca *Ibid.,* hlm. 131-171.

[15] Masdar F Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam *Membincang Feminisme; Diskursus Gender*..., hlm. 180. Lihat juga Martin Van Bruinessen "Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan

lama, tradisi pengajaran dan pembacaan kitab ini, - yang terus berlangsung hingga kini- tentu memberikan pengaruh kepada masyarakat pesantren dalam kehidupan sehari-hari.

Pondok pesantren yang di pandang sebagai salah satu lembaga keagamaan tradisional di Indonesia [16] mempunyai subkultur tersendiri sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya dengan tanpa mengorbankan identitas dirinya.[17] Namun demikian, pesantren juga seringkali diklaim sebagai sarang konservatisme atau kejumudan, karena pesantren memiliki daya resistensi yang tinggi terhadap masuknya nilai-nilai modernisasi termasuk didalamnya nilai-nilai feminisme.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya cara pandang pondok pesantren dalam memposisikan kaum perempuan? Pondok pesantren yang dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang cukup dinamis dan menjadi salah satu pilar bagi pola berpikir masyarakat Indonesia dianggap sebagai lembaga pendidikan yang cenderung menomorduakan perempuan. Kiranya atas dasar inilah, penelitian tentang pemberdayaan perempuan dalam pendidikan Islam dipandang perlu untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus yang dilakukan di Pondok Pesantren Tremas Pacitan, pada kurun waktu antara tahun 1997-2003, saat Pondok Pesantren Tremas berada di bawah kepemimpinan Kyai Haji Fuad Habib Dimyati dan Kyai Haji Lukman Haris Dimyati.

Pemilihan Pondok Pesantren Tremas sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan *pertama*, pondok pesantren yang berlokasi di provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia[18] yang sampai saat ini masih bisa *survive* di tengah maraknya sistem pendidikan

---

Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm.173-175.

[16] Sukidi, "Pesantren Sebagai Pusat Krisis Perempuan", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 27 Oktober, 2000.

[17] Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 7-8.

[18] Marwan Saridjo dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hlm. 44.

umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah santri yang hingga saat ini mencapai 2000 orang.[19] *Kedua*, pondok pesantren ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mewarnai pola pikir sebagian umat Islam Indonesia. *Ketiga*, pondok pesantren ini menyelenggarakan pendidikan keagamaan bagi perempuan dan tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab kuning yang merupakan inti pendidikan di pesantren, sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan, disamping juga menerapkan sistem madrasah guna memperlancar proses belajar mengajar.

Dari beberapa karakteristik yang tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang bagaimana konsep dan sikap kalangan Pesantren Tremas khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan.

Penelitian tentang pemberdayaan perempuan dalam hubungannya dengan lembaga pendidikan Pesantren menjadi penting karena sebagai lembaga pendidikan, Pesantren merupakan subsistem pendidikan nasional yang ikut mewarnai pola pikir bangsa Indonesia. Selain itu, Pesantren sebagai lembaga pendidikan *indigenous* yang tertua, memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan generasi yang mandiri dan berakhlakul karimah.

Sistem pendidikan tradisional Pesantren terbukti memiliki tingkat resistensi dan adaptability yang tinggi, sehingga pesantren tetap bisa survive di tengah ekspansi sistem pendidikan umum. Bahkan saat ini ketika kondisi pendidikan umum di Indonesia sedang dalam keadaan terpuruk banyak kalangan yang ingin menjadikan Pesantren sebagai sebagai lembaga pendidikan alternatif.

Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara utuh tentang konsep dan bentuk pemberdayaan perempuan yang terdapat di pesantren Tremas serta mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses pemberdayaan perempuan di pesantren tersebut.

---

[19] Wawancara dengan KH Fuad selaku Pimpinan Pesantren dan KH Luqman selaku Pimpinan Majlis Ma'arif yang mengurusi masalah Pendidikan pada tanggal 14 Januari 2003.

Kajian tentang perempuan dalam pendidikan Islam sudah banyak dilakukan, sehingga banyak ditemukan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengannya. Diantaranya adalah tesis yang disusun oleh Ninuk Eko Herawati dengan judul Pendidikan Wanita dalam Perspektif Islam (Problematika di Indonesia). Tesis ini merupakan hasil eksplorasi terhadap konsep pendidikan perempuan dalam sudut pandang ajaran Islam secara umum dan kemudian dikaitkan dengan beberapa problematika yang terjadi di Indonesia. Berikutnya adalah tesis yang disusun oleh Sri Andri Astuti dengan judul Pendidikan Wanita dalam Muhammadiyah, lalu karya dari Akmaliah Yoesoef yang berjudul Pendidikan Islam sebagai Wahana Aktualisasi Potensi Perempuan.

Dari beberapa kajian yang telah dilakukan tersebut pada umumnya mereka berangkat dari nash (normatif) kemudian dikaitkan dengan kenyataan kondisional (historis). Kajian semacam ini meskipun sudah menampakkan kerangka pikir penulisnya, pada prinsipnya hanya menampilkan kerangka pikir penulisnya secara pribadi. Dengan demikian maka bentuk penafsirannya, walaupun mengatasnamakan Islam, jelas berlabel Islam khas penulis dimaksud, sehingga belum tentu berlaku bagi umum ataupun kelompok lainnya.

Berbeda dengan hal diatas, penulis melakukan penelitian terhadap konsepsi dan sikap kalangan pesantren Tremas kaitannya dengan masalah pemberdayaan perempuan. Jika kajian yang terdahulu berangkat dari kerangka pikir penulisnya, maka kajian yang penulis lakukan ini berangkat dari realita yang sedang berlangsung pada kelompok tertentu, selain juga ingin menggambarkan secara utuh bagaimana pemahaman/konsep dan sikap kalangan pesantren dalam menghadapi masalah pemberdayaan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan perempuan di pesantren tersebut.

Feminisme berasal dari kata latin femina yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat. Akibat dari persepsi ini, timbullah berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut serta untuk

mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam segala hidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (human being). Pada dataran operasional, upaya pembebasan kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan pemberdayaan perempuan.[20]

Dalam bahasa Indonesia istilah "pemberdayaan" belum memperoleh pembakuan, tapi dalam bahasa Inggris, kata "empowerment" diartikan dengan kekuatan atau kemampuan. Jadi "pemberdayaan" bisa diberi batasan luas sebagai penguasaan atas aset material, sumber-sumber intelektual, dan ideologi.[21]

Menurut Mansour Faqih, gerakan pemberdayaan perempuan yang juga disebut dengan gerakan transformasi gender, tidak hanya sekedar bertujuan memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, tapi lebih dari itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan.[22] Sehingga perempuan dapat menjadi manusia yang mampu mengontrol dan memberi arah pada kehidupannya sendiri.[23]

Pemberdayaan perempuan yang berusaha menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki. Kesetaraan gender harus dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama, berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan di bidang politik, ekonomi, social, maupun budaya.

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga sangat mengedepankan persoalan kemandirian perempuan, agar tidak terlalu bergantung pada laki-laki. Kemandirian yang sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan yang lahir

---

[20] Aida Fitalaya S Hubbies, "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan" dalam *Membincangkan Feminisme*, ed: Dadang Anshori, dkk. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 19.

[21] Melly G Tan, "Perempuan dan Pemberdayaan…, hlm. 9.

[22] Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*…, hlm. 166.

[23] Saparinah Sadli, *"Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif*…, hlm. 22.

dan kematangan berpikir, lahir dari visi bahwa perilaku kita adalah hasil pilihan sadar yang berdasarkan nilai dan bukan hasil dari kondisi dan pengkondisian.[24] Dengan demikian perempuan yang mandiri boleh saja memilih menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus anak-anak dan suami, bukan karena tuntutan ataupun aturan turun temurun yang sudah digariskan oleh nilai-nilai adat, penafsiran terhadap ajaran agama atau nilai apa saja, tetapi karena memang itu adalah prioritas utamanya, pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip hidupnya.

Demikian juga ketika perempuan memutuskan untuk memilih berkarir, bukan karena ingin dikatakan perempuan maju dan mandiri semata, melainkan karena pilihan dasar yang dibuatnya berdasarkan visi yang bertanggung jawab. Perempuan merasa perlu ikut berorganisasi bukan karena jabatan suaminya, tapi lebih karena kebutuhan untuk mengembangkan potensi kemandiriannya.[25]

Pendidikan Islam merupakan pengembangan potensi kemanusiaan yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits[26] serta usaha manusia untuk menciptakan kondisi yang memberi peluang terhadap berkembangnya kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian.[27] Pengertian tersebut tanpa membedakan potensi perempuan dan laki-laki dan tetap menempatkan keduanya secara sejajar. Sebagaimana juga terdapat dalam prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang mengajarkan tentang persamaan dan keadilan.[28]

Namun ketika ajaran Islam sebagai doktrin dipahami oleh manusia dan direalisasikan dalam bentuk aturan main dalam bersikap maka yang muncul kemudian adalah Islam sebagai "budaya". Hal ini bisa dilihat pada nilai moral atau ajaran Islam

---

[24] Ariyana Wahidah Fuad, "Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed: Mursyidah Tahir, (Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 77-78.

[25] *Ibid.,* hlm. 78.

[26] Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1991), hlm. 153.

[27] Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), hlm. 219.

[28] Lihat Q.s. al-Hujurat: 13, at-Taubah:71, al-Baqarah: 187.

yang dikembangkan di lembaga pendidikan pesantren Islam sebagai "budaya" terangkum dalam fiqh, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadits, tasawuf, mantiq, dan akhlak, hiasanya diadopsi dari Makkah dan Madinah.[29] Dengan demikian maka terjadi perbedaan antara Islam yang masih tersirat dan tersurat dalam nash dengan Islam yang sudah menjadi milik pribadi, yang tampilannya berupa budaya, berpikir, berkeyakinan, dan bertingkah laku.

Kitab kuning yang dijadikan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar di pesantren, pada umumnya berkisar pada kerangka pikir aqidah Asy'ariyah, fiqh syafi'iyah, dan tasawuf al-Ghazali.[30] Merujuk pada penelitian Martin Van Bruinessen, profesor Belanda yang meneliti kitab kuning di Indonesia, Kitab Uqud al-Lujjain adalah salah satu kitab yang paling banyak dipelajari di pondok pesantren. [31] Padahal oleh kelompok kritis Islam Indonesia, kitab ini dianggap sangat tidak ramah terhadap perempuan. Banyak statement yang dinilai menempatkan perempuan pada posisi kedua, domestik dan marjinal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka bagaimana konsep dan sikap kalangan Pondok Pesantren Tremas kaitannya dengan masalah pemberdayaan perempuan.

B. Bagaimana Buku Ini Ditulis?

Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berupaya menggali konsep dan sikap kalangan Pesantren Tremas kaitannya dengan masalah pemberdayaan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberdayaan perempuan di pesantren tersebut. Adapun guna memperoleh informasi yang selengkap mungkin tentang perihal dimaksud, pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan "fenomenologi" [32] yaitu untuk memahami makna perilaku, pemahaman dan kehidupan kalangan Pesantren secara

---

[29] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*..., hlm. 46.

[30] *Ibid.,* hlm. 19.

[31] *Ibid.,* hlm. 122, 128.

[32] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 93.

umum, di samping juga aspek lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah pemberdayaan perempuan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang pada dasarnya menitikberatkan pada penggambaran apa adanya, namun lebih menonjolkan pada pengungkapan makna secara deskriptif dari data yang ada.[33] Dalam hal ini sudah barang tentu generalisasi dari studi kasus ini terbatas pada kasus lain yang memiliki karakteristik dan corak yang sama. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur[34] terhadap sejumlah informan (Kyai, Nyai, ustadz, ustadzah, santri putra dan santri putri), dan pengamatan terlibat[35] terhadap berbagai fenomena yang ada di lapangan yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan. Selain itu penulis juga menggunakan metode dokumentasi [36] yang digunakan untuk mengumpulkan dan memahami literatur (kitab-kitab kuning dan kitab lainnya) yang dipelajari dan dijadikan rujukan oleh mereka. Hal ini dianggap penting sebab lewat metode tersebut dapat ditemukan alur hubungan keilmuan mereka dengan kerangka pikir kitab-kitab tersebut. Metode dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan catatan lainnya seperti catatan sejarah berdirinya pondok pesantren Tremas Pacitan ataupun catatan-catatan lainnya yang dianggap perlu.

Selain metode diatas, penulis juga menggunakan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yang dimaksud adalah kajian terhadap buku-buku maupun hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini. Hal ini dianggap penting karena dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ketika memahami konsep dan sikap kalangan Pesantren Tremas kaitannya dengan masalah pemberdayaan perempuan.

Dalam penelitian ini data yang digali adalah data kualitatif, karena itu analisa datanya adalah kualitatif[37] yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

[33] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 63.

[34] Lexy J Moloeng, *Metodogi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 138.

[35] *Ibid.,* hlm. 117-118.

[36] *Ibid.,* hlm. 161-163.

[37] *Ibid.,* hlm. 3.

berupa kata tertulis dan lisan dari individu atau kelompok serta perilaku yang dapat diamati. Setelah data terkumpul, dilakukan analisa data secara interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.[38] Analisis tersebut terdiri dari tiga alur analisis yang saling berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Alur pertama, reduksi data yaitu kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian hingga tersusunnya laporan akhir penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah dilaksanakan karena reduksi data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses analisis data.

Alur penting berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara naratif yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyusunan informasi dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah dipahami makna yang terkandung di dalamnya.

Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari kumpulan makna setiap kategori, penulis berusaha mencari makna yang paling esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Dari masing-masing fokus tersebut lalu ditarik kesimpulan dalam satu kerangka yang bersifat komprehensif.

[38] Matthew B Miles dan Michael Huberman, *Analisa data Kualitatif.* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 15.

BAB II

DISKURSUS TEORITIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pemberdayaan Perempuan dalam Islam

Pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan sering dikaitkan dengan kondisi perempuan yang secara umum masih berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, tidak pantas memegang kekuasaan karena ada anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan seperti laki-laki sehingga muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.[1] Bahkan beberapa pengamat masalah perempuan dan keperempuanan akhirnya berkesimpulan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, peran perempuan lebih menonjol dalam bidang domestik baik dalam kedudukannya sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga.[2]

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana sesungguhnya pandangan Islam berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan? Di satu sisi Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, yang menjunjung tinggi status dan martabat perempuan, tapi di sisi yang lain terdapat sejumlah teks-teks keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits nabi, yang dianggap sebagai dasar legitimasi oleh sementara orang untuk merendahkan martabat perempuan dan menempatkannya pada posisi subordinat laki-laki.[3]

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, sebagaimana kitab-kitab suci agama lain, diturunkan dalam sebuah masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, kitab suci memiliki dimensi kemanusiaan, di samping dimensi keilahian. Teks-teks al-Qur'an diyakini sarat dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan ideal, hanya saja ketika ajaran suci itu turun ke bumi dan berinteraksi dengan beragam

---

[1] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 63.

[2] Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 1.

[3] Lihat Q.s. an-Nisa': 1, 11, 34, al-Baqarah: 282.

budaya manusia, tidak mustahil jika dalam penafsiran terhadap ajaran tersebut terjadi distorsi. Pemahaman yang distortif itu muncul karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio kultural dan sosio historis manusia yang menafsirkannya.

Untuk itu perlu dilakukan adanya pembacaan ulang atas penafsiran lama yang masih mengandung nilai-nilai bias gender yang cenderung patriarkhal. Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan ini mendesak untuk dilakukan dalam rangka menemukan kembali pesan-pesan keagamaan yang universal seperti persamaan, keadilan, dan pemberdayaan, dan termasuk diantaranya adalah pemberdayaan terhadap perempuan.

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Dalam bahasa Indonesia, istilah *pemberdayaan* belum memperoleh pembakuan. Istilah lain yang sering digunakan adalah kemampuan. Adapun Jika dilihat dari kata dasarnya "daya" dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu: kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak; kekuatan; tenaga, muslihat dan akal; ikhtiar; upaya.[4] Adapun jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan perempuan yang dibahas di sini sudah tentu jika pengertian yang ketiga tidak bisa digunakan, karena pemberdayaan perempuan tidak dimaksudkan sebagai upaya kaum perempuan untuk melakukan muslihat, melainkan daya atau kemampuan kaum perempuan untuk melakukan sesuatu demi mempertahankan hak-haknya dalam kaitan dengan ketidakadilan yang menimpa mereka, yang berasal dari kekuatan besar di luar diri mereka.

Dengan demikian maka pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memampukan atau menguatkan daya-daya yang ada pada diri perempuan sehingga merubah kondisi ketidakberdayaan perempuan menjadi keberdayaan perempuan.

Sementara menurut Srilatha Batliwala, *pemberdayaan* jika dilihat dalam istilah bahasa Inggris, dalam kata "*empowerment*" terkandung

[4] WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 233.

pengertian *power* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Maka pemberdayaan perempuan diartikan sebagai penguasaan perempuan atas aset material yang mencakup aset fisik, pekerjaan, uang, dan sumber-sumber intelektual yang meliputi pengetahuan, informasi, dan gagasan serta penguasaan atas ideologi yang berarti kemampuan untuk mengembangkan, menyebarkan dan mempertahankan perangkat tertentu dari nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku, sehingga perempuan dapat lebih berperan dalam menentukan sikap hidup yang akan dipilihnya.[5]

Dengan demikian maka pemberdayaan perempuan juga dapat diartikan sebagai upaya menjadikan perempuan sebagai manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol dan memberi arah pada kehidupannya sendiri. Sehingga dengan usaha tersebut diharapkan dapat menempatkan perempuan dalam kedudukan yang seimbang dengan laki-laki sebagai sesama anggota masyarakat.

Pemberdayaan perempuan bukankah suatu usaha untuk menyaingi atau melawan laki-laki tapi sekedar memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mansour Fakih bahwa memperjuangkan perbaikan posisi dan kondisi kaum perempuan tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan untuk menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan yang secara fundamental baru lebih baik dan lebih adil.[6]

Adapun mengenai hal-hal yang menyebabkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan perempuan, di antaranya adalah kebodohan. Aspek tersebut akan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak

---

[5] Srilatha Batliwala, "The Meaning of Women's Empowerment: New Concept from Action" dalam Gita Sen et al. *Population Policies Reconsidered Health, Empowerment and Rights,* (New York: International Women's Health Coalition, (IWHC), 1994), hlm. 129.

[6] Mansour Faqih, *Analisis Gender dalam Transformasi*... hlm. 164-165

menguntungkan karena mereka tidak bisa memahami bagaimana praktik praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial itu menimpa diri mereka. Mereka tidak tahu hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, mereka juga tidak tahu apa itu peran kodrati dan apa itu peran gender. Sehingga karena ketidaktahuan mereka terhadap hal-hal yang tersebut di atas, maka mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

Dengan demikian maka upaya penyadaran terhadap hak-hak perempuan, kemampuan serta potensinya merupakan hal yang niscaya dalam upaya pemberdayaan perempuan [7] sehingga mereka dapat memperluas jangkauan pilihan terhadap peran yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa.

Proses penyadaran perempuan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Sebagaimana diungkapkan oleh Kartini bahwa pendidikan merupakan sarana yang memungkinkan perempuan untuk bisa berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Melalui pendidikan, aspek kognitif perempuan akan dibuka, intelektualnya akan diasah sehingga dapat berpikir rasional, dapat mewujudkan potensi dan kreativitasnya, memiliki motivasi untuk maju dan meraih prestasi, berkarir serta memperoleh martabat layaknya laki-laki.[8] Dengan demikian maka pendidikan bagi Kartini merupakan pembuka jalan yang memungkinkan perempuan dapat berkiprah di dunia yang luas, dapat mengikuti perubahan yang terus-menerus berlangsung, dan memiliki posisi serta peran sosial dan intelektual.

Senada dengan apa yang digagas oleh Kartini, Ester Boserup dalam bukunya *Women's Role in Economic Development,* menyatakan bahwa pendidikan perempuan mampu mengeliminir dampak negatif dari pembangunan

---

[7] A. Sulasikin Murpratomo, "Pengaruh Kekuasaan dalam Meningkatkan…, hlm. 24.

[8] Kartini, *Surat-surat kepada Ny.RM. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, (Jakarta Djambatan, 1987), hlm. 8.

ekonomi karena pendidikan paling tidak bisa menambah akses perempuan terhadap pasar kerja dan memperbaiki keahlian atau skill tertentu.[9] Dengan demikian Boserup berpendapat bahwa pendidikan mampu menjembatani permasalahan yang dihadapi perempuan dalam dunia pembangunan. Selain itu, sebagai pengasuh dan pendidik utama dari anak-anaknya, pendidikan kaum perempuan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu pendidikan bagi kaum perempuan adalah hal yang sangat penting.[10]

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan perempuan adalah usaha mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri perempuan secara utuh, baik itu unsur intelektualitas, kepribadian, maupun keterampilan.

Pemberdayaan intelektual yaitu dengan menggunakan kemampuan akal perempuan semaksimal mungkin untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penguatan hak-hak dan perannya dalam kehidupannya. Sementara pemberdayaan kepribadian berarti mengembangkan daya rohani untuk menguatkan kemampuan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya tanpa adanya pengaruh dari luar dirinya sehingga mereka memiliki rasa percaya diri. Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan keterampilan adalah usaha mengembangkan kreativitas yang ada pada diri perempuan agar dapat menyesuaikan dan mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Analisis Gender dan Feminisme Islam

Feminisme berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Akibat dari persepsi ini, timbullah berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut serta untuk mengeliminasi dan menemukan

---

[9] Untuk Lebih jelas lihat Ester Boserup, *Women's Role in Economic Development*, (London: Allen and Unwin, 1970).

[10] Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 288.

formula penyetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia *(human being)*. Pada dataran operasional upaya pembebasan kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan pemberdayaan perempuan.

Feminisme sebagai sebuah gerakan, berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, karenanya harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut. Meskipun terjadi perbedaan antar aliran feminisme mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun pada umumnya mereka mempunyai kepedulian yang sama yaitu memperjuangkan nasib perempuan.[11]

Diantara upaya untuk memperbaiki kondisi perempuan adalah dengan dicanangkannya program pengintegrasian perempuan dalam pembangunan yang dikenal dengan *Woman in Development* (*WID*). Namun demikian, peran serta perempuan dalam pembangunan ternyata tidak menjadikan perempuan menjadi lebih berdaya, pengintegrasian mereka ke dalam kerangka institusional yang ada belum mampu memperbaiki posisi mereka bahkan malah justru semakin memarjinalkan posisi mereka.[12] Hal ini karena praktek pembangunan yang berlangsung secara umum selain tidak melibatkan perempuan dalam posisi yang menentukan, juga telah banyak meminggirkan posisi ekonomi kaum perempuan.

Kemudian muncullah program Gender and Development (GAD) sebagai respon atas kegagalan WID yang dianggap hanya mampu menjawab kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan.[13] GAD

---

[11] Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*..., hlm. 79.

[12] Taty Krisnawaty. "Gerakan Perempuan dan Demokrasi" dalam *Membincangkan Feminisme*..., hlm. 91-92. Lihat juga Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 87.

[13] Istilah kebutuhan gender "praktis" dan "strategis" pertama kali dikemukakan oleh Maxine molyneux. Menurutnya kebutuhan "praktis" gender merupakan kebutuhan yang segera meringankan beban hidup

menegaskan bahwa untuk memajukan perempuan diperlukan lebih dari sekedar pengintegrasian mereka dalam pembangunan, tetapi yang utama adalah mengubah pola relasi gender yang merugikan kaum perempuan.[14]

Premis GAD adalah bahwa relasi gender yang tidak adil merupakan halangan terbesar menuju kehidupan yang lebih baik dan juga bagi upaya pencapaian partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan. Karena gender adalah konstruksi sosial yang sifatnya tidak mutlak dan berbeda menurut tempat dan waktu, maka pendekatan GAD menyarankan agar masyarakat sendirilah yang menentukan persoalan gender yang mereka hadapi. Meskipun masalah gender berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain, namun transformasi pola relasi gender ke arah yang lebih adil merupakan isu universal.

Pemahaman tentang pola relasi gender dan masalah-masalah yang ditimbulkannya dapat digunakan dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembangunan untuk mengubah relasi gender yang tidak adil dan untuk memberdayakan perempuan. Gender sebagai alat analisis digunakan oleh gerakan feminisme untuk melihat adanya fenomena ketidakadilan atau mungkin penindasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat.[15]

Dengan demikian maka analisis gender adalah analisis yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Dengan analisis gender, diharapkan akan muncul kesadaran di kalangan kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mengubah kondisi yang tidak adil dan menindas tersebut, melalui pemberdayaan kaum perempuan atas diri mereka masing-masing.

---

perempuan dengan tidak menyinggung masalah ketidaksejajaran dalam pembagian kerja secara seksual ataupun ketidaksetaraan gender laki-laki dan perempuan, sementara kebutuhan "strategis" gender adalah kebutuhan jangka panjang yang menghilangkan ketidakadilan gender di dalam dan di luar rumah serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk memperoleh kebutuhannya, Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan...*, hlm. 157-158.

[14] Mansour Faqih, "Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender, Sebuah Pengantar" dalam *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, (Yogyakarta: SBPY dan OXFAM, 1997), hlm. 13-15.

[15] Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*..., hlm. 97.

Di kalangan umat Islam, wacana feminisme dikenal dengan istilah *tahrir al-mar'ah*. Bermula dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, wacana feminisme yang marak di Eropa diadopsi oleh mereka untuk kemudian dikembangkan dengan apa yang dikenal dengan istilah *tahrir al-mar'ah*.[16] Dengan demikian maka munculnya gerakan *tahrir al-ma'rah* memang tidak bisa dipisahkan dari gerakan feminisme di Barat, meskipun dengan tanpa mengabaikan adanya dinamika internal di kalangan umat Islam sendiri.

Sebagaimana feminisme[17] pada umumnya, feminisme Islam tidak muncul dari satu pemikiran teoritik dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di seluruh negara Islam. Secara umum feminisme Islam menjadi gerakan yang selalu bersifat historis dan kontekstual seiring dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan-permasalahan perempuan yang menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran.

Berangkat dari hal ini, yang selalu menjadi perhatian bagi para feminis muslim adalah adanya dialog yang terus-menerus antara prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang terdapat dalam teks-teks keagamaan dengan realitas perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat

---

[16] Istilah "feminisme" di dunia Islam kemungkinan besar dikenal sejak akhir abad XIX, misalnya lewat pemikiran Rifa'ah Tahthawi dalam bukunya *al-Mursyid al-Amin li al-Banat wa al Banin*, Qasim Amin dalam bukunya *Tahrir al-Mar 'ah* dan *al-Mar 'ah al-Jadidah*, lalu dilanjutkan oleh Malak Hifni Nashif, Nabawiyyah Musa. Semua mereka ini perintis dalam menumbuhkan kesadaran atas persoalan sensitif gender, termasuk dalam melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat yang hendak mengurung kebebasan perempuan, Muhammad Anas Qasim Ja'far, *al Huquq al-Siyasah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri*, (Kairo: Dar al-Nahdah al 'Arabiyyah, t.t.), him. 100-108.

[17] Meskipun sulit memberi definisi apa itu feminisme dalam berbagai macam bentuk pemikiran maupun gerakan yang pernah ada misalnya feminis liberal, radikal, sosialis, eco-feminisme dan sebagainya, tapi tetaplah ada apa yang disebut "kesadaran Feminis" yang mewarnai seluruh gerakan feminisme, apapun dan dimanapun, termasuk feminisme Islam, Budhy Munawar Rahman, "Islam dan Feminisme; dari Sentralisme kepada Kesetaraan" dalam *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 190.

Islam. Kesenjangan yang terjadi diantara kedua pihak ini harus senantiasa dicarikan upaya untuk pemecahannya.[18]

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian feminisme Islam adalah soal "patriarkhi" yang oleh para feminis muslim sering dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan), yang mendasari penulisan buku-buku teks keagamaan, yang bias kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan merupakan kata kunci dan merupakan tujuan feminisme Islam dalam menghadapi kecenderungan tafsir-tafsir tradisional yang mensubordinasikan perempuan sebagai "manusia kelas dua".

Disinilah para feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer[19], Riffat Hassan[20], Fatimah Mernissi[21], dan Aminah Wadud Muhsin[22], melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini mereka menggunakan pendekatan *hermeneutik* dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini mereka lakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal dari teks-teks keagamaan yang tampak patriarkis.

---

[18] *Ibid.,* hlm. 202.

[19] Dalam beberapa karyanya seperti, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj: Farid Wajidi dan Cicik Farkha, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), dan *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LkiS, 1991).

[20] Dalam bukunya *Setara di Hadapan Allah*, (Yogayakarta: LSPPA, 1994) dan *Made From Adam's Reb; The Woman Creation Question*, (Pakistan Autumsn, 1985).

[21] Dalam beberapa karyanya seperti *wanita di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), *Ratu Ratu Islam yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, 1995) dan *Setara di hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, 1994).

[22] Dalam bukunya *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994).

3. Kedudukan Perempuan dalam Islam

kedudukan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang perlu dibahas. Hal ini menjadi penting karena masih adanya anggapan bahwa makhluk Allah yang berjenis kelamin perempuan ini seolah-olah bukan manusia yang sempurna bahkan mereka dianggap kurang akalnya, agamanya, serta penggoda manusia. Adanya anggapan tersebut menyebabkan prinsip-prinsip kesetaraan yang dibawa oleh nilai-nilai ajaran Islam menjadi terreduksi sehingga dalam masyarakat Islam terjadi pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Padahal prinsip utama dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang ditegaskan dan yang kemudian dapat meninggikan ataupun merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah, karena Allah menciptakan seluruh manusia dari satu asal.[23]

Secara bersamaan Islam menetapkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan perikemanusiaan. Secara totalitas Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan, memperlakukannya dengan halus dan lembut, membuka jalan penyaluran emosi dan pelampiasan perasaan, baik dalam kedudukannya sebagai ibu, istri, atau anak gadis.[24]

Dengan demikian nampaknya memang al-Qur'an menginginkan adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini semakin diperjelas ketika al-Qur'an memberikan tempat yang sama kepada seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena sebelum datangnya Islam perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki[25]. Dengan merujuk kepada beberapa ayat al-Qur'an, kita dapat mengetahui bahwasanya secara

---

[23] Lihat Q.s. al-Hujurat: 13 dan Q.s. an-Nisa: 1.
[24] Lihat Q.s. Luqman: 14.
[25] Lihat Q.s. an-Nahl: 58-59.

normatif Islam lahir sebagai agama yang sangat memberdayakan kaum perempuan.

a. Perempuan Sebagai Hamba dan Khalifah Allah

Islam adalah agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan.[26] Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai dua kapasitas yaitu sebagai hamba (‘abid), dan sebagai representasi Tuhan (khalifah) tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, maupun warna kulit.[27] Dengan demikian maka laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama untuk mengelola bumi dan langit seisinya, memanfaatkannya demi kesejahteraan umat manusia. Kedudukan dan fungsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keberadaannya sebagai hamba dan khalifah Allah telah mengubah nasib perempuan dari kehidupan yang hina menjadi kehidupan yang terhormat sebagai makhluk Tuhan.

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa *(muttaqun)* dan untuk mencapai derajat sebagai hamba ideal ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitasnya sebagai hamba pula, perempuan mendapatkan penghargaan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan kadar pengabdiannya.[28]

Meskipun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim[29], yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari segi ibadah dan perempuan sebaliknya, karena

---

[26] Lihat Q s. Âli 'Imran: 112.

[27] Lihat Q.s. al-Hujurat: 13.

[28] Lihat Q.s. al-Hujurât: 13 dan Q.s. an-Nahl: 97

[29] Muhammad Isma'il al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Haidl*, hadits no 293 dan *Kitab al-Zákah*, hadits no. 1369, (t.tp.: Dar wa Mathabi' al-Sya'b, t.t.), Ibn Hajjaj Muslim, *Shahih Muslim*, dalam *Kitab-al-imán*, hadits no 114, (Kairo: al-Halaby wa Auladuh, t.t.).

“kurangnya akal dan agama”. Namun kata "kekurangan akal dan “agama" dalam hadis tersebut tidak berarti bahwa perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreativitas akal dan ibadah laki-laki.

Menurut Nasarudin Umar, hadis tersebut menggambarkan keadaan praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan di masa nabi, laki-laki memperoleh otoritas persaksian 1 berbanding 2 dengan perempuan, karena saat itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki. Kekurangan agama yang dihubungkan dengan halangan perempuan untuk melakukan sejumlah ibadah karena menstruasi misalnya, masih memerlukan keterangan lebih lanjut, karena halangan tersebut bukan kehendak perempuan melainkan sesuatu yang bersifat alamiah dan merupakan dispensasi dari Tuhan.[30]

Demikian juga dengan kapasitasnya sebagai khalifah, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Mahmud Syaltut (Syaikh al-Azhar), sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab menerangkan bahwa al-Qur’an telah menganugerahkan sesuatu kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan sesuatu kepada laki-laki. Keduanya dianugerahi potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, yang menyebabkan kedua jenis kelamin ini bisa melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.[31]

Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan didorong untuk bekerja sama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur (*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*) dalam ridha Allah

---

[30] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 251-252.

[31] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 269-270.

swt. Kehormatan yang telah diberikan oleh Islam kepada perempuan mengisyaratkan bahwa perempuan sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan bumi dan langit seisinya, harus memiliki modal atau bekal untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Diantaranya adalah ilmu pengetahuan, kemauan dan kesempatan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.[32]

Hal ini berarti bahwa perempuan harus berpendidikan cukup, memiliki keterampilan serta berakhlak mulia supaya bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai hamba tuhan di muka bumi ini.

b. Perempuan sebagai anggota keluarga

Islam telah mengangkat kedudukan perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad di jalan Tuhan. Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak istri tidak sekedar hitam diatas putih tetapi harus dilaksanakan dan dijaga sebaik mungkin.[33] Sebaliknya dengan adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri maka sebagai timbal baliknya Islam memberikan hak bagi suami untuk ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam beberapa literatur fiqih klasik yang sampai sekarang masih berlaku dinyatakan bahwa tugas istri adalah mendampingi dan mengatur rumah tangga serta melayani kebutuhan seksual suaminya.[34] Tugas-tugas tersebut dinyatakan sebagai

---

[32] S Baroroh Baried, "Konsep Wanita dalam Islam" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 36.

[33] Di antara hak tersebut, mendapat mahar dari suami yang merupakan refleksi Islam terhadap kaum perempuan (an-Nisa: 4), mendapatkan nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya (at-Thalaq: 7), serta mendapatkan nafkah batin dengan pergaulan yang ma'ruf (an-Nisa': 19).

[34] Al-Bukhâri, *al-Shahih*, juz 1, hadits no 853, hlm. 304. Muslim, *al-Shahih*, juz III, hadits no. 1829, hlm. 1459.

tugas atau kewajiban utama. Ia adalah *fardhu 'ain* (kewajiban personal). Syekh al Ghazali, ulama Mesir kontemporer yang secara progresif membela hak-hak perempuan, menyatakan:

> "Betapapun juga prinsip dasar yang harus kita ikuti atau kita upayakan agar selalu dekat padanya ialah "rumah". Saya benar-benar merasa gelisah pada kebiasaan para ibu rumah tangga yang meninggalkan anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh para pembantu atau diserahkan pada tempat penitipan anak. Nafas seorang ibu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara perilaku kebajikan dalam diri anak-anaknya".
>
> Selain itu dia juga mengatakan:
> "Seorang ibu adalah semilir angin sejuk yang menghembuskan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh ruang rumah-rumahnya. Ia sangat berpengaruh dalam pembentukan manusia yang baik dan sehat lahir batin"[35].

Namun Islam tidak pernah menghilangkan kepribadian seorang perempuan sebagai istri hanya karena telah melangsungkan pernikahan. Islam juga tidak meleburnya di dalam kepribadian sang suami meski tidak melepas bebas sebagaimana yang terdapat dalam kebiasaan Barat yang menjadikan perempuan bebas mau ke mana melangkahkan kakinya. Sehingga tidak diketahui nasab, gelar keluarga bahkan tidak diketahui bahwa dia adalah istri seseorang.[36]

Di luar tugas-tugas itu, seorang istri juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik dalam rangka aktualisasi potensi diri dengan melakukan kegiatan-

---

[35] Syaikh Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Syuruq 1988), hlm. 125.

[36] Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar 'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah*, (Kairo: Wahbah, 1996), hlm. 154.

kegiatan sosial, maupun dalam rangka menghasilkan belanja tambahan bagi dirinya sendiri atau keluarganya.[37] Sejarah kehidupan kaum perempuan pada masa nabi, termasuk juga istri-istri beliau, menunjukkan bahwa saat itu adalah masa kehidupan yang ideal bagi perempuan.

Menurut catatan Ruth Roded, pada masa awal Islam terdapat perawi hadits ternama dari kalangan perempuan diantaranya adalah Aisyah, Ummu Salamah, dan lainnya hingga jumlahnya mencapai kurang lebih 1236 orang. Selain itu mereka juga terlibat dalam Dewan umat yang membahas tentang manajemen militer dan politik serta melakukan bimbingan terhadap masyarakat muslim awam bersama para sahabat (laki-laki).[38]

Perempuan di masa kenabian juga ada yang bekerja sebagai ibu yang menyusui, merawat anak orang lain, berdagang, memelihara ternak, bertani, jururawat, guru, pembantu rumah tangga serta beberapa profesi lain yang ada pada saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pekerjaan-pekerjaan dan profesi tersebut tentunya semakin berkembang dan beragam. Kesemuanya dapat dilakukan oleh perempuan, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai pekerjaan kaum laki-laki.

Karena Islam tidak pernah mengatur secara rinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan saling tolong menolong. Selain itu yang menjadi perhatian Islam adalah adanya jaminan keamanan terhadap mereka, lebih-lebih jaminan terhadap pelecehan atas mereka, baik atas norma agama maupun norma sosial.

---

[37] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 127.

[38] Ruth Roded, *Kembang Peradaban; Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*, terj: Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 38.

Dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu, Islam menjamin penuh hak-hak reproduksi perempuan. Oleh karena itu Allah tidak membebaninya dengan kewajiban mencari nafkah. Sebagai penghormatan terhadap perempuan, dan Allah mewajibkan semua anak manusia untuk menghormati kedua orang tuanya terutama ibunya.[39]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwasanya norma-norma Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan sebagai anggota keluarga. Islam tidak pernah membatasi ruang gerak perempuan dalam sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan untuk aktif di sektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan maupun politik. Yang perlu digarisbawahi adalah keaktifannya di luar rumah tidak sampai membuat lupa atau mengingkari kodratnya sebagai perempuan yang berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui.[40] Hal penting yang harus diperhatikan adalah keaktifan perempuan di sektor publik tidak keluar dari batas-batas moral yang digariskan oleh agama.

c. Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan memiliki peluang untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya, sebagaimana firman Allah:

> "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk ke dalam

[39] Lihat Q.s. al-Ahqaf: 15.

[40] Meskipun dalam masalah menyusui (yang sifatnya kodarati dan hanya ibu yang bisa melakukannya) bisa disusukan kepada orang lain, tapi Islam sangat menganjurkan kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya lihat Q.s. al-Baqarah: 233.

surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun".[41]

Dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat, perempuan sebagaimana laki-laki juga dibebani kewajiban untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[42]

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan adanya konsep kesetaraan yang ideal antara laki-laki dan perempuan serta memberi ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal. Meskipun dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang masih sulit diselesaikan.

Di antara obsesi al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, maupun jenis kelamin. Jika

[41] Lihat Q.s. an-Nisä: 124, Q.s. an-Nahl: 97, Q.s. Ghafir. 40, Q.s. Ali 'Imran: 195.

[42] Q.s. at-Taubah: 71.

terdapat suatu pemahaman atau penafsiran yang menimbulkan ketidakadilan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai universalitas Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, maka pemahaman selalu terbuka untuk diperdebatkan.

Dari paparan di atas jelaslah kiranya bahwa dalam pandangan Islam perempuan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sangat mulia dalam kehidupan ini. Dalam fungsinya sebagai hamba Allah, perempuan berkewajiban untuk memenuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai khalifah Allah, perempuan berkewajiban untuk memelihara, cara memanfaatkan dan menjaga kelestarian alam seluruhnya dengan menggunakan akal dan pikiran yang telah dikaruniakan oleh Allah. Untuk itu maka perempuan harus berbekal ilmu pengetahuan, keterampilan serta akhlak mulia. Demikian juga dengan kapasitasnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat, perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berprestasi baik dalam masalah keduniawian maupun dalam bidang spiritualitas.

4. Pemberdayaan Perempuan dalam Islam

Sebelum kedatangan Islam, kaum perempuan selalu berada di bawah kezaliman kaum laki-laki, diperjualbelikan laksana binatang dan barang, tidak memperoleh hak-haknya serta tidak mendapatkan kedudukan yang seharusnya dimiliki dalam masyarakatnya. Perempuan juga sama sekali tidak berhak mendapatkan pendidikan, harus tinggal di rumah saja sehingga tidak memiliki andil dalam menentukan kehidupannya diwarisi dan tidak mewarisi. Dengan demikian maka sebelum kedatangan Islam, perempuan sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk menikmati kehidupannya.

Setelah kedatangan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan perempuan menjadi lebih baik dan cukup menggembirakan. Islam mengangkat hak dan martabat kaum perempuan, hal yang belum pernah dilakukan oleh agama-agama sebelumnya, bahkan oleh Undang-undang

manapun. Islam juga memberi perhatian khusus pada perempuan, terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama surat dalam al-Qur'an, yaitu surat an-Nisa. Sebagian besar ayat-ayat dalam surat ini membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan perempuan, terutama masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

a. Perempuan di Masa Pra Islam

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra-Islam atau yang biasa disebut dengan zaman Jahiliyah, kedudukan perempuan sangatlah rendah. Perempuan saat itu dianggap tidak lebih berharga dari sebuah komoditi.[43] Dalam banyak praktek hukum, harga perempuan adalah separuh harga laki-laki. Perlakuan hukum terhadap perempuan juga sangat diskriminatif.[44]

Sementara orang Yunani memandang perempuan sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan. Bahkan dianggap sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Perempuan tidak berhak melakukan transaksi apapun dan tidak boleh memiliki suatu benda bahkan tidak boleh mendapat warisan sedikitpun. Bila ditinggal mati suaminya, seorang istri bisa diwariskan kepada saudara atau kerabatnya.[45]

Begitu juga dengan bangsa Romawi, mereka menganggap perempuan hanyalah sebagai alat yang digunakan oleh setan untuk menggoda dan merusak hati manusia. Undang-undang Romawi menegaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan mutlak terhadap perempuan dan boleh menjualnya sebagai budak belian.[46] Sementara di India, perempuan bagaikan

---

[43] Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam…*, hlm. 31-32.

[44] Baca Muhammad Anas Qasim Ja'far, *perempuan dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj: Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 11-16.

[45] Ahmad Kahirat, *Markaz al-Mar'ah fi al-Islam*, (Kairo: Dar-al-Ma'arif, 1983), hlm. 11.

[46] Ali Abdul Wahid Wafi, *al-Musawah fi al-Islam,* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 49.

benda yang tidak boleh hidup sepeninggal suaminya. Ia harus dibakar hidup-hidup.[47]

Bahkan kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup merupakan praktek kekerasan yang merupakan implikasi dari anggapan yang merendahkan perempuan, yang menyebar di dunia Arab saat itu.[48]

Tradisi hina yang berlangsung selama bertahun-tahun dalam kehidupan masyarakat tersebut menyebabkan ketidakberdayaan kaum perempuan karena mereka dapat dikontrol sepenuhnya oleh kaum laki-laki. Namun demikian kondisi ini berangsur-angsur berubah ketika Rasulullah diutus membawa nilai-nilai universal Islam. Ia bukan saja mengubah tatanan masyarakat Arab waktu itu, tapi sekaligus mendekonstruksi pilar-pilar peradaban dan kebudayaan, tradisi dan diskriminasi yang telah sekian lama dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Oleh Islam, pandangan-pandangan dan praktek yang diskriminatif tersebut diubah dan diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka.

b. Pemberdayaan Perempuan dalam Ajaran Islam

Islam datang mengikis tradisi masyarakat jahiliyah yang sangat melecehkan kaum perempuan. Begitu banyak norma-norma Islam yang berusaha untuk mengembalikan kehormatan perempuan, menghargai jasa serta pengorbanannya serta menempatkannya secara proporsional. Ketika masyarakat jahiliyah merasa malu bila punya anak perempuan, maka nabi menjanjikan surga bagi mereka

---

[47] M 'Athiyyah al-Abrosyi, *Makanah al-Mar 'ah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Mesir, tt.), hlm. 9.

[48] Muhammad Asad, *Massage of the Qur'an* (Gibraltar t.p., 1980), hlm. 933. Bahkan dituturkan oleh Hafidz Ghulam Sarwar dalam bukunya *Origin and Development of Islam; Life of Muhammad*, (India: Adam Publishers and Distributors, 1996), hlm. 35-36, di masa jahiliyah ada seorang ayah yang membunuh sepuluh anak perempuannya, orang tersebut bernama Qais bin 'Ashim.

yang mampu merawat 3 orang anak perempuan dengan baik, dan ketika perempuan tidak diberi apa-apa dalam bidang sosiokultural, maka Islam menjanjikan hak-hak yang setara bahkan dalam bidang spiritual sekalipun.

Namun demikian Islam tidak menghapus arti pentingnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi struktur fisik, yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.[49] Sebagaimana diilustrasikan oleh al-Qur'an, dengan perbedaan siang dan malam yang keberadaan keduanya menjadi satu kesatuan dari ketetapan dan ketentuan Allah *(sunnatullah)*.[50]

Sebagai konsekuensi logisnya, perbedaan struktur fisik ini membawa perbedaan fungsi, tugas termasuk perbedaan hak dan kewajiban. Meskipun sama-sama mukallaf tapi dengan takaran yang berbeda. Misalnya karena fungsi reproduksinya perempuan mengalami haid, hamil, nifas, dan menyusui, sementara laki-laki tidak, maka al-Qur'an mengatur ketentuan hukum yang berbeda antara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah reproduksi maupun yang menyangkut kewajiban-kewajiban lain, baik itu yang bersifat vertikal maupun horizontal, individual maupun sosial.

Perempuan yang sedang haid dan nifas dibebaskan dari kewajiban salat tanpa harus menggantinya di hari yang lain. Perempuan yang menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan dapat menggantinya dengan fidyah. Karena perempuan mempunyai keterbatasan disebabkan oleh tugas reproduksi yang dipikulnya, maka perempuan dibebaskan dari kewajiban mencari

---

[49] Sugeng Sugiyono, *Konsepsi Gender dalam Perspektif Islam*, (makalah Seminar Sehari: Re-interpretasi Peran Gender dalam Perspektif Islam, KPSW BPP3M, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994, hlm. 3.

[50] Lihat Q.s. Yasin: 36.

nafkah untuk keluarganya, dan tugas itu diberikan kepada laki-laki (suaminya).[51]

Dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai konsep peran yang khusus untuk laki-laki maupun perempuan, kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang sangat khas untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Al-Qur'an cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan kecerdasan manusia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai dan harmonis.

Diantara upaya al-Qur'an dalam menghargai dan memberdayakan perempuan adalah *pertama*, larangan membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Apapun alasannya, Islam melarang keras tradisi yang biadab ini, karena hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada umumnya masyarakat jahiliyah melakukan tindakan ini karena dua alasan, yaitu ketakutan terhadap beban ekonomi[52], dan ketakutan akan kehinaan.[53]

Kedua, hak mendapatkan warisan. Sebelum kedatangan Islam, kedudukan perempuan tak ubahnya seperti benda, tidak memiliki hak apapun, termasuk bagi dirinya sekalipun, bahkan perempuan dijadikan sebagai hak milik yang bisa diwariskan. Islam datang dengan mengubah tradisi ini yaitu dengan memberikan bagian setengah dari bagian laki-laki.[54] Ketentuan tersebut secara tekstual terkesan diskriminatif, tetapi jika dilihat secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi sosial historis ketika ayat itu diturunkan, perubahan tersebut merupakan langkah yang sangat revolusioner karena berusaha mendobrak tradisi yang sudah mapan di kalangan bangsa Arab pada saat itu.

---

[51] Yunahar Ilyas, *Perspektif Gender dalam Islam*, Makalah Seminar Nasional: Bias Gender dalam Dakwah, PSW UII dan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

[52] Lihat Q.s. al-An'am: 151 dan al-Isra': 131.

[53] Lihat Q.s. an-Nahl: 58-59.

[54] Lihat Q.s. an-Nisa: 10.

Ketiga, batasan poligami. Poligami adalah solusi sementara dari perkawinan tak terbatas menuju perkawinan monogami yang lebih menjamin keadilan. Islam membatasi poligami maksimal 4 orang istri.[55] Jika dilihat dari konteks sejarahnya, pembatasan ini merupakan pengurangan yang cukup drastis yaitu dari tidak ada batasan sama sekali menjadi ada batasan yaitu 4. Dengan demikian maka pembenarannya bermakna kontekstual, bukan normatif. Karenanya, keberlakuannya pun hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu dan bukan untuk selamanya.

Keempat, dari segi pengabdian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pengabdian. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pahala dan balasan berupa jaminan kehidupan yang baik atas apa yang dikerjakannya.[56]

Kelima, hak mendapatkan pendidikan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh pendidikan. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin, mereka dituntut untuk belajar. [57] Al-Qur'an memberikan pujian bagi mereka yang mau berpikir dan berzikir tentang kejadian langit dan bumi.

Dari paparan di atas, perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem sosial memiliki maksud dan tujuan pemberdayaan perempuan secara bertahap dari belenggu yang melilitnya, yang tidak terkatakan dalam dhahir ayat itu sendiri. Prinsip universal ajaran Islam ini dapat dijadikan pegangan oleh setiap muslim bahwa secara

---

[55] Lihat Q.s. an-Nisa: 34.

[56] Lihat Q.s. an-Nisa: 32, an-Nahl: 97, al-Zalzalah: 7-8, al-Mukmin: 40.

[57] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Araby, t.t.), hlm. 81.

kuantitatif tidak ada perbedaan substansial antara jenis kelamin, suku, golongan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang ada di antara mereka terdapat pada nilai kualitatif yang bersifat personal dan hanya Allah jualah yang mengetahuinya. Oleh karena itu apabila kategori ini dikorelasikan dengan alam manusia maka keunggulan pihak satu dari lainnya bersifat relatif. Relativitas bobot jenis kelamin, suku, dan golongan ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar untuk menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi antara berbagai komponen dalam rangka menciptakan suasana yang adil dalam kehidupan.

B. Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan usaha membimbing, membina, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan intelektualitas dan kepribadian anak didik ke arah kedewasaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam adalah sebuah proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas-tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan Islam yang dimaksud disini adalah pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islami yaitu pendidikan yang selalu mengacu pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis.

1. Konsep Pendidikan Islam

Dalam terminologi bahasa Arab - sebagai bahasa pengantar studi keislaman- pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada term *at-tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim.* Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, pendidikan dalam Islam lebih cocok menggunakan istilah *at-Tarbiyah* yang berarti pengajaran atau pendidikan yang dilakukan secara bertahap. [58] Sementara Naquib Al Attas menganggap bahwa yang cocok dengan arti

[58] Abdurrahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat,* terj: Hery Nur Ali, (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm. 30-32. Lihat juga Ahmad Sya'labi, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyyah,* (Kairo: al-Kasysyaf, 1954), hlm. 21-23.

pendidikan dalam Islam adalah *at-Ta'dib*, yang memiliki makna pembentukan moralitas dan watak anak didik[59], meski istilah *ta'lim* telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam bahkan menurut para ahli, istilah ini lebih bersifat universal dibanding dengan istilah *at-tarbiyyah* maupun *ta'dib*. Rasyid Ridha misalnya, mengartikan *ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.[60]

Sedangkan menurut Azyumardi Azra, *at-tarbiyah* lebih berorientasi pada aspek intelektualitas dan kognisi. Sementara *ta'dib* lebih pada proses yang lebih maju yaitu disamping intelektualitas, juga diaksentuasikan pada proses inkulturisasi (proses pembudayaan) sehingga *output*nya adalah manusia yang yang berbudaya, berkarakter, dan berakhlak.[61]

Kendatipun demikian, terlepas dari perdebatan makna ketiga term diatas, secara terminologi, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan pengertian pendidikan Islam. Diantaranya adalah Ahmad D Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama *(al-Insan al-Kamil)*. [62] Sedangkan Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.[63]

---

[59] M Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terj: Haidar Bagir. (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 60.

[60] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Tafsir al-Manar*, Juz VII. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 262.

[61] Azyumardi Azra, "Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 94.

[62] Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1989), hlm. 19.

[63] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Pespektif Islam,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 32.

Sementara Muhammad Fadil Al Jamali mengartikan pendidikan Islam sebagai upaya mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya agar bisa hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.[64] Dari berbagai pengertian tersebut, tidak nampak adanya pembedaan potensi laki-laki dan perempuan, dimana hal ini sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang senantiasa mengedepankan nilai persamaan dan keadilan.[65]

Dalam konsep pendidikan Islam, Allah adalah pendidik utama yang telah mengajarkan kepada manusia nama-nama sebagai simbol pengetahuan[66] melalui bahasa lisan[67] dan bahasa tulisan[68] di mana sebelumnya manusia tidak memiliki pengetahuan sedikitpun [69] . Dengan demikian berarti bahwa pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu di jagat ini, karena ia dibekali Allah dengan akal pikiran dan kemampuan intuisi yang dapat menalar. Oleh karena itu, pembelajaran Tuhan kepada hambaNya selalu diarahkan kepada upaya mendorong manusia dengan tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menangkap fenomena alam yang melingkupi realitas hidup mereka.

Mereka yang kritis akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi-Nya[70] dan kepada mereka yang kritis pula Allah mempercayakan tugas pengajaran dan pendidikan sebagai amanat-Nya. Mereka yang menguasai nama-nama dan ilmu pengetahuan memiliki otoritas menjadi khalifah-Nya di muka bumi untuk melestarikan pengabdian hanya kepada-Nya. Pengabdian hanya kepada

---

[64] Muhammad Fadhil al-Jamali, *Nahwa al-Tarbiyah al-Mukminah*, (al-Syirkah al Tunisiah li al-Tauzi', 1977), hlm. 3.

[65] Q.s. al-Hujurat: 13, at-Taubah: 71, al-Baqarah: 187.

[66] Lihat Q.s. al-Baqarah: 31.

[67] Lihat Q.s. al-'Alaq: 1.

[68] Lihat Q.s. al-'Alaq: 4.

[69] Lihat Q.s. al-Baqarah: 32.

[70] Lihat Q.s. al-Mujadalah: 11.

Allah merupakan tujuan akhir segala bentuk kehidupan, sehingga pendidikan Islam juga diarahkan untuk mengantarkan anak didik baik laki-laki maupun perempuan mencapai tingkatan *'abd* atau hamba yang sempurna.[71]

Pendidikan Islam juga diharapkan bisa mengantarkan anak didik untuk mencapai kriteria *ulul albab* yang baginya Allah menjanjikan kebahagiaan, ketentraman, dan kesenangan sejati di dunia dan akhirat, yaitu mereka yang berpikir tentang langit dan bumi serta berusaha mengungkap keunikan, kekhasan dari segala yang terdapat di dalamnya dengan tanpa melupakan untuk selalu bersujud dan berdzikir hanya kepada-Nya.[72]

Dari paparan tersebut, pendidikan Islam sebagai penuntun sekaligus penjaga umat manusia untuk selalu ber Islam (memasrahkan diri hanya kepada-Nya) memiliki peran yang strategis untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang saleh, yang memiliki integritas keilmuan dan keimanan yang handal untuk kemudian dihembuskan ke dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan umat secara keseluruhan agar menjadi sebuah tatanan kehidupan yang maju, beradab, dan berkepribadian.

2. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Salah satu jenis lembaga pendidikan yang secara historis cukup penting peranannya di Indonesia adalah pesantren. Selain istilah Pesantren ada beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk jenis lembaga pendidikan Islam yang kurang lebih memiliki ciri-ciri yang sama. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura, umumnya menggunakan istilah *pondok*[73], *pesantren,* atau *pondok pesantren*. Sementara di Minangkabau menggunakan

---

[71] Lihat Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Krisis dalam Pendidikan Islam*, terj: Fadhlan Mudhofir, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2000), hlm. 49-50.

[72] Q.s. Ali Imran: 190-191.

[73] Secara khusus istilah ini dipakai di Pasundan. Lihat M Dawam Raharjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 2. Tetapi sebenarnya di Jawa juga ada yang menggunakan istilah "Pondok". Lihat Soegarda Purbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 279.

istilah Surau dan di Aceh "rangkah meunasah"[74]. Apapun istilahnya jelas kesemuanya tersebut diatas berbeda atau bisa dibedakan dengan lembaga pendidikan milik kaum muslimin yang lain, yaitu madrasah dan sekolah dalam berbagai jenis dan jenjang yang ada.

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh para ulama dan para wali pada abad pertengahan. Mastuhu mendefinisikannya sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.[75]

Adapun mengenai tujuan didirikannya pesantren pada dasarnya terbagi menjadi: 1) tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, dan 2) tujuan umum yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup mengamalkan ilmunya dan menjadi mubaligh bagi masyarakatnya.[76] Melihat tujuan tersebut jelas sekali bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berusaha mencetak insan-insan yang *tafaqquh fiddin* dan menyebarluaskan misi Islam demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam.

Sementara dalam hal penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran, tampaknya cukup bervariasi antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Namun demikian secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

a. Pesantren tradisional yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional, dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering juga disebut dengan kitab kuning. Diantara Pesantren ini ada yang

---

[74] M Dawam Raharjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam *Pesantren dan Pembaharuan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 2.

[75] Mastuhu, *Dinamika Sisitem Pendidikan....*, hlm. 6.

[76] HM Arifin, *Kapita Selekta Peniddikan (Islam dan Umum),* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 248.

mengelola madrasah, bahkan juga sekolah-sekolah umum mulai tingkat dasar atau menengah, dan ada pula pesantren-pesantren besar yang mengelola perguruan tinggi. Murid-murid atau mahasiswa boleh tinggal di pondok atau di luar pondok, tetapi mereka diwajibkan mengikuti pengajaran kitab-kitab dengan cara *sorogan* maupun *bandongan*, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Guru-guru pada madrasah atau sekolah pada umumnya mengikuti pengajian Kitab pada tingkatan tinggi.

b. Pesantren Modern yang mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Semua santri yang masuk pondok terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian Kitab tidak lagi menonjol tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Demikian pula cara *sorogan* dan *bandongan* mulai berubah bentuk menjadi bimbingan individual dalam hal belajar dan kuliah umum atau *stadium general*[77].

Dari kedua tipologi tersebut, tampaknya sebagian pondok pesantren tetap mempertahankan bentuk pendidikannya yang asli dan sebagian lagi mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan zaman dan perkembangan pendidikan yang ada di tanah air. Karena itulah dewasa ini di samping terdapat pesantren dengan karakteristik tradisionalnya banyak juga bermunculan pesantren- pesantren modern.[78]

---

[77] Depag RI, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 65. Lihat juga Amal Fathullah Zarkasyi, "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah" dalam *Solusi Islam atas Problematika Umat, Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 103-104.

[78] Abdullah Zarkasyi membagi kriteria pondok pesantren menjadi tiga yaitu tradisional, modern, dan perpaduan antara tradisonal dan modern. Menurutnya jenis pesantren tradisional sudah banyak yang berubah, mereka sudah memakai sistem modern, meski tidak meninggalkan tradisi yang lama. Jenis inilah yang kemudian banyak dijumpai yaitu pesantren yang memadukan sistem pendidikan tradisonal dan modern. Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi "langkah Pengembangan Pesantren" dalam *Rekonstruksi*

Kendatipun demikian, bagaimanapun perkembangannya tampaknya ciri khas yang terdapat dalam pesantren itu sendiri selalu tampak pada lembaga pendidikan tersebut. Adapun ciri khas pondok pesantren yang sekaligus menunjukkan unsur pokoknya serta membedakannya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya adalah sebagaimana diungkap oleh Zamakhsyari[79], ada lima elemen pesantren yaitu adanya kyai yang menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren, adanya santri yang mukim (bertempat tinggal secara menetap dalam waktu yang relatif lama) untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, adanya masjid yang digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan proses belajar mengajar, adanya pengajaran kitab-kitab klasik atau yang biasa disebut dengan kitab kuning, serta adanya pondok atau asrama yang dijadikan sebagai tempat bermukim para santri untuk menuntut ilmu.

3. Problematika Pendidikan Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, berperan sebagai pusat transmisi dan diseminasi ilmu-ilmu keislaman, terutama yang bersifat kajian-kajian klasik. Ditinjau dari sejarah pendidikan Islam Indonesia, Pesantren sebagai sistem pendidikan Islam tradisional telah memainkan peran yang cukup penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun demikian, pesantren sebagai pelestari nilai-nilai universal Islam, seringkali mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pesantren cenderung bersifat eksklusif dan tertutup terhadap nilai-nilai yang datang dari luar[80], termasuk didalamnya nilai-nilai feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sehingga karena eksklusifitas nya ini, pendidikan pesantren masih sarat dengan nilai-nilai bias gender.

Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, dan Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 220.

[79] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang…*, hlm. 44.

[80] Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm 90.

Di samping itu, proses belajar mengajar yang selama ini ada di pesantren, mengakibatkan *output*nya terkesan berwatak lambat, pasif, kurang peka terhadap masalah, karena *critical thinking* dan *abstrak thinkingnya* sangat terbatas dan kurang dilatih[81]. Akibatnya meski jalur pendidikan dijadikan sebagai Wahana untuk memberdayakan perempuan, tapi pendidikan pesantren yang terjadi selama ini masih belum memberdayakan perempuan. Hal ini bisa dilihat melalui beberapa hal diantaranya adalah kurikulum yang belum sensitif gender dan metode pendidikan yang masih bersifat indoktrinasi.

a. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum secara garis besar dapat diartikan dengan seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai[82]. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah[83].

Sementara menurut Manfred Ziemek, kurikulum Pesantren sebenarnya mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan pesantren dalam waktu dua puluh empat jam. Suasana pesantren yang mencerminkan kehidupan sederhana, disiplin, rasa sosial, mengatur hidup sendiri, ibadah dengan tertib, dan lain sebagainya memberikan nilai tambah dalam keseluruhan proses belajar yang tidak bisa didapat di luar sistem pendidikan pesantren[84].

Sejalan dengan tidak dirumuskannya tujuan pendidikan dari sejumlah besar pesantren yang ada di Indonesia, mengakibatkan kesulitan yang lebih besar lagi dalam menentukan kurikulum yang berlaku secara menyeluruh pada tiap-tiap pesantren. Persoalan

---

[81] M Rofangi, "Posisi Kiai dalam Pengembangan Tradisi Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan*..., hlm. 182.

[82] Jalaludin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

[83] S Nasution, *Pengembangan Kurikulum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 9

[84] Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* terj: Butje B Soendjojo, (Jakarta, P3M, 1986), hlm. 164.

ini terutama dilatarbelakangi oleh kondisi pesantren yang memiliki tradisi dan kekhasannya masing-masing. Namun demikian diantara perbedaan-perbedaan itu masih terdapat beberapa kesamaan yaitu dalam hal penggalian Khazanah kebudayaan Islam melalui kitab-kitab klasik yang merupakan salah satu unsur penting dari keberadaan sebuah pesantren sekaligus sebagai ciri khas dari proses belajar mengajar di pesantren.

Di kalangan pesantren tradisional masih terdapat keyakinan bahwa ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning merupakan pedoman hidup yang yang cukup relevan. Artinya ajaran-ajaran kitab kuning yang diyakini bersumber dari al-Qur'an dan hadits, yang merupakan *piwulang-piwulang* luhur dari ulama terdahulu yang saleh, masih tetap berguna untuk meraih kebahagiaan hidup didunia dan akhirat[85].

Dalam persoalan hubungan laki-laki dan perempuan, kitab kuning yang menjadi rujukan utama sebagian pesantren di Indonesia adalah kitab *Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq al-Zaujain* karya Muhammad 'Umar Nawawi al-Bantani [86]. Menurut Naqiyah Muchtar dalam kajiannya terhadap kitab tersebut, ada indikasi ketidaksesuaian kandungan pesan yang terdapat dalam kitab tersebut dengan kandungan pesan yang ada dalam al-Qur'an[87].

Menurut Masdar, kitab kuning yang secara umum dikaji oleh pesantren tradisional menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang separuh harganya dibanding dengan laki-laki, dengan contoh-contoh

---

[85] Masdar F Mas'udi, "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning" dalam *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah,* ed: Dawam Rahardjo, Jakarta: P3M, 1985, hlm. 57.

[86] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan...* hlm. 122.

[87] Naqiyah Mukhtar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning; Studi terhadap Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain karya Muhammad 'Umar Nawawi al-Bantani, dalam *Majalah 'Ulumul Qur'an*, No 4 VII/1997, hlm. 33.

seperti fiqih yang mengajarkan orang tua untuk membeli dua ekor kambing pada kelahiran anaknya yang laki-laki, dan hanya satu ekor kambing untuk kelahiran anak perempuan. Hal yang sama juga diterapkan pada waktu seseorang mati terbunuh, kalau laki-laki, keluarganya berhak menuntut ganti rugi 100 ekor unta, sementara jika yang terbunuh adalah perempuan maka ganti rugi nya cukup dengan 50 ekor unta[88].

Meskipun demikian tidak berarti pandangan bahwa perempuan sejajar dengan laki-laki tidak ada dalam pemikiran kitab kuning, terutama ketika ajaran dalam kitab kuning memandang kedua makhluk itu melalui kacamata spiritualitas ketuhanan. Hal ini nampak ketika para penulis kitab kuning menafsirkan ayat al-Qur'an yang berbunyi *Inna akramakum 'indallahi atqakum* (al-Hujurat: 13) dan ayat lain yang berbunyi *Man 'amila sholihan min dzakarin wa untsa*... (an-Nahl: 97).

Akan tetapi pandangan seperti ini, selain hanya terdapat dalam kitab kuning, dikhawatirkan masih sebatas jargon belaka karena penafsirannya tidak banyak dikemukakan dalam semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan secara signifikan. Pandangan yang menyejajarkan laki-laki dan perempuan tersebut nampaknya hanya sebatas pada kehidupan batin dan *ukhrawi*, belum terefleksikan dalam kehidupan sosial yang nyata.

Namun demikian tidak berarti bahwa kitab kuning dengan segala pemikirannya harus dinilai buruk. Kitab kuning yang merupakan bangunan intelektual yang cukup canggih merupakan produk budaya zaman pertengahan, di mana Islam sangat didominasi oleh cita rasa budaya yang keseluruhan memang sangat laki-laki. Sehingga prasangka dan

[88] Masdar F Mas'udi, "Perempuan di Antara lembaran Kitab Kuning" *dalam Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual,* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 156-157.

kepentingan jenis kelamin laki-laki bisa jadi sangat mewarnai pembahasannya.

b. Metode Pendidikan

Di kalangan umat Islam, Pesantren dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan baik pada sisi tradisi keilmuannya, yang oleh Martin Van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung *(great tradition)* maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitas Islam[89]. Namun karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Ilmu dianggap sebagai sesuatu yang sudah bulat dan tidak dapat dikembangkan. Proses transmisi itu merupakan penerimaan secara *taken for granted*.

Metode yang secara umum digunakan dalam proses pembelajaran di pesantren mengikuti pola tradisional yaitu metode *sorogan* dan *bandongan*. Kedua model pembelajaran ini oleh sementara pakar pendidikan dianggap statis dan tradisional[90]. Kyai atau Ustadz sebagai pendidik biasanya bersifat aktif, sementara santri sebagai peserta didik bersifat pasif. Dengan demikian maka sistem pembelajaran yang dikembangkan di pesantren, cenderung bersifat monologis.

Dengan metode ini pendidik dapat secara leluasa melakukan indoktrinasi terhadap peserta didik. Metode ini secara tidak sadar telah membunuh kreativitas dan daya kritis peserta didik untuk mengetahui materi secara lebih mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Pendidikan indoktrinasi ini cenderung memaksakan nilai-nilai yang telah dianggap baku, tidak membuka ruang dialog, pendidikan ini tidak melihat peserta didik sebagai sebuah nilai tersendiri yang berkepribadian unik

---

[89] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan...*, hlm. 17.

[90] Saifudin Zuhri, "Reformulasi Kurikulum Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah,* ed: Ismail SM dkk. (Yogyakarta Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), hlm 102.

dengan status dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati[91].

Selanjutnya proses monologis ini mengakibatkan *kemandegan* dalam pengembangan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan yang humanis, karena tujuan pendidikan Islam tidak hanya mensosialisasikan nilai-nilai yang telah ada, tapi lebih dari itu yakni pengembangan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam konteks persoalan itulah, dapat dilihat bahwa pendidikan pesantren masih sarat dengan nilai-nilai yang bias gender, karena lebih mengekalkan peran gender ketimbang menolaknya. Pendidikan semacam itu memiliki kecenderungan untuk menghadapi berbagai kendala dalam mempersiapkan potensi dan kemampuan perempuan kecuali perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sebagaimana diuraikan oleh Ester Boserup dalam *Womens Rule in Economic Development,* bahwa model pendidikan yang masih dipenuhi dengan prasangka-prasangka umum mengenai inferioritas perempuan, akan semakin memperkuat anggapan adanya perbedaan pembawaan sejak lahir dalam kemampuan-kemampuan kedua jenis kelamin.

4. Pendidikan Pesantren Sebagai Paradigma Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan tidak selamanya membuat peserta didik menjadi berdaya. Pendidikan, sampai batas tertentu dapat membentuk kepribadian peserta didik. Membentuk di sini berarti netral, bisa berupa bentukan yang membuat peserta didik menjadi mandiri, tapi sebaliknya bisa juga membentuk peserta didik yang memiliki sifat ketergantungan dan tidak memiliki keberanian.

Pendidikan Islam sebagai sebuah proses transformasi nilai keislaman, memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat Islami. Adanya ketimpangan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam

[91] YB Mangun Wijaya, "Mencari Visi Dasar Pendidikan dalam *Basis* edisi khusus *Menggugat Dunia Pendidikan Kita*, No. 01-02 tahun ke 47.

masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan Islam itu sendiri.

Islam hadir di dunia ini tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu, dan pengabaian terhadap jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan yang sepadan antara hak dan kewajiban dan bagi laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah dan berada di bawah dominasi serta kekuasaan laki-laki. Pada saat yang sama, keadilan juga tidak memberi ruang pada laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang memiliki hak penuh atas perempuan. Inilah prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan nilai universal ajaran Islam.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia berperan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang universal tersebut. Tatapan Islam yang sangat memberdayakan perempuan tersebut berimplikasi pada pola pengembangan pendidikan yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Dengan demikian maka pendidikan pesantren harus diorientasikan untuk mengarahkan, membimbing, dan menuntun anak perempuan sebagai peserta didik, supaya mampu berdiri sendiri atau mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey, bahwa melalui pendidikan setiap individu seharusnya memiliki kesempatan untuk mempergunakan kekuatan yang dimilikinya dalam melakukan kegiatan yang berarti[92].

Sementara Mansour Fakih menegaskan bahwa pada dasarnya tugas pendidikan adalah membangkitkan kesadaran kritis yang akan mendorong masyarakat untuk

[92] Sidney Hook, "Filsafat Pendidikan John Dewey" dalam *Sidney Hook: Sososk Filsuf Humanis Demokrat dalam Tradisi Pragmatisme*, Jakarta: YOI, 1994, hlm. 202.

memperjuangkan keadilan dan menyetop ketidakadilan[93]. Oleh karena itu pendidikan pesantren juga diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kritis peserta didiknya dengan penyadaran ini diharapkan perempuan bisa menganalisa secara kritis keadaan yang terjadi di sekelilingnya[94]. Sehingga perempuan dapat mengetahui praktik-praktik diskriminasi yang merugikan mereka.

Hal ini diinspirasi oleh sebuah pemahaman bahwa Islam secara konseptual sebagaimana tertuang dalam kitab suci dan secara praksis sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, mengandung nilai-nilai universal yang memberikan ruang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam pentas kehidupan. Hanya karena perjalanan waktu dan umatlah yang menyebabkan tampilan Islam terkesan seksis dan sangat merendahkan kaum perempuan. Padahal jika ditilik dari sumber kitab suci dan risalah kenabian dalam Islam, tidak dipungkiri bahwa kedua sumber tersebut menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara, seimbang dan berkeadilan.

---

[93] Mansour Faqih, "Gerakan masyarakat Untuk Keadilan Gender" dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 5 1999, hlm. 52.

[94] Pinky Saptandari, "Tantangan dan Peluang Gerakan Perempuan dalam menyongsong Otonomi Daerah" dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan dalam Transisi Demokrasi dan Globalisasi,* Vol 6. No 1, Februari, 2001, hlm. 98.

PERGURUAN ISLAM

PONDOK TREMAS

PACITAN JAWA TIMUR

www.pondoktremas.com

BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PONDOK TREMAS

Upaya pemberdayaan berangkat dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya tersebut dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dengan disertai upaya untuk mengembangkannya.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti intelektualitas, kepribadian, dan keterampilan, dengan tujuan supaya perempuan dapat mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sehingga tercipta hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga keagamaan mempunyai peran yang cukup penting dalam melakukan kerja pemberdayaan dan transformasi masyarakat, yang salah satunya adalah berupa pemberdayaan terhadap perempuan[1].

Pemberdayaan perempuan yang berlangsung di pesantren sangat tergantung pada bagaimana kalangan pesantren memandang konsep perempuan, kedudukan dan perannya, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pesantren tersebut dalam mensosialisasikan pandangan-pandangan mereka mengenai perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan merupakan hasil dari akumulasi pandangan kalangan pesantren terhadap masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan status dan peran perempuan, serta bagaimana mereka mengaktualisasikan pandangan mereka dalam aktivitas pembelajaran di pesantren secara optimal.

A. Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Tremas

Tremas merupakan nama pondok pesantren yang cukup tua di antara beberapa pesantren yang terdapat di Provinsi Jawa

[1] Sukidi, *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren, ...*

Timur[2]. Nama pesantren Tremas diambil dari nama desa Tremas yang merupakan tempat berdirinya pesantren tersebut. Tremas berasal dari kata "trem" dan kata "mas". Kata trem berasal dari kata "patrem" yang berarti senjata atau keris kecil. Sementara kata "mas" berasal dari kata "emas" yang berarti logam berharga yang biasa dipakai untuk perhiasan kaum perempuan.

Pengambilan nama ini bermula ketika salah seorang punggawa Keraton Surakarta yang bernama Ketok Jenggot mendapat tugas untuk membuka hutan yang merupakan cikal bakal desa Tremas dengan menggunakan senjata pemberian Raja Surakarta berupa patrem emas. Kemudian setelah Ketok Jenggot berhasil melakukan tugasnya, senjata berupa patrem emas itu ditanam di mana beliau pertama kali membuka hutan tersebut. Dan akhirnya daerah hutan yang baru dibuka tersebut diberi nama "Tremas"[3].

1. Sejarah Perkembangan Pesantren Tremas

Perjalanan pesantren dalam sejarahnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 fase:

a. Fase Rintisan (1830- 1894)

Pesantren ini didirikan oleh Kyai Haji Abdul Manan putra dari Demang Semanten Raden Ngabehi Dipomenggolo, pada tahun 1830. Beliau menimba ilmu agama di Pesantren Tegalsari Ponorogo di bawah bimbingan Kyai Hasan Besari. Dilihat dari letak geografisnya, pesantren ini terletak di desa Tremas, kecamatan Arjosari, kabupaten Pacitan.

Pada mulanya pesantren yang didirikan oleh Raden Bagus Darso (nama kecil KH Abdul Manan) ini berada di Desa Semanten yang berjarak 2 km dari arah utara Kota Pacitan. Namun setelah beliau dinikahkan dengan Putri Demang Tremas, Raden Ngabehi Honggowijoyo, karena pertimbangan yang bersifat kekeluargaan akhirnya beliau pindah ke desa Tremas yang jauh dari keramaian maupun pusat pemerintahan, sehingga merupakan tempat yang

[2] Marwan Saridjo dkk, *Sejarah Pondok Pesantren…*, hlm. 44.

[3] Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas dan Perkembangannya*, (Tremas: Majlis Ma'arif Press, 2001), hlm. 23-24.

cukup potensial untuk melakukan proses belajar mengajar[4].

Usaha pertama kali yang dilakukan oleh KH Abdul Manan adalah membangun masjid yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pengajian. Baru setelah santri-santri dari jauh yang sebagian besar berasal dari santri beliau saat masih di Semanten mulai berdatangan, maka beliau membangun sebuah pondok atau asrama yang terletak di sebelah selatan masjid. Meskipun kondisi fisik masjid dan pondok atau asrama tersebut pada tahap permulaan masih sangat sederhana. Atapnya menggunakan daun ilalang dan kerangka lainnya masih menggunakan bahan dari bambu. Begitupula dengan ilmu-ilmu yang diajarkan masih dalam taraf dasar yaitu tentang materi yang berkaitan dengan masalah pasholatan, ketauhidan, fiqih dan ilmu tafsir[5].

Sepeninggal KH Abdul Manan (1862), kepemimpinan Pesantren Tremas secara estafet diteruskan oleh salah satu putranya yaitu KH Abdullah yang menghabiskan masa kecilnya di Pesantren Tremas dan masa remajanya di Mekah al-Mukaromah untuk menuntut ilmu.

Pada masa kepemimpinan beliau, Pesantren Tremas mulai terkenal di beberapa daerah luar Pacitan. Santri yang belajar di pesantren ini semakin banyak, sehingga kitab-kitab kajiannya juga mulai bertambah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal para santri, dibangunlah sebuah asrama di sebelah selatan jalan, yang pada akhirnya dikenal dengan istilah *"pondok wetan"*.

Meskipun perkembangan pada masa KH Abdullah ini tidak begitu menonjol bila dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya, namun beliau telah berhasil meletakkan landasan sebagai

---

[4] KH Luqman al-Hakim dan Jamaludin al-Ghozi, *Selayang Pandang Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan*, (Tremas: Majlis Ma'arif Press, 2002), hlm. 8.

[5] Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas...*, hlm. 32.

arah pijak bagi kemajuan dan kebesaran nama Pesantren Tremas di kalangan pondok pesantren khususnya, dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya[6].

Hal ini bermula ketika beliau mengirimkan putra pertamanya yang bernama Mahfudz ke Makkah al-mukaromah untuk menuntut ilmu. Di bawah bimbingan Syekh Abu Bakar Syatha, Mahfudz dengan tekun mempelajari ilmu-ilmu agama sampai menjadi ulama besar yang tidak hanya menguasai kitab-kitab yang dikaji tapi juga mampu menyusun berbagai macam kitab sehingga muncullah istilah *"attarmasie"* yang memperoleh tempat tersendiri di kalangan dunia ilmu keislaman[7].

Di samping itu beliau juga diakui sebagai salah seorang mata rantai yang sah dalam pengajaran kitab Shahih Bukhari yang ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu dan diserahkan secara berantai melalui 23 generasi ulama yang telah menguasai Shahih Bukhari dan Syaikh Mahfud merupakan mata rantai yang terakhir[8].

b. Fase kejayaan dan keemasan (1894-1942)

Perkembangan yang telah dicapai oleh Pesantren Tremas di masa kepemimpinan KH Abdullah ikut mewarnai keberhasilan pemimpin berikutnya yaitu putranya KH Dimyati yang merupakan kakak dari Syekh Mahfudz. Kepopuleran dan kemasyuran Pesantren Tremas yang disebabkan oleh kedudukan Syekh Mahfudz sebagai salah satu kyai besar dari

---

[6] *Ibid.,* hlm. 33-35.

[7] Kitab-kitab karangan KH Mahfuzh ada yang dijadikan kajian oleh hampir semua pondok pesantren di Indonesia, bahkan sebagaian juga dijadikan sebagai literatur wajib di salah satu universitas di Mesir, selain digunakan dalam pengajian di Masjid al-Haram. Diantara karya karya terkenalnya antara lain: Manhaj Dzawi al-Nazhar fi Syarhi Alfiyah Ilmu al-Atsar li al-Suyuthy, Mauhibah Dzi al-Fadhli fi Syarh Muqaddimah Bafadhal, Nail al-Ma'mul bi Ghayat al Wushul. Untuk lebih jelasnya baca Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas dan Perkembangannya.*

[8] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang…,* hlm. 91.

Pulau Jawa[9], semakin meningkatkan minat kaum muslimin untuk menyekolahkan anaknya ke Pesantren tremas. Karena jumlah santri yang terus-terusan bertambah akhirnya Pesantren tremas mencapai puncak kejayaan dan keemasan nya.

Fase kejayaan dan keemasan Pesantren Tremas termasuk ditandai dengan adanya perkembangan yang cukup pesat dalam bidang pendidikan, baik secara kelembagaan maupun metode yang digunakan, di samping juga bidang sarana fisik. Bertambahnya jumlah santri hingga hampir mencapai 2000 orang, menimbulkan adanya tuntutan untuk pembangunan asrama-asrama baru. Waktu itu seluruh tanah milik kyai dijadikan sebagai tempat berdirinya asrama-asrama untuk tempat tinggal santri. Tiap asrama dihuni oleh santri yang berasal dari suatu daerah tertentu, sehingga namanya pun masih menggunakan nama daerah asal para santri, seperti Pekalongan, Tegal, daerah asal para santri, seperti Pekalongan, Tegal, Surabaya, Banyuwangi, Ngawi, dan lain sebagainya.

Selain itu juga dibangun beberapa gedung madrasah yang digunakan untuk tempat mengaji. Hal yang cukup mencolok dalam proses pembelajaran di masa kepemimpinan KH Dimyati ini adalah ditunjuknya beberapa santri senior untuk membantu kyai dalam mengajar, dimana hal ini sejak berdirinya Pesantren Tremas, belum pernah dilakukan, karena beberapa kyai sebelumnya menganggap belum ada santri yang cukup pantas diserahi tanggung jawab untuk mengajar.

Seiring dengan kemajuan di bidang metode pembelajaran, kitab-kitab atau materi yang diajarkan juga bertambah, diantaranya adalah kitab *Fathul Mu'in, Ta'lim muta'alim, Ihya Ulumuddin, Shahih*

[9] Lihat *Ibid.,* hlm 37. Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan…, hlm 38. Abdurrahman Mas'ud, "Sejarah dan Budaya Pesantren" *dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*, ed: Ismail SM dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), hlm. 11.

Bukhari, Shahih Muslim, dan *Minhajul qowim.* Adapun mengenai sistem pengajarannya masih seperti periode sebelumnya yaitu *sorogan* dan wetonan.

Pada tahun 1928, atas usulan beberapa santrinya, beliau mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah. Namun demikian sepertinya metode klasikal, yang bisa dibilang baru, karena sebelumnya hanya bersifat non klasikal, kurang diminati oleh para santri. Hal ini terlihat dari jumlah muridnya yang hanya mencapai 30 orang dari keseluruhan santri Pesantren Tremas yang jumlahnya mendekati 2000 orang tersebut, sehingga tidak mengherankan jika usia madrasah ini hanya bertahan beberapa bulan saja[10].

Namun demikian usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan berupa madrasah itu tidak lantas berhenti karena sepeninggal ayahnya, KH Hamid Dimyati mendirikan sebuah Madrasah Salafiyah yang semula hanya diperuntukan bagi anak-anak masyarakat sekitar pesantren. Namun dengan berjalannya waktu akhirnya santri Pesantren Tremas juga mau mengikuti sistem pendidikan madrasah tersebut.

Tahun-tahun pertama dari masa kepemimpinan KH Hamid Dimyati, masih merupakan masa kejayaan dan keemasan Pesantren Tremas, meski apa yang beliau lakukan sifatnya menyempurnakan dari apa yang telah dirintis oleh ayahandanya, yakni KH Dimyati. Diantara upaya penyempurnaan itu adalah:

1) Penambahan kurikulum Madrasah Salafiyah dengan beberapa mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, ilmu bumi, berhitung dan sejarah bumi.
2) Membuka perpustakaan yang bertujuan untuk memenuhi minat baca Santri dan mendukung belajar santri. Di dalamnya terdapat berbagai macam kitab meliputi fiqih, adab, tarikh, hadits,

[10] Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas*.... hlm. 39-41.

dan dilengkapi dengan majalah-majalah baik dari dalam maupun luar negeri seperti majalah Al Fata dan majalah Anshar dari Mesir[11].

c. Fase kemunduran (1942-1952)

Di akhir masa kepemimpinan KH Hamid Dimyati, terjadi kemunduran dalam berbagai hal. Fase kemunduran Pesantren Termas terjadi pada tahun 1942 hingga 1952. Adapun mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran adalah[12]:

1) Datangnya tentara Jepang *(Dai Nippon)* ke Indonesia

Kedatangan tentara Jepang ke pulau Jawa benar-benar telah membuat penderitaan bagi rakyat Indonesia. Mereka telah merampas kekayaan tanah air, memporak-porandakan budaya dan adat istiadat serta membuat rakyat Indonesia merasakan ketidaknyamanan dalam hidup.

Akibat buruk yang timbul karena kedatangan tentara *Dai Nippon* tersebut, berimbas pada kelangsungan proses belajar mengajar yang ada di Pesantren Tremas. Banyak santri maupun pengasuh yang bermukim di pesantren memutuskan untuk pulang ke daerah masing-masing. Hal ini menyebabkan aktivitas pembelajaran di Pesantren Tremas menjadi terhambat, dan sejak saat itulah Pesantren Tremas mengalami masa kemunduran.

2) Terjadinya pemberontakan PKI (Muso) di Madiun

Dalam suasana perjuangan yang begitu memuncak pada tahun 1945, KH Dimyati ikut bergabung dalam keanggotaan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), selain juga terlibat aktif dalam partai politik Islam saat itu yakni Masyumi. Karena kesibukannya dalam kancah perjuangan, sebagai pemimpin partai Masyumi, beliau sering pergi keluar kota Pacitan sehingga jarang sekali berada di pesantren. Kondisi ini

[11] *Ibid.,* hlm. 43-44.
[12] *Ibid.,* hlm. 45-50.

berlangsung sampai terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Sebuah kasus yang lebih dikenal dengan istilah *"affair Madiun"*. Kalangan agamawan menjadi musuh utama dari kaum atheis, sehingga kebanyakan korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut adalah dari kalangan agamawan.

Pesantren Tremas yang terletak di Kabupaten Pacitan, merupakan wilayah karesidenan Madiun dan termasuk salah satu sasaran tentara PKI Muso yang mengganas, membabi buta, dan menghancurkan apa saja yang mereka kehendaki, sehingga keamanan Pesantren Tremas pun termasuk jadi semakin terancam. Akibat dari situasi yang serba tidak menentu itu maka kevakuman kegiatan pembelajaran di Pesantren Tremas terus terjadi.

Bagi Pesantren Tremas, pemberontakan PKI di Madiun itu menyisakan duka yang amat perih karena kyai sebagai pimpinan sekaligus sumber ilmu pengetahuan bagi para santrinya, gugur dalam peristiwa tersebut[13]. Hal ini semakin memperparah keadaan Pesantren Tremas saat itu.

d. Fase Kebangkitan Kembali (1953-Sekarang)

Tokoh-tokoh kebangkitan kembali Pesantren adalah KH Habib Dimyati, KH Haris Dimyati, dan KH Hasyim Ihsan[14]. Ketika beliau ini saling bekerjasama dalam membina Pesantren tremas dari kevakuman nya[15]. Pesantren ini pun perlahan-lahan

---

[13] KH Hamid Dimyathi terbunuh bersama rombongannya saat dalam perjalanan ke Yogyakarta untuk memberi laporan pada pemerintah pusat pada tahun 1948. Lebih jelasnya baca Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas dan Perkembangannya.*

[14] KH Habib Dimyathi dan KH Haris Dimyathi adalah saudara kandung, sementara KH Hasyim Ihsan masih ada hubungan kerabat dengan keluarga Pesantren Tremas.

[15] Di masa kebangkitan kembali ini, ada pemisahan antara lembaga pesantren dan lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah, dibawah satu yayasan, yaitu "Perguruan Islam Pesantren Tremas Pacitan". KH Habib Dimyathi bertindak sebagai Ketua Umum Perguruan Islam Pesantren Tremas yang menangani seluruh kendali lembaga perguruan Islam Pesantren Tremas Pacitan, sementara KH Haris Dimyathi merupkaan Ketua Majlis

kembali ramai dipenuhi para santri hingga sekarang. Oleh karena itu fase ini disebut dengan "Kebangkitan kembali Pesantren Tremas". Adapun yang menandai terjadinya kebangkitan kembali diantaranya adalah:

1) Bidang Pendidikan

Realisasi kebangkitan dalam bidang pendidikan adalah dengan didirikannya beberapa unit pendidikan seperti TK Attarmasie, TPA Attarmasie, dan Madrasah Diniyah yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak masyarakat desa Tremas dan sekitarnya. Begitu juga dengan didirikannya Madrasah Tsanawiyah bagi santri putra dan putri, dan Madrasah Aliyah bagi santri putra dan putri.

Selain itu juga adanya pengadaan kembali pengajian-pengajian kitab secara wetonan dan *sorogan* yang sempat terhenti sebelumnya. Selain itu diadakannya kegiatan tambahan seperti *takhassus* (pendalaman materi), *bahsul masail*, *takrar* dan pengajian kitab selama bulan ramadhan. Pada tahun 1992 mulai diadakan penataran untuk calon guru TK/ TPA setiap 2 tahun sekali dan pengadaan kursus bahasa Inggris yang difokuskan pada *speaking oriented* dan penguasaan *grammar*.

2) Bidang sarana dan prasarana

Pada masa kebangkitan kembali ini, jumlah asrama santri yang direnovasi dan dibangun ada 15 buah, 12 asrama putra dan 3 asrama putri. Adapun gedung sekolah yang berhasil direhabilitasi dan dibangun ada 4 buah gedung yaitu gedung Madrasah Timur, Madrasah Baru, Madrasah Super, dan gedung untuk TK. Selain itu juga pembangunan gedung lainnya adalah gedung perpustakaan, gedung pertemuan (aula), sanggar pramuka, balai pengobatan, keterampilan, tempat penggilingan padi, ruang tamu, mushola, serta

---

Ma'arif yang menangani masalah lembaga pendidikan sedangkan KH Hasyim Ihsan menangani bidang sosial kemasyarakatan. Wawancara dengan KH Fuad Habib pada tanggal 17 Januari, 2003.

gedung untuk fasilitas penerangan (lampu dan diesel).

3) Bidang organisasi

Diadakannya kegiatan organisasi untuk menunjang keterampilan santri dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi yang didirikan tersebut berupa organisasi pesantren dan organisasi daerah. Macam-macam organisasi pesantren yang didirikan adalah PHBI, Dzibaiyah wa al-Khithabiyah, perpustakaan, tazayyun, pramuka, muhadlarah, olahraga, kesenian, Fata al-muntdzar, dan jam'iyyatul qurra wa al-huffazh.

Setelah KH Habib Dimyati wafat pada tahun 1997, kepemimpinan diserahkan kepada salah satu putra yang telah beliau persiapkan sebelumnya yaitu KH Fuad Habib (Gus Fuad). Begitu juga dengan KH Haris Dimyati dan KH Hasyim Ihsan yang setelah kewafatannya diganti oleh salah satu dari putra beliau, yaitu KH Luqman al-Hakim dan KH Mahrus Hasyim[16].

Sepeninggal ayahandanya, KH Fuad dan KH Lukman yang masih relatif muda meneruskan perjuangan ayahanda mereka. Dengan berbekal semangat dan keberanian untuk berjuang dijalan Allah, mereka melestarikan prinsip *al-Muhafadzah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-Ashlah*. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pembenahan sarana fisik pesantren, salah satunya yaitu renovasi Masjid Pesantren Tremas[17] yang

---

[16] Sebagaimana model kepemimpinan sebelumnya ketiga kiai ini bekerjasama dalam membangun Pesantren Tremas. KH Fuad Habib sebagai Ketua Umum Perguruan Islam Pesantren Tremas yang menangani seluruh kendali lembaga pesantren, KH Luqman Haris sebagai ketua Majlis Ma'arif yang menangani seluruh lembaga Pendidikan, dan KH Mahrus Hasyim yang menangani bidang sosial kemasyarakatan.

[17] Sebagimana yang diwasiatkan oleh KH Habib Dimyathi kepada putra-putrinya agar seteleh kewafatan beliau dilakukan renovasi masjid supaya semua kegiatan pembelajaran bisa terlaksana di dalam masjid. Hal ini merupakan salah satu upaya menghadirkan kembali fungsi masjid seperti di zaman Rasulullah yaitu sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren pada tanggal 4 Pebruari di Tremas

diperkirakan akan menelan biaya sekitar 3 miliar. Masjid ini direncanakan terdiri dari dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang, antara lain ruang utama, ruang sekretariat pesantren, perpustakaan, bahsul masail, tahfizh al-Qur'an, dan ruang pengajian. Pembenahan sarana fisik lainnya adalah renovasi Madrasah Timur (depan masjid), penambahan asrama putri, pavingisasi, dan sanitasi pembuangan limbah di lingkungan pesantren[18].

Adapun dalam bidang pendidikan, pada masa kepemimpinan ini didirikan madrasah "Tahfizh al-Qur'an" bagi santri putra dan putri yang dipimpin langsung oleh Ustadz Jawwad Habib yang menyelesaikan pendidikan al-Qur'an nya di Pesantren Bustan 'Usysyaq al-Qur'an (BUQ) di bawah bimbingan KH Harir Muhammad bin Muhammad MahfuzH Attarmasie[19]. Selain itu juga dilakukannya pembenahan kurikulum yaitu dengan meniadakan sebagian pelajaran umum seperti IPS dan pendidikan keterampilan dengan penambahan ilmu-ilmu keagamaan. Menurut Kyai Lukman, hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu, pelajaran umum yang masih dipertahankan adalah bahasa inggris, bahasa Indonesia, PPKn, dan matematika. Adapun mengenai pendidikan keterampilan dilakukan secara ekstrakurikuler di luar jam sekolah[20].

Dalam rangka meningkatkan kualitas santri, pada masa kepemimpinan KH Fuad dan KH Lukman ini dilakukan pengembangan dalam mengadakan seminar, sarasehan, maupun pelatihan-pelatihan seperti, pelatihan komputer, manajemen perpustakaan dan organisasi, jurnalistik, kepemimpinan, pendidikan Islam kontemporer, diskusi dan ceramah ilmiah serta

---

[18] KH Luqman al-Hakim dan Jamaludin al-Ghozi, *Selayang Pandang Perguruan...*, hlm. 12.

[19] Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas...*, hlm. 72.

[20] Wawancara dengan KH Luqman Haris pada tanggal 14 Januari 2003.

kegiatan lain yang sifatnya pengayaan terhadap pengetahuan santri dengan menghadirkan narasumber dari luar. Hal ini berkaitan dengan prioritas utama Pesantren Tremas guna mewujudkan motto utama Perguruan Islam Pesantren Tremas yaitu "mencetak Insan benar yang pintar"[21].

2. Sistem pendidikan dan pengajaran

Pesantren Tremas sebagai lembaga pendidikan Islam, mengelola masalah pendidikannya dengan memadukan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern. Adapun sistem pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan di Pesantren Tremas meliputi:[22]

a. Sistem tradisional

Sistem pendidikan tradisional yang dianut oleh Pesantren Tremas adalah penerapan metode *sorogan* dan wetonan atau *bandongan* dalam proses belajar mengajar. Penerapan beberapa metode tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mempelajari, memahami dan mendalami kitab-kitab klasik karya ulama abad pertengahan yang meliputi materi tentang ilmu fiqih, ilmu kalam, dan juga tasawuf. Di kalangan Pesantren Tremas hal ini biasa dikenal dengan istilah pengajian kitab kuning.

Pengajian kitab kuning ini dilaksanakan di masjid, madrasah, gedung pertemuan, atau asrama tempat santri bermukim. Pelaksanaan pengajian ini diadakan sesuai dengan situasi dan kondisi pondok pesantren. Dengan kata lain, jadwal pengajian diatur dan diusahakan supaya tidak tumpang tindih dengan kegiatan belajar mengajar di madrasah sesuai dengan jenjang yang diikuti.

b. Sistem Modern

---

[21] KH Luqman dan Jamaludin al-Ghozi, *Selayang Pandang Perguruan...*, hlm. 13.

[22] Wawancara dengan Pimpinan Pesantren, Ketua Majlis Ma'arif dan beberapa pengasuh pesantren pada tanggal 18 Januari 2003.

Disamping pengajian dengan sistem *halaqah* yang menerapkan metode *sorogan* dan wetonan atau *bandongan*, maka dalam perkembangannya Pesantren Tremas melakukan sebuah inovasi dalam pengembangan sistem pendidikan dan pengajarannya, yaitu dengan menerapkan sistem persekolahan.[23] Adapun sistem persekolahan yang dikembangkan adalah sistem madrasi yang titik tekannya pada pengkajian ilmu keagamaan sebagai bekal hidup santri dalam bermasyarakat.

c. Sistem Keterampilan

Pendidikan dan pengajaran yang berbentuk keterampilan dilaksanakan sesuai dengan tujuan sebagai penunjang pendidikan dan yang dilaksanakan di sekolah. Pendidikan keterampilan ini ditekankan sebagai upaya pengembangan kemampuan praktis guna tercapainya santri yang alim terhadap ilmu keagamaan dan memiliki kemandirian, karena pada akhirnya nanti santri diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Adapun pendidikan keterampilan yang dilaksanakan di Pesantren Tremas meliputi: pendidikan bahasa asing (Arab dan Inggris), pendidikan komputer, kaligrafi, fotografi, dan percetakan serta pendidikan keputrian seperti tata boga dan tata busana.

---

[23] Unit pendidikan yang diadakan adalah madrasah Tahfizh al-Qur'an, TK Attarmasie, TPA Attarmasie, Diniyah Salafiyah, Salafiyah Tingkat Isti'dad (jenjang pendidikan yang dikhususkan bagi santri yang berpenidikan SD/MI dan dipersiapkan guna memasuki jenjang Tsanawiyah kelas 1), Salafiyah Tingkat Mumtaz (jenjang pendidikan yang dikhususkan bagi santri yang berpendidikan akhir SLTP/SMU/MA dan dipersiapkan guna memasuki jenjang Tsanawiyah kelas II), Salafiyah Tingkat Tsanawiyah, Salafiyah Tingkat Aliyah. Wawancara dengan Ketua Majlis Ma'arif, pada tanggal 4 Pebruari, 2003 di Tremas.

B. Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Pesantren Tremas

Sebagaimana dipaparkan di muka, dalam rangka memperoleh gambaran tentang proses pemberdayaan perempuan di sebuah pesantren, terlebih dahulu perlu ditelusuri bagaimana sesungguhnya pandangan mereka mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, baik berupa status maupun perannya dalam kehidupan serta bagaimana mereka mensosialisasikan pandangan-pandangan tersebut.

1. Perspektif Pesantren Tremas Mengenai Perempuan

Prinsip universal ajaran Islam sebagaimana disebut di muka, merupakan refleksi kritis terhadap persoalan-persoalan keagamaan Islam yang fundamental. Islam memandang manusia, laki-laki dan perempuan sebagai makhluk komplementer. Pada saat yang sama Islam juga melihat keduanya sejajar, sama-sama memiliki jiwa abadi secara fundamental, karenanya memiliki peluang memperoleh kebahagiaan akhirat setelah kematian, atau dihukum dalam neraka jika melanggar kehendak Allah. Peribadatan Islam sama untuk laki-laki dan perempuan kecuali ketika perempuan mengalami siklus menstruasi di mana mereka tidak diizinkan untuk salat, puasa, ataupun menunaikan ibadah haji. [24] Jiwa keabadian, janji dan hukuman setelah mati, serta peluang tertinggi kemanusiaan, semuanya sama bagi laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin memberi perbedaan dalam fungsi sosial eksternal yang Islam lebih melihatnya sebagai suatu komplementari ketimbang kesejajaran kuantitatif.

Namun demikian perlu kiranya dijelaskan beberapa hal fundamental yang masih mengundang kontroversi dalam khazanah pemikiran keislaman. Isu fundamental tersebut adalah:

a. Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan

Berkenaan dengan masalah penciptaan perempuan, Kyai Fuad Habib selaku pimpinan pesantren menganjurkan untuk melihat apa yang

[24] Sayyed Hussein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern, Bimbingan Untuk Kaum Muda Muslim*, terj Hast Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 44.

tertulis dalam al-Qur'an.[25] Ketika ada beberapa penafsiran yang seolah-olah merendahkan martabat dan kedudukan perempuan, beliau tidak sependapat karena menurut beliau pada dasarnya Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Dalil al-Qur'an yang menegaskan kesejajaran laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama berhak mendapatkan pahala dari setiap amal perbuatannya. Ketika ada penafsiran yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam maka penafsiran itu harus diluruskan.

Begitu juga dengan Kyai Lukman, selaku pimpinan Majlis Ma'arif, beliau mengatakan bahwa masalah penciptaan perempuan merupakan masalah yang sudah jelas ketentuannya dalam al-Qur'an. Ketika ada sebagian orang yang menggunakan teks-teks keagamaan (dalam hal ini adalah ayat tentang penciptaan perempuan) untuk melegitimasi anggapan yang merendahkan martabat perempuan maka hal itu tidak dibenarkan. Menurutnya, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki maka laki-laki berkewajiban untuk menjaganya dan tidak berarti menganggap rendah perempuan. Tidak ada alasan untuk menuduh Islam sebagai agama yang merendahkan martabat perempuan.[26]

Adapun mengenai masalah kepemimpinan perempuan, pimpinan pesantren mengatakan bahwa secara prinsip kepemimpinan tetap berada pada laki-laki. Berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa: 24, beliau memandang bahwa perempuan saat ini belum pantas untuk menjadi pemimpin, begitu juga berdasarkan hadis nabi yang artinya: " tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan". Menurutnya, untuk menjadi pemimpin yang baik

---

[25] Dalam menafsirkan surat an-Niṣa' I beliau mengutip pendapat az-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *"nafs wahidah"* adalah Adam dan *Zaujaha* adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam. Wawancara dengan Kiai Fuad selaku pimpinan pesantren pada tanggal 16 Januari 2003 di Tremas.

[26] Wawancara dengan Kiai Luqman pada tanggal 14 Januari 2003 di Tremas.

sangat sulit bagi perempuan karena adanya beberapa keterbatasan, antara lain akal, fisik, dan psikologis.[27]

Agak berseberangan dengan pimpinan pesantren, Kyai Lukman berpendapat bahwa dalam masalah kepemimpinan posisi perempuan sama dengan laki-laki. Salah seorang Ustadzah menambahkan bahwa ayat *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin formal. Menurutnya, kata *qawwamuna* dalam ayat tersebut diartikan sebagai pemimpin dalam konteks sebuah rumah tangga, dimana laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah sehingga bisa melindungi dan mengayomi perempuan.[28]

Begitu pula dengan salah seorang santri putra yang menyatakan bahwa dalam hal kepemimpinan perempuan, selayaknya kita menelusuri sejarah para pemimpin perempuan dalam Islam. Kepemimpinan Ratu Bilqis misalnya, kisah kepemimpinannya tercantum dalam al-Qur'an. Selain itu kepiawaian aisyah dalam meriwayatkan hadis serta kepemimpinannya dalam perang Jamal di masa khalifah Ali. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.[29]

Secara umum para ustadz menyatakan kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin. Salah seorang ustadz menambahkan, mereka yang menganggap bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak sah, dilatari oleh pemahaman yang berasal dari salah satu hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang dianggap kurang dari segi agama dan akalnya. Padahal saat ini asumsi ulama yang menandaskan bahwa laki-laki lebih kuat dalam keilmuan dan kecerdasan akalnya menjadi

---

[27] Wawancara dengan Kiai Fuad pada tanggal 16 Januari 2003 di Tremas.

[28] Wawancara dengan Kiai Lukman dan Nyai Ummu Aiman pada tanggal 15 Januari 2003, di Tremas

[29] Wawancara dengan santri putra pada tanggal 18 Januari 2003, di Tremas.

terbantahkan karena sejarah membuktikan banyak perempuan yang mampu tampil sebagai pemimpin dalam wilayah publik, seperti di Indonesia sendiri misalnya, dipimpin oleh seorang presiden perempuan, terlepas dari konstitusional atau tidak konstitusional.[30]

Sementara para ustadzah sendiri berpendapat bahwa sekalipun perempuan dilahirkan sama dengan laki-laki dalam statusnya sebagai hamba, tapi perempuan mempunyai keterbatasan fisik yang berpengaruh terhadap kemampuan akal maupun kekuatannya. Sehingga menjadi wajar ketika dalam beberapa hal perempuan tidak mampu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki, karenanya menjadi wajar pula bila dalam beberapa hal perempuan tertinggal dari laki-laki. Sedangkan mengenai masalah kepemimpinan perempuan diperbolehkan asal memiliki kemampuan yang cukup dan tidak melalaikan tugas-tugas dalam rumah tangganya.[31]

b. Kewarisan dan Aurat Perempuan

Dalam masalah warisan, baik kyai, ustadz, ustadzah, santri putra, dan santri putri, sepakat bahwa perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki, perempuan juga berhak mewarisi harta peninggalan si mayit, sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an[32].

Adapun mengenai ayat yang secara rinci menjelaskan bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan[33], menurut mereka adalah tidak mungkin untuk merubah ketentuan hukum yang tertera dalam al-Qur'an. Sebagai seorang muslim mereka percaya bahwa segala yang ditentukan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan menurut mereka diantara hikmah yang melandasi ketentuan

---

[30] Wawancara dengan para pengasuh pesantren putra pada tanggal 16 Januari 2003, di Tremas.

[31] Wawancara dengan pengasuh pesantren putri serta santri putri pada tanggal 18 Januari 2003, di Tremas.

[32] Q.s. an-Nisa: 7.

[33] Q.s. an-Nisa: 11.

bagian tersebut adalah bahwa kewajiban anak laki-laki lebih berat daripada anak perempuan, yaitu kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah pada istri dan anaknya. Sedangkan anak perempuan bila Ia menikah ia berhak atas mahar dan nafkah dari suaminya. Atau dengan ungkapan lain, laki-laki mendapat dua bagian tetapi kotor, sementara perempuan mendapat 1 bagian tetapi bersih.

Namun demikian, kyai menambahkan dalam masalah waris, banyak diantara umat Islam yang melakukan *Wasyiyyah Wajibah*, yaitu mewarisi sebelum meninggal dengan pembagian yang sama, kemudian sisanya diwariskan secara Islam. Seorang Ustadz pun menambahkan bahwa ketentuan waris yang telah digariskan oleh al-Qur'an, menurutnya bukanlah sebuah bentuk ketidakadilan. Kalaupun ingin pembagian yang lebih rata, dapat menggunakan cara hibah sebelum meninggal, bukan dengan mengubah ketentuan hukumnya. Ia mengakui bahwa fiqih sebagai produk hukum memang kadang-kadang bersifat kaku dan sering tidak sesuai dengan nurani, apa yang telah digariskan oleh al-Qur'an tidak bisa diubah sekehendak hati manusia, meskipun dengan alasan tuntutan perkembangan zaman sekalipun.

Masalah aurat, Kyai Lukman menegaskan bahwa pemakaian model jilbab cenderung disesuaikan dengan budaya setempat. Yang penting adalah menjaga kehormatan perempuan dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak mesti harus memakai jubah atau cadar karena budaya di Indonesia kurang mendukung hal tersebut. Apalagi jika mengingat perkembangan zaman, maka sebetulnya pemakaian celana panjang pun diperbolehkan demi menjaga keamanan dari tersingkapnya kain rok bila tertiup angin.

Hanya saja sepertinya hal ini belum diterapkan dalam keseharian santri putri, sebagaimana terlihat dari tata tertib yang ada. Menanggapi masalah ini para ustadzah berpendapat bahwa untuk masalah tata

tertib kita memang cenderung menerapkan apa yang telah ditetapkan sejak dulu, yaitu santri perempuan harus memakai busana muslim yang tidak menyerupai laki-laki. Meskipun kondisi saat ini memungkinkan perempuan untuk memakai celana panjang yang notabene merupakan model pakaian laki-laki. Tapi apa yang sudah ditentukan dalam tata tertib tidak mungkin dihapus, bila perlu akan membuat lagi peraturan-peraturan baru sesuai dengan tingkat "kenakalan" santri.

Begitu juga dengan pimpinan pesantren, mengatakan bahwa masalah aurat perempuan yang berkaitan dengan pemakaian jilbab dapat disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Sebab yang terpenting adalah penjagaan terhadap kehormatan diri. Seorang ustadz menambahkan, mengenai masalah aurat, pemakaian jilbab atau kerudung memiliki banyak makna dan maksudnya pada masa sebelum Islam dan masa nabi, pemakaian jilbab diantaranya digunakan untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan sahaya. Pemakaian kerudung atau bahkan cadar juga merupakan simbol status perempuan kelas atas di masyarakat Arab termasuk di antaranya adalah Mesir sebelum masa modern, dan hal ini berlaku bukan hanya dikalangan umat Islam, melainkan juga di kalangan umat Yahudi dan Nasrani.

Di Indonesia sendiri, beliau menambahkan bahwa pemakaian kerudung yang mulai marak sejak awal tahun 1980-an merupakan simbol keinsafan seseorang dan sebagai kesiapan untuk menjalankan kewajiban agama. pemakai kerudung dianggap sebagai perempuan "baik" meski ada juga yang perilakunya kontradiktif dengan citra pemakaian kerudung itu sendiri. Dan diakhir tahun 1990-an kerudung sudah merupakan mode bagi Muslimah Indonesia sehingga mayoritas perempuan muslim baik yang tinggal di desa maupun yang hidup di kota, memakai kerudung, tentunya dengan berbagai makna dan maksud.

Dalam menanggapi masalah gerakan dejilbabisasi, salah seorang ustadzah yang alumni IAIN Sunan Kalijaga ini berpendapat bahwa jilbab merupakan persoalan budaya, sementara yang esensi dari ajaran Islam bukan pemakaian jilbabnya melainkan penjagaan terhadap kehormatan diri perempuan. Menjaga kehormatan diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengenakan jilbab. Berjilbab tidak ada baiknya jika kehormatan diri perempuan tidak dijaga. Beliau mengutip pendapat Asghar Ali Engineer yang menegaskan bahwa menjaga kehormatan merupakan norma, sementara memakai kerudung adalah sarana kontekstual untuk mencapai tujuan penjagaan kehormatan.

Adapun mengenai tanggapan dari para santri, mereka cenderung sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh ustadzahnya ini, hal ini dapat dilihat dari kebanyakan santri putri yang cenderung fleksibel dalam masalah pemakaian kerudung jika berada di luar pesantren. ketika mereka di rumah misalnya.

c. *Ijbar* dan Poligami

Dalam menanggapi masalah *ijbar*, pimpinan pesantren berujar bahwa pada dasarnya sebagian ulama tidak menganggap hak *ijbar* sebagai bentuk pemaksaan terhadap perempuan karena *ijbar* lebih diartikan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya, yang dianggap belum punya pengalaman cukup untuk memilih pasangan hidupnya. Namun demikian bukan berarti seorang ayah bisa memaksakan kehendaknya terhadap anak perempuannya, karena harus ada persetujuan terlebih dulu dari anak perempuannya. Bahkan dalam sebuah literatur hadis, salah seorang ustadzah menambahkan, Rasulullah sangat menghargai hak putrinya untuk memilih jodoh yang ia sukai.

Kyai Lukman mengungkapkan hal senada, Begitu juga dengan para ustadz lainnya. Adapun mengenai masalah poligami, pimpinan Majlis Ma'arif ini

berpendapat pembolehan poligami saat ini masih menjadi perdebatan. Secara pribadi beliau mengatakan bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Meskipun demikian beliau tidak menyalahkan mereka yang beristri lebih dari satu karena hal ini tergantung pada pemahaman setiap muslim terhadap ayat poligami tersebut.

Begitu juga dengan Kiai Fuad, beliau menegaskan bahwa sekalipun Islam memperbolehkan poligami tapi dengan catatan yang sangat berat sehingga hampir mustahil untuk memenuhinya. Selain itu juga jika dilihat dari asbabun nuzulnya ayat poligami ini, menunjukkan bahwa saat itu kondisi umat Islam sangat parah akibat terjadinya peperangan. Banyak laki-laki yang menjadi syuhada sehingga jumlah janda dan anak yatim pun meningkat. Dengan demikian berarti bahwa poligami diperbolehkan tapi hanya dalam keadaan darurat. Sebagaimana adik sepupunya, Kyai Fuad juga tidak mengecam tindakan poligami yang banyak dipraktekkan oleh beberapa kyai, beliau tidak mempermasalahkan hal ini karena menurutnya mereka yang melakukan poligami juga punya alasan tersendiri dan sebaliknya beliau juga punya alasan mengapa tidak melakukan poligami.

Salah seorang Ustadz menolak poligami bila semata-mata dilakukan untuk kepentingan biologis. Banyak pihak yang mencurigai praktek poligami saat ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan biologis. Jika benar adanya berarti hal ini tidak sebagaimana poligami yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ia mengungkapkan kaidah fiqih yang artinya: "Setiap ketentuan (hukum) selalu berkait dengan kausannya, baik ada dan tiadanya". Ketika illatnya tidak ada, maka poligami tidak diperbolehkan, tandasnya.

Sepertinya para ustadzah dan santri putri dalam hal ini mengikuti pandangan kyainya dan juga meneladani apa yang dicontohkan oleh keluarga kyainya. Hingga penelitian ini dilakukan dalam

sejarahnya, kyai Pesantren Tremas sejak berdirinya hingga saat ini belum ada yang melakukan poligami.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pesantren yang berciri tradisional mempunyai gaya berpikir kaku, sempit, dan tekstual, melainkan dalam beberapa hal sudah cukup kontekstual, meski masih ada nilai-nilai yang bias gender. Hal ini menjadi sangat wajar karena memang wacana tentang kesetaraan ataupun keadilan gender belum masuk ke sana, sehingga kaum perempuannya pun tidak ada yang merasa dirugikan karena pemahaman-pemahaman tersebut.

Namun setidaknya ketika dalam pemahaman mereka masih terdapat pengakuan ataupun penghargaan terhadap hak-hak perempuan seperti hak reproduksi, waris, Pendidikan, dan kesejahteraan yang merupakan hal mendasar yang harus diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan, berarti mereka juga ikut mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Sebab, pengabaian terhadap hak-hak tersebut berarti penindasan yang berkepanjangan terhadap kehidupan perempuan.

2. Perspektif Pesantren Tremas Mengenai Perempuan Ideal

Perempuan ideal dalam perspektif Pesantren Tremas tertuang dalam norma-norma ajaran Islam yang diajarkan di pesantren. Dalam rangka mensosialisasikan pandangan tentang perempuan ideal, kitab-kitab kuning karangan ulama abad pertengahan yang hingga saat ini masih diajarkan. Kitab yang diajarkan di antaranya adalah *al-Akhlak li al-banat*[34], *uqud al-hujjain*[35], dan beberapa kitab fiqih yang membahas permasalahan seputar hak dan kewajiban perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

---

[34] Hingga penelitian ini dilakukan, kitab *al-Akhlaq li al-Banat* dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran di tingkat Tsanawiyah.

[35] Kitab ini bukan merupakan pelajaran wajib yang masuk dalam kurikulum madrasah, tapi hanya diajarkan selama bulan Ramadhan, namun demikian berdasarkan pengamatan peneliti nampaknya isi dari kitab ini sudah demikian terintemalisasi dalam kehidupan kalangan pesantren Tremas.

a. **Kewajiban Perempuan Terhadap Agamanya**

Mengenai kewajiban perempuan terhadap agamanya, pimpinan pesantren mengatakan bahwa perempuan berkewajiban untuk membuktikan ketinggian Islam di atas nilai, ideologi, ataupun tatanan kehidupan lainnya. Hal yang utama adalah bahwa perempuan harus berakhlak mulia, karena tinggi rendahnya suatu bangsa adalah dinilai dari akhlaknya. Beliau menambahkan sebuah pepatah Arab yang menyebutkan " sesungguhnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya, jika akhlaknya mulia maka jayalah bangsa itu. Sebaliknya, jika akhlaknya rusak maka hancurlah bangsa itu". Oleh karena itu salah satu kewajiban perempuan terhadap Islam adalah berakhlak mulia. Adapun mengenai kriteria akhlak mulia ini sebagaimana terdapat dalam kitab *al-akhlaq li al-banat* diantaranya adalah menghormati orang tua, mengasihi yang lebih muda, dan lain sebagainya.

Ibu Nyai menambahkan, sebagai pengasuh pesantren beliau merasa berkewajiban untuk membekali santrinya dengan ilmu tauhid dan *al-Akhlak al-Karimah*. Menurut beliau jika bekal ilmu tauhid dan *akhlak al-karimah* nya cukup memadai maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya akan menjadi baik. Kyai Lukman menambahkan bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban terhadap agamanya, perempuan harus berilmu tinggi karena dengan ilmunya perempuan dapat melestarikan ajaran Islam. Oleh karena itu dalam hal menuntut ilmu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi perempuan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian maka pendidikan agama bagi perempuan adalah hal yang niscaya, karena melalui pendidikan, seorang ibu dapat melahirkan generasi-generasi penerus ajaran Islam.

Nampaknya dalam masalah pendidikan kaum perempuan, Pesantren Tremas sepakat bahwa pendidikan kaum perempuan adalah hal yang penting

karena kelak sebagai ibu mereka akan sangat berperan bagi pendidikan anak-anaknya. Mereka ungkapkan bahwa ibu itu laksana madrasah bagi putra-putrinya. Lahirnya generasi *rabbani* yang mumpuni untuk memikul risalah Islamiyah hingga puncak kejayaannya, sangat ditentukan oleh sang ibu.

b. Kewajiban Perempuan Terhadap Keluarganya

Sebagai pimpinan pesantren, Kyai Fuad mengatakan bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menjaga urusan rumah tangganya. Beliau mengungkapkan sebuah hadis yang artinya: "Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Lelaki adalah sebagai pemimpin keluarga, sementara perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga".

Dalam kaitannya dengan keluarga, seorang perempuan memiliki peran yang utama. Dia harus pandai mengatur suasana rumah yang baik, nyaman, dan tentram. Selain itu dia juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang makanan yang sehat dan bergizi supaya kelak putra-putrinya menjadi orang yang cerdas. Dia berperan penting dalam pembentukan generasi yang saleh dan salehah.

Sementara Kyai Lukman menambahkan bahwa memposisikan perempuan dalam peran-peran yang bersifat domestik tidak berarti menganggap rendah atau menomorduakan perempuan, karena pada dasarnya peran perempuan dalam sebuah keluarga sangatlah mulia. Kalau ada praktek-praktek yang mendiskreditkan perempuan maka itu harus diluruskan. Mengenai falsafah Jawa yang mengatakan bahwa perempuan sebagai *konco wingking,* yang dianggap menempatkan perempuan selalu di belakang suami, masih perlu ditelaah lagi, karena bagi beliau, istri selain sebagai pendamping suami juga merupakan pemacu semangat dalam hidup. Ketika seorang suami berhasil maka hal itu tidak lepas dari peran sang istri sebagai pendukungnya

Mengenai isi kitab *Uqud al-Lujjain*, pimpinan pondok berpendapat bahwa sebenarnya isi kitab tersebut tidak berat sebelah atau merendahkan perempuan, jika masyarakat tahu posisi masing-masing dan paham akan hak dan kewajibannya. Seperti hadis yang artinya "Sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan", begitu pula dengan anjuran kitab-kitab fiqih karangan ulama terdahulu. Menurutnya, bila seseorang melakukan kewajiban maka akan timbul hak bagi dirinya. Bila seseorang berbuat baik, maka orang lain pasti akan membalasnya dengan kebaikan pula.

Pimpinan majelis Ma'arif juga mengungkapkan bahwa kitab Uqud al-Lujjain yang menjelaskan masalah hak dan kewajiban suami istri, merupakan kitab yang cukup menarik minat para santri untuk mempelajarinya. Meskipun kitab ini lebih banyak mengupas tentang kewajiban seorang istri, tapi jika dibandingkan dengan kitab fiqih yang lain seperti *Fathul Mu'in* misalnya, kewajiban suami lebih berat. Menurutnya, kewenangan suami yang berderet dalam *'Uqud al-Lujjain* baru dapat dipenuhi apabila ia telah melakukan kewajibannya. Dengan pemahaman seperti itu, di samping santri makin mengerti hak dan kewajiban suami istri, mereka juga semakin merasa bahwa banyak hal yang harus dikaji dari fiqih, dan bahkan dapat mencari suara atau pendapat lain dari fiqih.

Mengenai pembagian peran dalam rumah tangga, seorang ustadzah mengatakan bahwa idealnya laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Namun ketika saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja diluar rumahnya, maka hal ini tidaklah dilarang dengan catatan perempuan tidak boleh mengabaikan perannya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan rumah tangga dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, menurut salah seorang ustadz, laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, memelihara istri serta anak-anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab terhadap urusan urusan domestik adalah hal yang wajar.

Bahkan salah seorang Ustadzah yang menambahkan bahwa dengan adanya pembagian kerja seperti itu, sesungguhnya Islam sangat menghormati dan memuliakan perempuan. Dan kalau ada tuntutan dari perempuan untuk bekerja diluar rumahnya, maka sebetulnya hal ini hanyalah menyebabkan perempuan memiliki tugas lebih berat yaitu tugas di dalam rumah dan tugas di luar rumahnya.

Sementara ibu nyai menambahkan, bila ada perempuan yang ingin bekerja atau aktif di luar rumah, hal itu tidaklah menjadi masalah selama ia tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan tidak menelantarkan pendidikan anak-anaknya.

Dalam masalah hak untuk memperoleh pendidikan, laki-laki dan perempuan adalah sama, meskipun ada perbedaan dalam pembagian kerja. Namun salah seorang saudagar menambahkan apabila ada masalah dengan keadaan ekonomi keluarga maka menyekolahkan anak laki-laki terlebih dulu dianggap sebagai hal yang wajar. alasannya karena laki-laki berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan kelak menjadi tanggung jawab suaminya.

Ustadzah yang lain menambahkan, Pesantren Tremas sampai saat ini ingin menegakkan kemuliaan perempuan sebagai penyiap generasi penerus yang baik. Perempuan identik dengan kasih sayang, suatu sumber daya yang bukan main pentingnya bagi keharmonisan sebuah rumah tangga yang pada gilirannya berperan besar dalam membentuk kepribadian yang mulia bagi anak-anaknya. Islam sendiri mengajarkan bahwa pendidikan anak harus

dimulai sejak dalam kandungan, sebagaimana dicontohkan oleh istri Imron a.s. yang telah melahirkan bayi perempuan istimewa yaitu Maryam. Istri Imron telah mengucapkan doa bagi anaknya sejak masih berada dalam kandungan. Penemuan ilmiah pun membenarkan hal ini.

Begitu juga dengan pendapat santri putra dan putri, mereka menganggap bahwa peran perempuan di luar rumah diperbolehkan dalam Islam meski dengan catatan yaitu perempuan harus tetap bertanggung jawab dengan permasalahan rumah tangganya terutama pendidikan anak-anaknya. Sebetulnya dengan menempatkan perempuan di dalam rumah, sementara laki-laki keluar untuk mencari nafkah, itu merupakan hal terbaik yang diberikan oleh Islam kepada kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ruang gerak perempuan masih sangat terbatas. Hak-hak primernya seperti sandang, pangan, dan papan dijamin penuh oleh suaminya.

c. Kewajiban Perempuan Terhadap Masyarakatnya

Sebagai anggota masyarakat, perempuan berkewajiban untuk ikut ber*amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu perempuan harus memiliki pengetahuan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian perempuan juga harus pandai mengatur waktu sehingga perannya di masyarakat tidak mengganggu apalagi mengabaikan perannya di dalam rumah tangga.

Kyai Lukman menambahkan, perempuan sebagai makhluk sosial hendaknya dapat bergaul dengan masyarakatnya, membantu yang lemah serta mengajari mereka yang belum paham tentang masalah keagamaan. Ibu Nyai menambahkan, perempuan juga boleh mengembangkan karirnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti aktif dalam organisasi masyarakat, menjadi guru, berdagang, ataupun kegiatan lainnya dengan catatan tidak boleh melalaikan tugasnya dalam rumah tangga,

diantaranya adalah pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anaknya.

Dari jawaban ustadz, ustadzah, maupun santri putra dan putri dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebagai makhluk sosial, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk aktif dalam urusan-urusan publik, meskipun dengan catatan harus tetap memegang teguh citra wanita shalihah. Hal ini bisa dilihat dari apa yang mereka praktikkan dalam keseharian yaitu dengan melibatkan ustadzah ataupun santri putri dalam masalah ke organisasian sehingga perempuan dilatih untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapatnya.

Dari uraian yang disampaikan oleh kalangan Pesantren Tremas, nampaknya memang batasan-batasan perempuan ideal mengacu pada materi berupa kitab yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Dari pandangan mereka dapat disimpulkan bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang beriman, berakhlak mulia, berpendidikan, dan beramal saleh dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

3. Perspektif Pesantren Tremas Mengenai Upaya Pemberdayaan Perempuan

Dalam masalah pemberdayaan perempuan, kyai menganjurkan untuk melihat kehidupan sosial pada masa nabi, dimana perempuan telah menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Tradisi masyarakat jahiliyah dibongkar habis-habisan oleh Islam dengan jalan pemberian hak terhadap perempuan, yang pada masa sebelumnya hak itu tidak diberikan. Jika pada masa jahiliyah perempuan tidak dapat mewarisi misalnya, maka Islam memberikan nya meski masih sebatas 1 banding 2. Lalu jika pada masa jahiliyah mereka merasa malu jika punya anak perempuan, dan maka Islam justru membenci tradisi tersebut dan bahkan menjanjikan pahala bagi mereka yang memperlakukan anak perempuan dengan baik, sebagaimana mereka memperlakukan anak laki-laki.

Pimpinan Pesantren mengatakan bahwa dalam rangka memberdayakan santri putrinya, Pesantren melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperdalam pengetahuan keagamaan mereka. Adapun mengenai penambahan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren sepertinya saat ini masih sangat terbatas. Hal ini berangkat dari prinsip awal tujuan pendidikan pesantren adalah untuk mendidik anak perempuan menjadi perempuan yang sholehah, bukan untuk kepentingan duniawi semata. Dalam rangka beribadah kepada Allah, pendidikan keagamaan yang diberikan di pesantren bersifat aplikatif sehingga pengamalan atas pengetahuan keagamaan yang telah diperoleh sangat diutamakan.

Melalui pendidikan keagamaan inilah beliau melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Kyai Lukman menambahkan bahwa sebagai lembaga keagamaan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Pesantren Tremas saat ini masih sebatas penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan yang tertuang dalam kurikulum madrasah maupun pesantren. Namun demikian tidak menutup kemungkinan, untuk beberapa tahun mendatang ada kemungkinan dilakukannya terobosan-terobosan baru dalam rangka memberdayakan santri putrinya supaya bisa menjadi muslimah yang lebih terampil, mandiri, dan berkepribadian.

Para ustadz dan ustadzah juga mengungkapkan hal senada, mereka menegaskan bahwa sebetulnya upaya pemberdayaan perempuan telah ada sejak Islam diturunkan. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan sejarah yang mencatat beberapa nama perempuan seperti Aisyah sebagai perawi hadits ternama, Robiah al-Adawiyah sebagai sufi perempuan.

Dan yang paling penting adalah pemberdayaan perempuan bagi kalangan pesantren adalah bagaimana upaya membuat perempuan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan mampu menjadi pendamping suami dalam suka maupun duka.

Meski secara umum kalangan pesantren menerima adanya ide-ide tentang pemberdayaan perempuan, tapi mereka sangat berhati-hati dalam menghadapi berbagai

wacana feminisme yang sedang marak belakangan ini. Bagi mereka, selama ide-ide pemberdayaan yang dibawa oleh paham feminisme itu tidak bertentangan atau masih sejalan dengan norma-norma ajaran Islam, maka mereka bersedia menerimanya. Akan tetapi jika sebaliknya, paham yang dibawa para feminis ini berseberangan dengan pemahaman mereka terhadap Islam, maka mereka dengan tegas menolaknya.

C. Implementasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan di Pesantren Tremas

sebagaimana diungkapkan oleh kyai sebagai pimpinan pesantren, proses pemberdayaan perempuan di Pesantren Tremas lebih diprioritaskan pada aspek keagamaan, baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Hal ini Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sulasikin Murpratomo, bahwa pemberdayaan perempuan bisa dilakukan melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual maupun keterampilan perempuan sehingga perempuan bisa mengejar berbagai ketinggalan serta mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dengan maksimal.[36]

1. Pendidikan Formal

Upaya-upaya yang dilakukan pesantren dalam memberdayakan kaum perempuan adalah dengan penataan pendidikan formal yang erat kaitannya dengan penataan kurikulum dari tiga jenjang pendidikan yang dikembangkan yaitu jenjang Diniyah Tsanawiyah dan Aliyah. [37] Penataan kurikulum yang dimaksud adalah menata sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus dikuasai agar bisa mencapai tingkat tertentu. Sebagaimana yang tertera dalam *Webster's new International dictionary*: *A specified fixed course of Study as in school or college, as one leading to a degree".*[38]

---

[36] A Sulasikin Murpratomo, "Pengaruh Kekuasaan dalam..., hlm. 24.

[37] Unit Pendidikan yang diadakan adalah TK Attarmasie, TPA Attarmasie, Madrasah Diniyah Salafiyah, Madrasah Salafiyah Tingkat Isti'dâd, Madrasah Salafiyah Tingkat Mumtaz, Madsarah Salafiyah Tingkat Tsanawiyah, Madrasah salafiyah Tingkat Aliyah.

[38] Robert S Zais, *Curriculum Principles and Foundations*, (New York: Harper & Row Publisher, 1976), hlm. 6-7.

Sejak awal berdirinya, pesantren ini memposisikan diri sebagai pesantren salaf [39] yang kurikulum pendidikannya murni Ilmu-ilmu keagamaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pimpinan pesantren pun memutuskan bahwa untuk menunjang ilmu keagamaan para santri, perlu diberikannya pengetahuan umum sebagai unsur pelengkap. Diantara mata pelajaran umum yang diperkenalkan di pesantren ini adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, dan matematika.[40]

Adapun mengenai kitab-kitab yang digunakan adalah kitab-kitab *mu'tabarah* yang lazim dipakai di berbagai pesantren. Meskipun demikian nampaknya pengajaran nahwu dan shorof lebih ditekankan di pesantren ini, karena dengan menguasai kedua ilmu alat ini akan mempermudah santri dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain termasuk diantaranya ilmu fiqih.

Adapun mengenai kitab yang diajarkan di tingkat *diniyah* adalah: *Aqidah al-'Awam, Hidayah al-Shibyan, Madarij al-Durus al-'Arabiyyah, al-Qur'an al-Karim, Mabádi' al-Fiqhiyyah juz 1, Khulasah Nur al-Yaqin, Shorof Attarmasie, Ta'lim al-Muta'alim.* Untuk kitab bagi tingkat Tsanawiyah adalah: *Aqidah al-'Awam, Taqrib, al-Akhlaq li al-Banat, Khulashah Nur al-Yaqin al-Nahwu al-Waahih, al-Durus al-Nahwiyyah, Shorof Attarmansie, Qawa'id al-Kitabah, Faraidh, al-Arba'in al-Nawawi, Jazariyah, Madarij al-Durus al-'Arabiyyah.*

Sementara untuk tingkat Aliyah adalah *Ulum al-Qur'an li al-Manna' al-Qaththan, Tafsir ayat al-Ahkam 'Ali al-Shabuni, Jawahir al-Bukhari, Manhaj Dzawi al-Nazhar, al-Hushun al-Hamidiyyah, Kifayah al-Akhyar, al-Ashbah wa al-Nazha'ir, Qawa'id al-Fiqhiyyah, 'Izhah al-Nasyi'in, Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah, Jawahir al-*

---

[39] Zamakhsyari Dhofir mendefinisikannya sebagai pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab kuning sebagai inti pendidikan di pesantren. Sistem madrasah masih diterapkan untuk memudahkan sistem *sorogan* dalam pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pangetahuan umum. Lihat Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren Studi Tentang....*, hlm. 41.

[40] Wawancara dengan Kiai Luqman pada tanggal 20 Januari 2003, di Tremas.

Maknun, Lathaif al-Isyarah, al-Nahw al-Wadhih, Alfiyyah li ibn al-Malik, Faraidh, al-Durus al-Falakiyyah, Tarikh al-Tasyri'.[41]

Disamping pendidikan di madrasah, pesantren juga mengadakan model individual, yang biasa dikenal dengan pengajian *sorogan*.[42] Metode ini sangat efektif bagi para santri yang masih dalam taraf permulaan, karena adanya bimbingan, pengawasan, serta penilaian yang cukup maksimal dalam menguasai bacaan sebuah kitab. [43] Pengajian ini diadakan setiap pagi pada pukul 06.15 s/d 06.45 dan dibimbing langsung oleh wali kelas masing-masing.[44]

Selain itu, pesantren juga menerapkan sistem "Bahtsul Masa'il", yang merupakan metode pendidikan dengan cara mendiskusikan bahan-bahan pelajaran ataupun permasalahan yang berhubungan dengan hukum agama, untuk kemudian dicari jalan keluarnya.

Ada dua jenis Bahtsul Masa'il, yang *pertama,* Bahtsul Masa'il kelas dengan ketentuan: Kelas 1 MA membahas masalah bersuci dan pelaksanaannya setiap malam Rabu dan Kamis, Kelas II MA membahas masalah shalat dan zakat yang pelaksanaannya setiap malam Senin dan Selasa, sedangkan Kelas III MA membahas masalah mu'amalah dan dilaksanakan setiap malam Rabu dan Kamis dan yang *kedua*, Bahtsul Masa'il Kubra yaita diikuti oleh seluruh santri putra dan putri MA yang diadakan setiap 4 bulan sekali dan bertempat di Aula Pesantren Tremas. Kegiatan ini merupakan wadah bagi para santri untuk mengasah kemampuan memecahkan masalah

---

[41] Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas*..., hlm. 90-94.

[42] *Sorogan* berarti menyodorkan, maksudnya adalah para santri menyodorkan kitab untuk dibaca dihadapan kiai atau ustadz yang bersangkutan dan bila ada kesalahan dalam bacaannya langsung dibenarkan oleh kiai atau ustadz tersebut.

[43] Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, (Jakarta: Mulia Offset, 1989), hlm. 26.

[44] Untuk Tingkat Tsanawiyah (termasuk *Isti'dad* dan Mumtaz) kitab yang digunakan adalah *al-Qur'an al-Karim* dan *al-Durus al-nahwiyyah,* sementara untuk tingkat Aliyah *rahmah Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah* dan *Muhammad al-Insan al Kamil*, lihat Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas*... hlm. 95-96.

dengan jalan musyawarah dan menggunakan rujukan kitab-kitab yang cukup representatif.[45]

Selanjutnya dalam rangka memperdalam materi pelajaran yang telah diperoleh santri, pesantren mengadakan kegiatan yang disebut dengan "*takhassus*" yaitu model pendidikan di mana seorang ustadz bersama sekelompok santri dan masing-masing kelas mempelajari dan membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan pelajaran di madrasah dengan cara mengerjakan beberapa soal latihan yang diberikan oleh ustadz. Kegiatan ini biasanya diadakan pada sore hari dan diikuti oleh santri putra dan putri di asramanya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses pembelajaran santri yang berlangsung di madrasah.

Hampir mirip dengan *takhassus*, ada kegiatan "*takrar*" yang merupakan kegiatan belajar bersama yang bertujuan untuk mengkondisikan para santri untuk mempelajari dan memahami kitab yang dipelajari di madrasah. Kegiatan ini dilakukan setiap malam mulai pukul 21.00 sampai 23.00 di dalam kelas masing masing.

Kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada kurikulum tersebut bertujuan untuk menciptakan santri yang berilmu tinggi dan berwawasan luas. Dengan melihat kurikulum pendidikan serta jadwal kegiatan formal santri yang dikembangkan oleh Pesantren Tremas, maka dapat dikatakan bahwa program pendidikan yang telah dilakukan oleh Pesantren Tremas bisa mengantarkan pada kemandirian dan keberdayaan santri perempuannya.

2. Pendidikan Non-formal

Yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah kegiatan "kepesantrenan" yang merupakan wahana internalisasi nilai-nilai[46] keislaman terhadap santri dalam

---

[45] Diantara kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Majmu 'ala Syarh al-Muhadzdzab*, *I'anah al-Thalibin*, *al-Iqná*, *Fatawa al-Nawawi*, *Hasyiyah al-Syarqawi*, *Mizan al-Kubrá*, *al Ashbah wa al-Nazhair*, *Sittin Mas'alah*, *al-Haw al-kabir*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Anwar al Masálik*, *Tanwir al-Qulub*, *Tafsir al-Khazin*, *al-Tahdzib*.

[46] Internalisasi nilai menurut Noeng Muhadjir adalah salah satu strategi pendidikan nilai setelah diproses melalui jenjang aktifitas tertentu, misalnya

kehidupan sehari-hari di pondok atau asrama. Dalam rangka menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai Islami ke dalam diri santri, pesantren menerapkan kurikulum kepesantrenan yang dirangkai dalam Tata Tertib Pesantren[47] yang meliputi: kewajiban untuk mematuhi hukum syara (semua ketentuan hukum yang perintah dan larangannya ditentukan oleh syariat Islam), kewajiban untuk shalat berjama'ah, membaca al-Qur'an, menegakkan *al-akhlaq al-karimah*, membina *ukhuwwah Islamiyyah*, berpakaian sopan sesuai dengan kepribadian muslim, menghormati pengasuh dan guru serta kegiatan-kegiatan '*ubudiya*[48]*h* lainnya selama 24 jam dalam kehidupan di pesantren.

Di samping itu, sebagai pesantren yang bercirikan *salafi*, Pesantren Tremas mengadakan pengajian kitab kuning sebagai inti pendidikan pesantren yang harus diikuti oleh santri minimal 3 kitab dalam setiap harinya. Pengajian kitab ini biasa disebut pengajian weton yang merupakan salah satu sistem pendidikan tradisional yang diterapkan oleh Pesantren Tremas.

Dalam pelaksanaannya, kiai atau ustadz membacakan isi kitab sementara para santri memberikan *harakat* sebagaimana bacaan sang kiai dan mencatat penjelasannya baik dari segi *lughawy* (bahasa) maupun *maknawy* (makna). Santri boleh mengajukan pertanyaan, tapi biasanya terbatas pada konteks sempit isi kitab yang dikaji. Jarang sekali ada upaya untuk menghubungkan uraian-uraian kitab dengan hal-hal konkret atau situasi kontemporer. Kiai atau ustadz jarang menanyakan apakah santri benar-benar memahami kitab yang dibacakan untuknya, kecuali pada tingkat pemahaman yang bersifat *lughawy*.

---

menghargai, memilih dan melaksanakan, lihat Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial,* (Yogyakarta Rake sarasin, 1987), him. 115

[47] Diktat tentang Struktur, Peraturan, dan Program Kerja Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur.

[48] Salah satu nilai-nilai utama yang berkembang di pesantren adalah cara memandang kehidupan secara keseluruhan sebagai kegiatan "ibadah", Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai*..., hlm. 97-98.

Pengajian ini merupakan metode pembelajaran yang bersifat kolektif, yang diikuti oleh semua santri putra dan putri, dilaksanakan setiap hari (kecuali han libur) pada jam 05.30 s/d 06.15, 12.30 s/d 13.30, dan 19.30 s/d 20.30. Setiap menjelang *imtihan*[49] santri harus melaporkan kitab-kitab yang telah dikaji kepada penasehat asrama masing-masing.[50]

Adapun mengenai kitab yang dibacakan adalah: *Ihya' 'Ulum al-Din, Kifavah al-Akhyar, Nihayah al-Zin, Durrah al-Nashihin, Tafsir Ibn Abbas, Muhktär al-Ahadits, Riyadl al-Shalihin Ibn 'Aqil, Tausyiyyah 'ala Ibn al-Qasim, al-Muhadsdsab, al-Adzkár, Ta'lim al-Muta'allim, Minhaj al-Qawim, Tafsir al-Jalalain, Fath al-Muin, Nashaih al-Ibad, Fath al-Wahhab, Irsyad al-'Ibad, al-Muwaththa', Tanbih al-Ghafilin, Bulugh al-Maram, Maraqi al-'Ubudiyyah, al-Baiquniyyah, Qami al-Thughyan, Minhaj al-Abidin, 'Umdah al-Salik, al-Jami' al-Shaghir.*[51]

3. Pendidikan In-formal

Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah pendidikan yang bersifat ketrampilan dan keorganisasian yang merupakan rangkaian dari aktivitas pendidikan di pesantren. Kegiatan tersebut melipun: PHBI (Panitia Hari Besar Islam), organisasi yang beranggotakan seluruh santri putra dan putri kelas III MA (madrasah Aliyah) serta beberapa anggota utusan dari kelas II MA ini diberi tugas khusus oleh Majlis Ma'arif untuk mengurus dan menangani pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam mulai dari tata laksana administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaran perayaan hari besar Islam.

Bentuk kegiatan yang biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari besar Islam cukup bervariasi mulai dari kemampuan dalam bidang

---

[49] Imtihan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ujian tiap catur wulan.

[50] Wawancara dengan pengurus pesantren pada tanggal 22 Januari 2003 di Tremas.

[51] Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas*...., hlm. 97.

keagamaan hingga ketrampilan praktis sehari-hari. [52] Kegiatan ini, bagi Pesantren Tremas merupakan upaya untuk mendidik dan melatih para santri untuk berorganisasi dengan baik, sebagai bekal hidup di tengah masyarakatnya kelak, disamping juga sebagai upaya pengkondisian santri untuk selalu mengingat. Menghormati, dan menghayati arti hari besar Islam.

Selanjutnya adalah "*Dzibaiyyah wa al-Khithábiyyah*" yang kepanitian organisasinya dikoordinir oleh siswa kelas II MA dan siswa kelas I MA. Fokus daripada kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan santri dalam membawakan shalawat (barzanji) serta ajang kebolehan dalam dakwah melalui orasi Islami. Melalui kegiatan ini, santri dilatih secara mental untuk menguraikan dan menjelaskan masalah kelslaman dihadapan khalayak ramai. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam jum'at sesudah shalat Isya di asrama masing-masing, dan satu bulan sekali di minggu pertama bertempat di serambi masjid dengan diikuti oleh semua santri.

Kemudian "*Muhadlarah*", bagi kalangan Pesantren Tremas, kegiatan *muhadloroh* dijadikan sebagai sarana untuk melatih mental santri dalam mengungkapkan gagasannya di muka umum dalam bentuk pidato atau ceramah dalam beberapa bahasa antara lain: bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Sebagai kader ulama dan muballigh hal ini dianggap sangat penting karena merupakan bekal santri dalam menghadapi masyarakatnya.

Kegiatan ini diikuti oleh santri putra dan putri dan diadakan setiap satu bulan sekali. Sementara yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatannya adalah mereka yang berada di kelas III MTs

Selanjutnya dalam mengembangkan ketrampilan bahasa asing, pesantren mengadakan "*Attarmasie English*

[52] Kegiatan tersebut antara lain: Lomba Takbir Keliling, Penyembelihan Qurban, Istighotsah, Lomba Memasak, Lomba Ibadah, Lomba Ketrampilan (kondisional), Lomba Membuat Panggung untuk lebih jelasnya lihat Struktur, Peraturan dan Program Kerja.. hlm 30 31.

Course". Bahasa Asing merupakan dasar bagi pengembangan keilmuan. la merupakan kunci pembuka ilmu pengetahuan bagi anak didik. Sadar akan hal itu, maka pengajaran bahasa Inggris sebagai alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern pun sangat ditekankan di pesantren ini.

Hal ini bisa dilihat dari adanya sebuah lembaga pengembangan bahasa Inggris yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan santri putra dan putri dalam berbahasa Inggris khususnya masalah *grammar* atau tata bahasa dan *conversation*. Guna mendukung program ini Pesantren Tremas menyediakan laboratorium bahasa yang cukup representatif bagi proses pembelajaran. Pendidikannya dilaksanakan seminggu tiga kali yaitu pada hari Jum'at sampi Minggu setiap pukul 16.00 sampai 17:30.

Dalam rangka membentuk santri sebagai calon pemimpin umat yang berpengetahuan luas dan berpikir bebas, pesantren menyediakan sarana perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku dan majalah keislaman dalam dan luar negeri. Pengelolaan kitab, buku, dan majalah kelslaman merupakan salah satu tugas dari organisasi Perpustakaan Attarmasie (PA) yang dikoordinir oleh siswa kelas I MA dan siswi kelas II MA. Tujuan utama dari pendirian organisasi ini adalah untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas para santri dalam bidang jurnalistik.

Program kegiatannya adalah penerbitan majalah dinding, bulletin. penataran atau pelatihan, serta ceramah ilmiah. Dengan seluruh kegiatan tersebut, santri diharapkan bisa memperoleh pengetahuan sebagai bekal hidup di masyarakat kelak.

Selanjutnya adalah kegiatan "*Jam'iyyah al-Qurra' wa al-Huffazh*" yang menangani masalah seni baca al-Qur'an dan tahfizh al-Qur'ân. Baik santri putra dan putri terlibat dalam kegiatan ini. Pelatihannya dilakukan secara rutin setiap malam Jum'at setelah shalat Maghrib dengan dipandu oleh ustadz senior dan sewaktu-waktu juga mendatangkan Qari tingkat nasional dan internasional.

Dalam mempersatukan *ukhuwah Islamiyah* di kalangan santri, khususnya yang berasal dari satu daerah

tertentu, pesantren menyediakan wadah bagi pertemuan santri antar daerah dalam Organisasi Daerah. Pesantren mewajibkan semua santrinya untuk aktif dalam Organisasi Daerah sesuai dengan tempat asalnya.

Selain itu untuk menampung bakat seni yang ada dalam diri santri, pesantren memiliki Sanggar Seni Attarmasie. Pendirian organisasi di bidang kesenian ini dimaksudkan agar lebih meningkatkan apresiasi para santri terhadap berbagai macam bentuk kesenian dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai Islam. Jenis kesenian yang saat ini sudah berkembang adalah seni drama, qasidah, gambus, pencak silat, musik, dan kaligrafi. Program kegiatannya yang paling menonjol adalah "pentas seni" di setiap perayaan hari-han besar Islam dan "pameran hasil karya santri" setiap menjelang perayaan maulid Nabi Muhammad saw yang bertempat di gedung pertemuan Pesantren Tremas.

Selain itu ada kegiatan yang sifatnya menjaga lingkungan hidup yaitu *Tazayyun*. Organisasi ini dikoordinasi oleh siswa kelas I MA. Program kegiatannya adalah menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan pesantren Tremas. Piket kebersihan ditugaskan pada seluruh siswa kelas I MA yang dishift berdasarkan asramanya setiap sore mulai pukul 14.00 sd 15.30.

Yang terakhir adalah kegiatan pramuka. Kegiatan Pramuka ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang akan membentuk santri yang kreatif, dinamis, dan disiplin. Gerakan pramaka Pesantren Trenas yang merupakan gudep 09/39-40 dari kwarcab pacitan ini berkewajiban mengembangkan dakwah Islamiyah kepada masyarakat, khususnya yang masih minim pengetahuan agamanya. Dalam melaksanakan misinya gudep Pesantren Tremas ini mengadakan bakti sosial di beberapa daerah, selain juga mengikuti kegiatan perkemahan yang diadakan oleh kwarcab Pacitan.

Sayangnya hingga penelitian ini dilakukan santri yang terlibat dalam kegiatan ini masih sebatas santri putra yaitu mereka yang berada di kelas III Mts. Menurut Kiai sebagai pimpinan pesantren, hal ini tidak lain karena menjaga hal hal yang tidak diinginkan terjadi pada

beberapa santri putri, bila mereka harus berada di luar pesantren, jauh dari kontrol kiai maupun pengurus asrama. Bagi Kiai hal ini merupakan pilihan terbaik bagi santri putrinya, karena masih banyak kegiatan lain yang dianggap bisa memberdayakan santri putrinya.[53]

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan dan ketrampilan sebagai salah satu upaya pemberdayaan perempuan di pesantren Tremas, dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun kegiatan pesantren. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan kaum perempuan, hal ini sangat diperlukan karena melalui pendidikan, nilai-nilai tentang bagaimana kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan tersosialisasikan.

Disamping itu pemberdayaan juga dilakukan dengan cara melibatkan santri putri dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu-ilmu ketrampilan dan keorganisasian. Adanya pelibatan santri putri dalam organisasi yang dikelola bersama dengan santri putra juga mengindikasikan semakin jelasnya usaha pesantren Tremas dalam memberdayakan santri perempuannya. Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas pada kepanitiaan melainkan juga ikut mengisi acara, hiburan, ataupun memberikan sambutan-sambutan.

[53] Wawancara dengan Kiai Fuad pada tanggal 2 Pebruari 2003, di Tremas.

معهد ترمس الإسلامي
Perguruan Islam
Pondok Tremas Pacitan

Ayo! MONDOK Pesantrenku Kereen!

Informasi PSB

Penerimaan Santri Baru
"MADRASAH SALAFIYAH"
(TAHUN PELAJARAN 1443-1444 H. / 2022-2023 M)

PROSEDUR PENDAFTARAN

- Mendaftarkan diri di tempat pendaftaran bersama Orang tua / Wali.
- Mengisi formulir pendaftaran dan surat perjanjian bermaterai.
- Menyerahkan Foto Copy : Ijazah terakhir yang telah di legalisir, SKHU, NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), dan KTP kedua Orang tua, masing-masing 2 lembar.
- Menyerahkan pas photo warna 3 x 4 dua lembar.
- Berkas Persyaratan dimasukkan dalam Stopmap warna hijau.
- Orang tua / Wali siap mengikuti wawancara.
- Orang tua / Wali menyerahkan bimbingan anak (sowan) kepada Ketua Yayasan dan Ketua Majelis Ma'arif.
- Membayar uang administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

WAKTU PENDAFTARAN

- Pagi : Pukul 08.00 - 11.00 Istiwa'
- Sore : Pukul 16.00 - 17.00 Istiwa'
- Malam : Pukul 20.00 - 22.00 Istiwa'

TEMPAT PENDAFTARAN

- Pendaftaran dibuka selama 1 (Satu) Tahun Pelajaran
- Bertempat di Sekretariat Pendaftaran Santri Baru

INFORMASI LAIN-LAIN

Bagi santri baru diberi kesempatan mengikuti Test Penempatan Kelas dengan ketentuan :

1. Mendaftar sebelum tanggal 10 Dzulqo'dah.
2. Memiliki bekal ilmu pengetahuan keagamaan dasar, meliputi Al Qur'an/ Tajwid, Nahwu, Shorof, Fiqh, Bahasa Arab, Qiro'ah, & Imla'.
3. Bagi anak yang memenuhi kriteria test, akan ditempatkan sesuai kualifikasinya

SEKRETARIAT : Jl. Patrem No. 21, Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur
LAYANAN INFORMASI : ☎ (0357) 631001 ✉ 63581

NO	JENIS KEUANGAN	Madrasah Shobahi Putra (Asrama)	Madrasah Shobahi Putra (Non Asrama)	Madrasah Masa'i Putri (Asrama)	Madrasah Masa'i Putri (Non Asrama)
1.	Administrasi Registrasi	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
2.	Uang Gedung**	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
3.	SPP / Syahriyah (4 Bulan)	Rp. 280.000	Rp. 280.000	Rp. 280.000	Rp. 280.000
4.	Uang Imtihan	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
5.	Kartu Identitas Santri**	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6.	Infaq Kitab Perpustakaan	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
7.	Dana Idul Adlha (Qurban)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
8.	Baju Seragam Batik	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Rp. 65.000
9.	Bedge Madrasah**	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
10.	Transportasi Haul Semanten	Rp. 10.000	Rp. 10.000	-	-
11.	Jas Almamater Pondok**	Rp. 135.000	Rp. 135.000	Rp. 135.000	Rp. 135.000
12.	Infaq Pembangunan Gedung Madrasah	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Jumlah	**Rp. 973.000**	**Rp. 923.000**	**Rp. 963.000**	**Rp. 913.000**
Khusus Santri Asrama Induk					
1.	Iuran Asrama (1 Tahun)	Rp. 50.000	-	Rp. 50.000	-
2.	Dana Ma'hadiyah (4 Bulan)	Rp. 84.000	Rp. 20.000	Rp. 92.000	Rp. 28.000
3.	Operasional Rusuna (Isti'dad)	Rp. 110.000	-	-	-
4.	Operasional Al-Lubab (Mumtaz)	Rp. 50.000	-	-	-
	Jumlah	**Rp. 294.000**	**Rp. 20.000**	**Rp. 142.000**	**Rp. 28.000**
Khusus Santri Non Asrama Induk					
1.	Infaq Masjiddan Listrik (4 Bulan)	-	Rp. 36.000	-	**Rp.** 36.000

***) Hanya satu kali selama belajar di Perguruan Islam Pondok Tremas*

TOTAL BIAYA KESELURUHAN

- Madrasah Shobahi Putra Isti'dad (Asrama) Rp. 1.217.000
- Madrasah Shobahi Putra Mumtaz (Asrama) Rp. 1.157.000
- Madrasah Shobahi Putra (Non Asrama) Rp. 979.000
- Madrasah Masa'i Putri (Asrama) Rp. 1.105.000
- Madrasah Masa'i Putri (Non Asrama) Rp. 977.000

Pendaftaran DIBUKA MULAI
13 Syawal 1443 H

Tremas_1830 | Tremas TV | Attarmasi Ma'had Aly | www.pondoktremas.com

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan di Pesantren Tremas

Pendidikan agama merupakan salah satu bentuk pendidikan, karenanya ketika pesantren berusaha meningkatkan pendidikan keagamaan bagi anak perempuan berarti pesantren juga telah berusaha melakukan usaha pemberdayaan. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Tremas bisa dilihat dari proses kegiatan pendidikan baik di sekolah maupun di asrama (pondok) dengan tidak membedakan antara santri laki-laki dan santri perempuan.

Hal ini, menurut kiai selaku pimpinan pondok, dilakukan karena secara prinsip ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesetaran laki-laki dan perempuan dalam mengakses ilmu pengetahuan. Kiai juga masih memandang relevansi dari pepatah Arab yang artinya "Ibu adalah laksana sekolah, jika engkau mempersiapkannya berarti engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang kuat," Oleh karena itu, peningkatan pendidikan kaum perempuan adalah hal yang niscaya dalam Islam.

1. Faktor-faktor Pendukung Pemberdayaan Perempuan

a. Pendidikan Keagamaan

Diantara hal-hal yang memperlancar proses pemberdayaan perempuan di Pesantren Tremas adalah aktifitas Pendidikan. Dengan karakternya yang *religious oriented*, Pesantren Tremas telah meletakkan dasar-dasar pendidikan keagamaan yang kuat. Dalam proses belajar mengajar, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mentransmisikan nilai-nilai keislaman, tidak semata-mata memperkaya pikiran santri dengan teks-teks dan penjelasan yang Isłami, tetapi juga meninggikan moral, semangat, serta menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan tingkah laku yang

jujur dan bermoral, serta menerima etik agama di atas etik-etik yang lain.[1]

Di pesantren diajarkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, apalagi sekedar hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga perilakunya dalam hubungan dengan manusia di muka bumi ini. Hal ini cukup berpengaruh terhadap kepribadian santrinya dalam berperilaku sehari-hari.

Secara umum sistem belajar mengajar di pondok Tremas, menggunakan sistem klasikal. Hal ini dilakukan karena melihat beragamnya tingkat kemampuan santri sebagai peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, pengasuh pesantren memberi penekanan yang sama kepada santri putra dan putri yaitu perlunya penguasaan terhadap materi kitab kuning yang merupakan inti pendidikan pesantren. Meskipun proses belajarnya terpisah, tapi materi yang diajarkan relatif sama.

Dalam pengajaran kitab kuning dengan sistem *bandongan*, antara santri putra dan putri diperlakukan sama. Kitab yang diajarkan pun sama dari *Nashaih al-'Ibad, Fath al-Mu'in, al-Muhadzdzab hingga Ihya' 'Ulum al-Din*, secara berjenjang, hanya tempat mereka yang terpisah, tapi dengan ustadz atau guru yang sama. Hal ini menurut pengasuh pondok agar tidak menimbulkan fitnah, karena melihat usia para santri yang sedang dalam masa perkembangan, dikhawatirkan konsentrasi belajar mereka akan berkurang ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak pondok.

Begitu juga dengan materi pengajian *sorogan* dan al-Qur'an, materinya sama, cuma pelaksanannya dilakukan di ruang kelas dan di asrama masing masing. Dengan demikian maka dalam kegiatan

[1] Muhtarom HM, "Urgensi Pesantren dalam Pembentukan Pribadi Muslim" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, ed: Ismail SM dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), hlm.44.

pendidikan Pesantren Tremas tidak membedakan santri putra dan putri, mereka diperlakukan sama. Namun demikian, untuk menjaga keamanan dan kehormatan santri putri, pondok menerapkan aturan yang berbeda bagi mereka, biasanya pesantren putri lebih ketat daripada pesantren putra. Posisi pesantren putra yang terbuka menghadap jalan raya dan pesantren putri yang lebih masuk kedalam, sehingga dari jalan raya tidak nampak, mengindikasikan adanya perbedaan ketatnya peraturan. Bagi santri putri keluar malam hanya diizinkan untuk keperluan yang penting.

Dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki santri, pesantren mencanangkan kegiatan yang disebut dengan "*bahtsul masa'il*". Dalam kegiatan ini santri baik putra maupun putri terlibat perdebatan dalam satu forum. Berbagai persoalan yang sedang hangat di masyarakat dan membutuhkan legitimasi fiqh mereka perdebatkan dengan terbuka. Dengan demikan maka mereka dilatih untuk memecahkan berbagai persoalan keagamaan dengan menggunakan rujukan dalil-dalil yang ada dalam kitab yang cukup representatif.

Selanjutnya, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Pesantren Tremas merupakan gabungan dari sistem pondok dan madrasah. Di dalam sistem pondok, pendidikan dilaksanakan sepanjang hari di bawah bimbingan kiai atau pengurus asrama masing-masing. Sementara sistem madrasah mempunyai ciri sistem klasikal serta memasukkan beberapa pelajaran umum yang dianggap mendukung sistem pendidikan di pesantren. Dengan demikian maka pesantren Tremas mengembangkan program keilmuan yang lebih ditekankan pada ilmu ilmu keagamaan, disamping juga penanaman aspek pendidikan kemasyarakatan, ketrampilan maupun kesenian.

Hal yang menarik dari kegiatan pendidikan di Pesantren Tremas ini adalah adanya keseimbangan antara kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler sehingga santri selalu dikondisikan

dalam suasana belajar yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan terhadap mereka. Pada pagi hari mulai pukul 07.00 hingga pukul 12.00 santri putri berada dalam kelas masing masing untuk menerima berbagai macam pelajaran sebagai bentuk dari kegiatan kurikuler. Selanjutnya pada siang hari diisi dengan kegiatan-kegiatan ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Sementara pada malam harinya tetap ada kegiatan belajar bersama, mengulang dan mendalami materi pelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati bahwa pesantren senantiasa berusaha mendidik santrinya menjadi orang yang taat beragama dan berakhlak. Pesantren yang menggunakan pendekatan holistik dalam pendidikannya menjadikan semua aktifitas yang dilaksanakan dalamnya sebagai satu kesatuan untuk mengantarkan santri mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ditambah dengan waktu pendidikan yang 24 jam (*full day educational system*) setiap hari membuat pesantren mempunyai kesempatan untuk membekali lebih banyak kepada santri daripada sistem sekolah konvensional yang rata-rata hanya menggunakan waktu 6-7 jam setiap harinya, disamping kiai dan para ustadz bisa mengontrol kegiatan santri setiap harinya.

Namun demikian jika dikaitkan dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. nampaknya pendidikan keagamaan yang diberikan oleh Pesantren masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan. Hal ini bisa dilihat dari materi dan metode pembelajaran yang belum bisa mendekonstruksi visi dan ideologi masyarakat yang masih sarat dengan nilai-nilai bias gender.

Pendidikan keagamaan yang diberikan Pondok Tremas cenderung mesosialisasikan nilai-nilai bagaimana menjadi perempuan shalihah, ibu rumah tangga yang baik, serta bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anaknya supaya menjadi generasi yang

baik dengan berbekal ilmu yang telah ia peroleh dari pondoknya. Karena meskipun pimpinan pesantren dan para pengasuhnya mengarahkan santri putri untuk bisa lebur dalam kehidupan masyarakatnya, dimana hal ini terlihat dari pendidikan ketrampilan yang diberikan kepada mereka maupun pelibatan mereka dalam kegiatan organisasi bersama dengan santri putra, namun nilai-nilat tentang relasi laki-laki dan perempuan yang mereka peroleh dari proses pembelajaran baik di sekolah maupun di pesantren cenderung membakukan peran-peran sosial perempuan dan laki-laki, sebagaimana yang mereka pahami dari kitab-kitab rujukan mereka.

Proses pendidikan semacam ini sangat berpengaruh pada pengembangan bakat perempuan secara lebih luas. Pengkondisian perempuan dalam pekerjaan domestik hanya akan semakin memperjelas anggapan tentang adanya pembagian kerja secara seksual yang merupakan bawaan sejak lahir. Karenanya pendidikan pesantren dianggap melupakan perempuan karena gagal memberdayakan perempuan kecuali dalam perannya sebagai istri dan ibu.

Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa pemberdayaan perempuan di pesantren tidak berpengaruh terhadap keberdayaan perempuan karena melalui pendidikan pesantren, setidaknya perempuan masih bisa mendapatkan haknya untuk mengaktualisasikan potensinya dalam meraih kesuksesan di segala bidang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah pendidikan yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Mereka sama-sama dididik untuk menjadi orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Mengingat relitas sossal kalangan pesantren yang masih didominasi budaya patriarkhi serta masih adanya bias gender dalam menafsiri teks-teks keagamaan maka yang menjadi persoalan adalah masih minimnya informasi tentang kesetaraan gender yang bisa diserap oleh kalangan pesantren. Sehingga

menjadi wajar ketika nilai-nilai yang disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari masih sarat dengan nilai-nilai bias gender, yang cenderung membakukan peran perempuan dalam ranah domestic. Karena dalam pandangan mereka apa yang sesungguhnya "identitas gender" dianggap sebagai kodrat dan ketentuan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

b. Pendidikan Keorganisasian dan Ketrampilan

Para santri di Pesantren Tremas tidak hanya mendapatkan pendidikan agama dan keilmuan yang mengasah intelektualitas mereka, namun dalam rangka meningkatkan kualitas mereka pesantren juga menyediakan berbagai kegiatan ataupun pelatihan sesuai dengan minat dan bakat santri. Melalui kegiatan keorganisasian, baik itu organisasi pondok maupun organisal daerah, posisi perempuan dan laki-laki benar-benar diupayakan setara. Seluruh kegiatan dirancanakan bersama-sama dan beberapa kegiatan dilakukan dengan kebijakan bergiliran antara santri perempuan, mereka berkerjasama dengan beban kerja yang seimbang. Seperti misalnya acara *khithábiyyah*, penanggung jawab kegiatannya selalu bergiliran. Apabila bulan ini santri putra, maka bulan berikutnya santri putri.

Kegiatan berorganisasi merupakan tempat yang cukup representatif dalam rangka memberdayakan santri putri sebagai calon pemimpin masyarakat kelak. Dalam struktur kepengurusan pondok pesantren, ustadzah dilibatkan dalam kepengurusan, sehingga mengikuti rapat yang diadakan untuk memutuskan berbagai hal yang berkiatan dengan kemajuan pondok. Dari sini nampak adanya pelibatan perempuan dalam masalah publik.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan yang berupa kegiatan pendidikan keagamaan. Dengan demikian diharapkan santri perempuan akan mahir dan terampil dalam berorganisasi. Kesemuanya itu akan bermanfaat bagi mereka setelah menamatkan studinya, bila harus terjun dalam kehidupan masyarakat.

Memang gerakan perempuan yang muncul dalam berbagai wadah organisasi mempunyai peran strategis dan fungsional dalam upaya pemberdayaan perempuan, khususnya dalam menyiapkan kaum perempuan untuk terlihat aktif dalam urusan publik Tapi hal yang lebih penting lagi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif perempuan terhadap hak-haknya, baik sebagai individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Organisasi dapat digunakan untuk mensosialisasikan wawasan gender. Melalui kegiatan berorganisasi kaum perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif pentingnya perjuangan hak-haknya yang selama ini terabaikan, namun harus disadari bahwa tidak setiap organisasi secara otomatis memiliki visi dan misi yang berkeadilan gender. Berdasarkan pengamatan peneliti, organisasi yang ada di Pesantren Tremas masih cenderung memperlihatkan tanda-tanda yang mempapankan peran domestik, kalaupun bisa menjawab persoalan perempuan, masih sebatas pemenuhan kebutuhan gender secara praktis (jangka pendek).

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan

Salah satu agenda pemberdayaan adalah menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya upaya pemberdayaan. Dengan demikian maka hal yang harus dilakukan dalam rangka memberdayakan perempuan adalah mengikis habis hal-hal yang membuat perempuan tidak berdaya. Diantara beberapa masalah yang merupakan kendala dalam melancarkan proses pemberdayaan perempuan di Pesantren Tremas adalah:

a. Budaya dan Struktur Masyarakat

Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak di sekitar kita adalah kebudayaan yang secara umum masih memperlihatkan keberpihakannya

pada laki-laki. Kamla Bashin menyebutnya sebagai budaya "patriarkhi".[2]

Dalam kaitannya dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, norma patriarki yang mengedepankan garis kebapakan (laki-laki) menjadi nilai dan norma baku yang berlangsung selama berabad-abad dan telah merasuk berbagai sektor kehidupan.

Kebudayaan ini memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya perempuan berada dalam posisi subordinat. la menjadi bagian dari laki-laki dan menjadi tergantung pada laki-laki. Selanjutnya keadaan ini seringkali melahirkan proses marginalisasi sehingga menciptakan hubungan yang timpang antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan publik maupun domestik.

Untuk menjelaskan masalah subordinasi dan marginalisasi perempuan. kila dapat menyebut sejumlah pandangan dan fakta-fakta sosial budaya yang masih terus berlangsung bahkan sampai saat ini. Perempuan dalam masyarakat Jawa, dipandang sebagai *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. la adalah teman hidup dengan status di belakang. Sesudah itu *swargo nunut neroko katut* (ke surga atau ke neraka ikut suami). Perempuan (istri) yang baik dalam pandangan umum adalah istri yang penurut yang selalu menundukkan kepalanya dihadapan suami.

Budaya masyarakat yang seperti itu ikut mewamai anggapan kalangan pesantren terhadap perempuan, disamping secara redaksional terdapat teks-teks agama yang seolah-olah mendiskriditkan perempuan. Sehingga pemahaman terhadap ajaran

[2] Kamla Bashin, *Menggugat Patriarkhi*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1990), hlm. 1.

keagamaanpun menjadi sangat patriarkhal, karena mengandung nilai-nilai bias gender.

b. Kondisi Psikologis Perempuan

Faktor lain yang merupakan penghambat implementasi pemberdayaan perempuan di pesantren adalah kondisi psikologis perempuan itu sendiri. Hambatan ini terjadi karena adanya proses pengkondisian (enkulturasi) yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat muslim. Sejak masa kecil sudah disosialisasikan nilai tentang apa dan bagaimana peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya nilai-nilai tersebut didukung oleh konstruksi budaya dan pemahaman keagamaan, sehingga menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak bias diubah. Padahal stereotip yang ditanamkan itu adalah "apa adanya" *as it is* dan bukan *as it should be* "keadaan yang sebenarnya", karena keadaan itu bukan keadaan yang sebenarnya, maka sesungguhnya bisa diubah.

Proses yang berkaitan dengan peran gender tersebut memengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan perempuan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Karena adat dan kultur di Indonesia berorientasi patriarkhi, maka citra diri perempuan bersifat submisif sebagai warga kelas dua. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kardinah Soeparjo Rustam, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya perempuan Indonesia bahwa kebanyakan perempuan (responden mayoritas muslim) menganggap bahwa stereotip-stereotip yang diberikan kepada perempuan adalah sesuai dengan kodrat dan budaya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meski mereka mengakui bahwa kaum perempuan kurang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam publik, tapi mereka juga merasa bahwa menuntut hak dan kesempatan tersebut kurang pantas.[3]

[3] Kardinah Suparjo Rustam, *Wanita, Martabat, dan Pembangunan*, (Jakarta: Forum Pengembangan Keswadayaan, 1993), hlm. 13-16.

Sebagaimana pemahaman masyarakat pesantren, mereka memandang bahwa sosok perempuan ideal adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga yang dapat mengutamakan kesejahteraan seluruh keluarga. Meskipun mereka memiliki kesempatan untuk berperan di luar rumah tapi harus tetap bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan seterusnya.

Apalagi bila pemahaman tersebut berbenturan dengan konsep budaya ketimuran, maka mereka lebih cenderung menerimanya secara pasif. Bahkan secara eksplisit banyak yang mengakui bahwa kedudukan perempuan sesungguhnya setingkat di bawah laki-laki dalam status dan kemampuannya.

Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal diantaranya dalam memperoleh pendidikan yang sampai saat ini sudah dibebaskan seluas-luasnya, masih banyak kaum perempuan yang mengisolasi diri dengan berpikiran sempit bahwa perempuan tidak terlepas dari tiga dimensi kehidupan yaitu dapur, sumur, dan kasur. Persepsi tersebut harus diubah oleh kelompok perempuan itu sendiri, hak yang sudah dibuka lebar-lebar harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi perempuan.

Kodrat memang tidak bisa di lawan, namun harus dikembangkan sesuai dengan potensi awalnya. Tuhan menciptakan makhluk di muka bumi ini secara berpasangan dengan tujuan yang sama yaitu mencapai tahap kesempurnaan menjadi hamba-Nya. Kemampuan manusia merekonstruksi gender feminin dan maskulin tak mengubah substansi kualitas kodrat. Di sini yang diperlukan adalah kesadaran untuk memahami posisi bahwa keduanya merupakan alat penghambaan pada tingkat optimal. Bukan hanya dengan kekuasaan tapi juga dengan kasih saying. Makin cepat makhluk mendekati-Nya maka dialah yang akan mendapatkan pelukan-Nya. Ingatlah bahwa matahari tidak lebih berarti daripada bulan sekalipun

merupakan sinarnya ketika malam tiba, hegitu juga sebaliknya.

c. Interpretasi Teks Keagamaan

Bagi masyarakat muslim, agama merupakan institusi sosial dan pedoman hidup yang paling fundamental bagi manusia yang memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur dan pengembangan sebuah masyarakat. [4] Disamping juga merupakan referensi yang dijadikan sebagai tempat rujukan dalam mengatasi berbagai macam persoalan kehidupan, sehingga terkadang agama lebih dari sekedar alat legitimasi norma-norma tertentu.

Dalam banyak kasus sosial yang memarginalkan perempuan, sengaja atau tidak agama dilibatkan sebagai unsur pembentuk pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang timpang dan seringkali dijadikan sebagai sumber legitimasi teologi yang tak terbantahkan atas kenyataan yang menyudutkan perempuan.[5] Bahkan dengan nada sedih Moriz Winternitz, seorang indologi Jerman, mengemukakan "*Women have always been the best friends of religion, but religion has generally not been a friend of women*".[6]

Padahal sebenarnya Islam tidak pernah melegalkan penindasan maupun penguasaan laki-laki terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Tapi bagaimana Islam menjelaskan hal tersebut sementara wacana Islam tetap didominasi oleh budaya abad pertengahan. Maka kecenderungan pendomestikan dan subordinasi perempuan dalam tafsir dan fiqh pun tidak terelakkan.[7]

---

[4] Zakiyudin Baidhawy, *Wacana Teologi Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. Viii.

[5] Martin Van Bruinessen, "Perempuan dan Kitab Kuning…, hlm. 165.

[6] Annemarie Schimmel, dalam Kata Pengantar karya Sachiko Murata, *The Tao of Islam; A sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought*, (Albany: State of University of New York Press, 1992), hlm. Vii.

[7] Masdar F Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab…, hlm. 163.

Dominasi peran laki-laki terhadap perempuan menurut Ashghar Ali Engineer dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka. Begitu kuatnya sikap ini, sehingga norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan akibatnya dinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku. Demikianlah kondisi masyarakat yang didominasi laki-laki seringkali bahkan mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang dipersembahkan bagi umat manusia. Tidak terkecuali kitab suci al-Qur'an yang secara komparatif bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami nasib yang sama.[8]

Oleh karena itu, interpretasi yang bias terhadap makna al-Qur'an menghasilkan pemahaman yang rancu, bahkan mengakibatkan terhadap adanya penyimpangan makna sesungguhnya Ketidaksetaran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat pesantren pada umumnya bersumber dari faktor interpretasi seperti ini.

Teks keagamaan Islam meliputi al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab karangan utama yang mengulas keduanya. Dalam realitas keberagamaan, nilai universal ajaran Islam tertutupi oleh tafsir-tafsir teks yang bersifat partikular, sehingga seakan-akan yang partikular itulah yang universal. Hal ini dapat dirasakan dari adanya persepsi dikalangan pesantren yang masih menganggap bahwa laki-laki lebih baik atau lebih unggul dari perempuan sejak dia diciptakan. Anggapan ini diperkuat oleh teks-teks agama yang cenderung mendiskriditkan perempuan pada titik keterpurukan yang terdalam; seperti adanya teks agama yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan tidak utuh yaitu hanya dari tulang rusuk laki-laki, perempuan menempati urutan terbanyak sebagai penghuni neraka karena kurang agama dan

[8] Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam*..., hlm. 3-4.

akalnya, dan masih banyak lagi stereotip lain yang bersifat mendiskriditkan perempuan.

Sebetulnya realitas seperti ini tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan pengabsahan tindakan semena-mena dan kesewenang-wenangan dari pihak yang satu pada pihak yang lain. Namun dalam realitas hidup keseharian di pesantren seringkali dijumpai perlakuan diskriminatif terhadap perempuan diantaranya adalah stereotip atau pelabelan terhadap perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan seterusnya, sehingga meski dalam beberapa hal perempuan diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah, tapi tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga tetap ada pada perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki peran ganda yaitu dalam masalah domestik dan publik.

Selanjutnya pemahaman bahwa perempuan tidak berkewajiban untuk mencari nafkah yang melahirkan anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan, sehingga pekerjaan perempuan biasanya dilai lebih rendah ketimbang pekerjaan laki-laki. Karena tanggung jawab penuh ada pada laki-laki, mengakibatkan perempuan akan dinomorduakan dalam pendidikan bila dalam keluarga ada masalah finansial. Biasanya anak laki-laki akan lebih didahulukan dalam segala hal karena diyakini akan jadi penanggungjawab keluarga sepenuhnya. Jadi dalam masyarakat pesantren masih ada anggapan yang memandang jenis kelamin tertentu lebih penting ketimbang jenis kelamin yang lain. Mansur Faqih menyebut fenomena seperti ini sebagai tindakan ketidakadilan terhadap perempuan.[9]

Untuk itu dalam menangkap sebuah ujaran apalagi berupa kitab suci, perlu kiranya merefleksikan ulang ungkapan Aristoteles yang mengatakan bahwa

[9] Lihat Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*..., hlm. 15-16.

pesan yang tersimpul dalam dunia pengalaman akan mengalami pengkerutan makna manakala diekspresikan melalui kata yang terucap. Kata yang terucup juga akan mengalami pengkerutan manakala diekspresikan dalam bahasa tulis.[10] Seringkali kita memiliki hasrat dalam angan yang penuh dengan makna, namun ketika hal itu diungkapkan melalui kata dan tulisan, terasa sangat sederhana. Dengan demikian dari pengalaman atau buah pikir ke ekspresi oral dari oral ke ekspresi tulis terdapat perbedaan ekspresional yang cukup mencolok. Bahkan perbedaan ekspresional tersebut pada tiap tingkatan seringkali mengalami distorsi.

Dalam perjalanan sejarah keberagamaan, khususnya Islam, ulama memiliki peran sentral dan dianggap punya otoritas untuk menghadirkan wajah Islam dalam pentas kehidupan, sehingga mereka berusaha dengan maksimal untak pesan suci agama untuk disosialisasikan kepada umat sebagai manifestasi ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi semesta.

Namun demikian tangkapan ulama terhadap teks tidak mungkin terlepas dari pengaruh persepsi dan latar belakang lingkungan sekitar berupa tradisi, budaya, status sosial, yang dalam bahasa Amina Wadud Muhsin disebut dengan *prior teks*.[11] Sebagaimana diungkap oleh Arkoun bahwa suatu teks tidak pernah ditulis selama kita belum membacanya, setiap pembaca menulis lagi teks itu sesuai dengan kisi-kisi persepsinya dan prinsip penafsirannya. Kisi-kisi dan prinsip itu berkaitan dengan tidak hanya tradisi kebudayaan yang dipakai setiap pembaca sebagai sandaran, namun juga dengan paksaan-paksaan ideologis dari kelompok dan masanya.[12]

---

[10] E Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 25.

[11] Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj: Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.1.

[12] Muhammad Arkoun, *Berbagai Pembacaan al-Qur'an*, terj: Machasin, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 6.

Secara lugas Mansour Faqih juga menegaskan bahwa tafsir keagamaan sangat dipengaruhi oleh kacamata yang digunakan oleh penafsirnya yang seringkali berkaitan dengan berbagai aspek baik ekonomi, politik, kultural, maupun ideologi.[13]

Oleh karena itu dalam rangka memahami teks kitab suci, Amina Wadud Muhsin mengilustrasikan tiga hal yang perlu dicermati dalam melakukan interpretasi terhadap teks agama yaitu: *pertama* dalam konteks apa sebuah teks/ayat diwahyukan dan ditulis; *kedua*, bagaimana komposisi tata bahasa teks/ayat tersebut dalam pengungkapan dan apa yang dikatakannya; *ketiga*, bagaimana keseluruhan teks/ayat meliputi *weltanschaung* dan pandangan hidupnya.[14]

Interpretasi atas ayat al-Qur'an dan hadits bukanlah interpretasi yang lepas dari realitas-realitas masyarakatnya. Interpretasi terhadap kitab-kitab yang ada tidak bisa lepas dari budaya masyarakat yang menginterpretasikan tersebut. Memahamkan persoalan-persoalan gender dalam masyarakat banyak menemui kendala diantaranya adalah ketika pemahaman keagamaan itu disampaikan oleh orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai pemilik otoritas kebenaran (*'ulama*). Dan kesulitan yang lebih jauh lagi adalah ketika pemahaman keagamaan tersebut telah berubah menjadi keyakinan keagamaan atau bahkan diyakin sebagai agama itu sendiri.

Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh aktor budaya, sosial, kecenderungan politik, dan faktor psikologis sang penafsir. Budaya menyangkut cara berpikir dan sistem hidup masyarakat saat tafsir dikeluarkan. Sosial menyangkut pola-pola relasi antar manusia. Politik menyangkut kekuasaan. Dengan demikian maka perlu adanya upaya rekonstruksi pemahaman keagamaan, untuk menampilkan wajah Islam yang santun, egaliter, adil, dan berlaku universal

[13] Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi*..., hlm. 134.
[14] Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*..., hlm. 4.

untuk kesejahteraan umat manusia, tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, dan juga jenis kelamin tertentu.

B. Pendidikan Pesantren Sebagai Media Pemberdayaan Perempuan

Bila merujuk pada informasi di atas, ternyata fungsi pendidikan tidak sepenuhnya bisa mendorong percepatan proses pemberdayaan perempuan. Meski dalam perjalanan waktu nampak adanya peningkatan jumlah santri putri yang bersekolah dengan jenjang yang semakin tinggi, namun pendidikan pesantren belum dapat mengeliminasi stereotip gender, malah kecenderungannya mempertahankan dan bahkan memperkuatnya. Hal ini tercermin dari materi kurikulum baik di sekolah maupun di pesantren yang masih sarat dengan nilai-nilai bias gender Dalam konteks inilah pendidikan pesantren bahkan turut membantu menyebarluaskan ideologi yang bias gender, karena belum adanya keberanian untuk mengkritisi atupun mengubah pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang sebetulnya menerima berbagai macam penafsiran.

Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dari belenggu-belenggu yang membuatnya tidak manusiawi. Jika pendidikan yang punya hakekat dan orientasi pemberdayaan ini tidak steril dari nila-nilai yang sarat dengan bias gender, yang cenderung melahirkan ketidakadilan, maka tidak mengherankan kalau dalam masyarakat masih terjadi praktek-praktek yang tidak mencerminkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Tapi kiranya terlalu berlebihan bila hanya melihat sisi negatif dari pendidikan pesantren secara umum. Tidak selamanya pendidikan pesantren pada akhirnya melahirkan *status quo*. Melalui pendidikan pesantren, perempuan diharapkan dapat menjadi pribadi muslimah yang mandin dan tangguh sehingga mampu mengatur kehidupan pribadinya, mengatasi persoalan-persoalannya, serta membuatnya mampu membuat pilihan dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pendapat M Athiyyah al-Abrosyi yang menegaskan bahwa pendidikan punya peran penting bagi kaum perempuan, karena pendidikan akan membawa kepada fadhilah, kemuliaan, ketinggian, dan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan seperti inilah yang akan menempatkan perempuan menjad pribadi yang mandiri dalam menjalani kehidupannya.[15] Dengan demikian berarti bahwa pendidikan mempunyai kekuatan untuk mengembangkan peran dan potensi perempuan. Namun demikian peran pendidikan tersebut tidak akan terwujud apabila ketimpangan yang ada dalam pendidikan Islam tidak dipecahkan.

1. **Materi atau Kurikulum Sensitif Gender**

Kurikulum merupakan persoalan yang penting karena pada dasarnya filosofi dan sebuah kurikulum adalah untuk mempromosikan perubahan sosial ke arah yang lebih progresif. Segala relasi antara laki-laki dan perempuan serta segala persoalan kesetaraan akan selalu terrefleksi dalam sebuah kurikulum, karenanya formulasi kurikulum yang sensitif gender harus ditekankan.

Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dan proses belajar mengajar di pesantren sangat penting dalam membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan (kualitas keberagamaan) pada diri santri.[16] Pemikiran kitab kuning selain merupakan objek kajian juga harus dijadikan sebagai objek pengkajian atau studi kritis. Karangan ulama besar abad pertengahan harus dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, sosial, dan politik. Isi kitab janganlah dijadikan sebagai kebenaran mutlak, karena merupakan cerminan budaya, kebutuhan, dan pendapat mayoritas pada saat kitab itu dikarang.

Produk Pemikiran Islam masa lalu yang sesuai dengan konteks saat itu, menemui benturan dahsyat dengan realitas saat ini yang kondisinya berbeda secara mencolok seperti misalnya tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang pada waktu lalu sangat timpang dan berbeda perannya disebabkan laki-laki mampu berperan dalam dunia publik sementara perempuan di dunia domestik, saat ini mulai berguguran disebabkan

---

[15] Athiyyah al-Abrosyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 132.

[16] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mian, 1994), hlm. 51.

banyaknya perempuan yang mampu setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam ranah publik maupun domestik.

Agar materi yang diberikan bermanfaat bagi kehidupan anak didik, hendaknya materi tersebut harus sesuai dengan tuntutan zaman, kesempurnaan jiwa anak didik, dengan tanpa melupakan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Sebagai contoh, materi yang diberikan di pondok pesantren yang agaknya perlu peninjuan lebih lanjut, dalam bidang figh, pesantren sangat syafi'iyah sementara dalam bidang teologi sangat Asy'ariyah-Maturidiyah.[17] Karena itu pesantren perlu mengajarkan kitab kuning yang bervariasi sebagai *enrichment* dari kajian pokok. Kitab *al-Fiqh 'alá Madzahib al-Arba'ah* layak menjadi kajian di pesantren, begitu juga dengan kajian teologi Ibn Taimiyyah atau Mu'tazilah juga perlu diperkenalkan.

Dengan cara ini wacana perbedaan dan berpikir alternatif mungkin tumbuh sehingga mampu meminimalisir budaya berpikir tekstual. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah seharusnya pola pendidikan dan pola pikir yang diberikan di pondok pesantren dapat dimodifikasi dan diintegrasikan dengan kondisi umat zaman sekarang.

Mempertahankan karya-karya keislaman klasik, yang lebih sesuai dengan zaman pertengahan, justru akan menimbulkan ketimpangan gender yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial Islam. Sebenarnya *qaidah ushuliyah* dalam ilmu fiqh telah menjamin bahwa "setiap ketentuan hukum selalu berkait dengan kausanya, baik ada dan tiadanya". Oleh sebab itu, pada zaman yang dipenuhi oleh semangat kesetaraan, demokrasi, dan penghormatan atas harkat kemanusiaan, bukankah sudah saatnya wacana keislaman klasik ditafsirkan ulang secara proporsional sehingga mampu menghadirkan Islam sebagai anugerah bagi semesta.

[17] Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan*..., hlm. 19.

2. Metode Pembelajaran Kritis

Selain masalah kurikulum, cara pengajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik juga merupakan hal yang harus mendapat perhatian khusus. Adalah sebuah realitas bahwa cara penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik meski sebenarnya materi yang disampaikan kurang begitu menarik. Hal ini sesuai dengan adagium yang mengatakan bahwa "metode atau cara lebih penting dari materi". Selain itu, metode pembelajaran juga seharusnya bisa menumbuhkan sikap kritis dari para siswa. Sehingga dengan selalu mengajukan pertanyaan mengapa pada setiap unit pengetahuan, siswa akan selalu berpikir ktitis dan inovatif dalam segala bidang.

Metode yang secara umum dikembangkan dalam dunia pendidikan di pesantren adalah *sorogan* dan *bandongan*. Meski ada beberapa kalangan yang menganggap kedua metode tersebut, tradisional dan statis, namun bukan berarti tidak menerima inovasi. Bahkan menurut Suyoto, terlepas dari buku dan isi buku yang dibawa santri, sebetulnya metode ini merupakan konsekwensi daripada layanan yang sebesar-besarnya, yang ingin diberikan pada santri. Berbagai usaha dewasa ini dalam berinovasi justru mengarah pada layanan secara individual anak didik. Metode *sorogan* justru mengutamakan kematangan dan perhatian serta kecakapan seseorang.[18]

Begitu juga jika dikaitkan dengan teori *Cyber Learning* yang menyatakan adanya kemampuan belajar mandiri bagi peserta didik, maka sistem *sorogan* bukanlah sistem tradisional tetapi merupkan sistem pembelajaran yang *up to date*.[19] Sementara bila sistem pengajaran

---

[18] Suyoto, "Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional" dalam *Pesantren dan Pembaharuan*, ed: Dawam Rahardjo, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm.

[19] Teori *clyber learning* akan memasuki semua jenis proses pembelajaran baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, bahkan proses belajar dan pelatihan akan terlaksana di luar ruang ruang kelas. Belajar mandiri merupakan inti dari proses pembelajaran dan pelatihan masa depan yang serba cepat, serba intensif, dan *up to date*. Lihat HAR Tilaar, *Beberapa*

bandongan dan *sorogan* dikaitkan dengan dunia universitas, maka identik dengan sistem kuliah umum dan penelitian individual. *Bandongan* yang diartikan dengan sistem *halaqah* dengan meja kecil tempat kiai atau guru menyajikan materi, bagaikan guru besar menyampaikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa. Begitu pula metode *sorogan*, dimana para santri membaca kitab sendiri dan kiai tidak membatasi kajiannya, dalam arti santri bebas mengambil tema, bab dan pasal, serta kitab yang akan dibacakan di hadapan kiai, sementara kiai bertindak sebagai pembimbing yang secara langsung mengarahkan. Proses seperti ini merupakan langkah edukatif yang menanamkan kemandirian belajar individual.

Dengan demikian maka secara dedaktik-metodik dalam konteks pencapaian hasil belajar, metode *sorogan* terbukti memiliki efektifitas dan signifikansi yang tinggi, karena sistem ini memungkinkan kiai/ustadz mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi. Demikian juga dengan sistem *bandongan* yang membantu percepatan kajian kitab.

Dilihat dari sisi positif dari metode *sorogan* dan *bandongan* tersebut, maka yang harus dipertimbangkan bukanlah upaya untuk mengganti metode *sorogan* menjadi model perkuliahan sebagaimana sistem pendidikan modern, melainkan merenovasi *sorogan* menjadi sorogan mutakhir (gaya baru). Yang dimaksud dengan sorogan mutakhir ini barangkali sebagaimana dipraktekkan oleh guru besar Mukti Ali selama ini. Beliau mengajar mahasiswa Pascasarjana dengan model *sorogan*. Mahasiswa diberi tugas untuk membaca satu persatu pada waktu tatap muka yang terjadwal, kemudian setelah membaca dadakan pembahasan dengan cara berdialog dan berdiskusi sampai memperoleh pemahaman yang jelas pada pokok bahasan. Menurut beliau metode ini cukup berhasil mengingat laporan beberapa mahasiswa yang dulunya kurang menguasai bahasa asing baik Inggris

---

Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad XXI, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hlm. 131.

maupun Arab, akhirnya bisa menguasainya dengan baik, selain juga materi yang disampaikan.[20]

Disamping sisi positif sebagaimana tersebut di atas, dalam beberapa hal proses pembelajaran ini memiliki sisi negatif, diantaranya adalah hilangya keberanian untuk berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang ada di pesantren kurang memberikan ruang dialog karena sistemnya yang *kiai centered/teacher centered*. Kreatifitas santri tidak berkembang dengan baik karena ketakutan untuk bertanya dan berbeda pendapat. Bertanya dan berbeda pendapat masih dianggap dengan *su'ul adab*. Inilah yang membuat metode pembelajaran khas pesantren seperti *sorogan* dan *bandongan* masih tidak beranjak dari orientasi *content knowledge* dan belum mengarah pada *understanding* dan *construction of the knowledge*.

Tidak adanya ruang dialog dan perbedaan juga membuat lingkungan pendidikan pesantren menjadi sangat homogen, terutama dari sisi ideologis. Perbedaan ekonomi dan latar belakang budaya lebur dalam sistem pendidikan pesantren karena perasaan *in-group* yang sangat tinggi. Para santri tidak terbiasa dengan wacana pluralitas, terutama pluralitas *diniyyah "ubudiyyah"*. Inilah yang kadang membuat para santri sangat reaktif terhadap persoalan-persoalan *diniyyah ubudiyyah*, sebaliknya kurang tanggap terhadap masalah *muamalah duniawiyyah*.

Pembaharuan metode dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi yang telah mapan. Dalam konteks ini, metode *sorogan* dikembangkan ke arah pemahaman materi pokok atau *main course*. Pembelajaran yang *face to face* dalam sistem *sorogan* memungkinkan kiai untuk menguji kedalaman pengetahuan santri secara individual. Pemahaman dan pendalaman pengetahuan dilakukan secara individual oleh santri. Hal ini penting untuk mengurangi skeptisisme dan *over critisisme* di mana seseorang menolak suatu pendapat tanpa memahami secara mendalam pendapat yang ditolaknya.

---

[20] Saifudin Zuhri, "Reformasi Kurikulum Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan...*, hlm. 102-103.

Halaqah dan *bandongan* diarahkan sebagai arena debat dan dialog antar sesama santri bukan sekedar pembacaan kitab secara massal. Sisi positif yang muncul dari pembaharuan ini adalah munculnya kebiasaan untuk berani mengemukakan pendapat, beda pendapat, berpikir secara logis-rasional, dan menghargai perbedaan pendapat. Disamping itu tradisi berdebat bisa mendorong santri untuk mengerti lebih banyak demi memperkuat argumennya dan mendapatkan lebih banyak dengan mendengar dan mencermati pendapat orang lain. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan belajar sebagai proses menemukan dan menciptakan pengetahuan dengan mengaktifkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang sedang dihadapi.[21]

Dari paparan di atas bisa dipahami bahwa metode penyampaian materi kitab kuning yang merupakan produk pemikiran Islam, seharusnya diuubah dengan terlebih dahulu menyajikan proses terjadinya produk pemikiran Islam tersebut. Sehingga santri dapat mengikuti prosedur dan metode pengambilan suatu rumusan pemikiran Islam yang bersumber dari sumber aslinya. Yang sangat diperlukan dalam pembinaan nalar santri bukanlah menyiapkan produk pemikiran Islam yang sudah jadi melainkan bagaimana produk tersebut secara metodologis disusun oleh pengarang.

Pemberian "bahan jadi" atau produk pemikiran yang sudah jadi kepada santri hanya akan melatih kemampuan hapalan, yang akan melahirkan *muqallid* pasif karena kepandaiannya hanya sebatas menghapalkan bahan jadi sebanyak mungkin, kurang melatih kesadaran kritis untuk setidaknya menjadi *muqallid* aktif (jika tidak memungkinkan baginya untuk menjadi calon *mujtahid*) yang dapat menggunakan ilmu keagamaan yang telah dipelajarinya sebagai alat kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan manusia sesuai dengan konteks

[21] Leo Sutrisno, "Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme", dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hlm. 205-222.

zamannya, sesuai dengan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Titik lemah metode berpikir klasik dalam mempelajari ilmu keislaman menurut Hasan Hanafi adalah dominasi metode berpikir tekstual, yaitu cara berpikir yang bertumpu pada teks. Metode yang agaknya tepat untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren hendaknya metode deduktif, induktif, dan kritis. Dimana al-Qur'an dan hadits dipergunakan sebagai tolok ukur kebenaran dalam mengkritisi permasalahan kehidupan yang berkembang di masyarakat. Kegiatan diskusi dalam memecahkan permasalahan di bawah bimbingan guru juga akan sangat efektif sebagai rangsangan *brain storming* daya intelektual santri.

Karena itu ilmu keagamaan yang tertuang dalam kitab kuning seharusnya dianggap sebagi produk pemikiran para mujtahid, yang merupakan interpretasi dan derivasi dari ajaran dasar, sehingga tidak perlu dianggap sakral sehingga tidak bisa menerima perubahaan. Pendidik yang pas atau tepat pada zamannya, bersikap tidak dogmatik dan harus demokratis.

3. Profesionalisme Tenaga Pendidik

Materi pembelajaran berupa kitab kuning, sebenarnya mengandung nuansa penalaran yang terbuka bagi segala macam bentuk penafsiran, namun nuansa penalaran tersebut menjadi hilang bukan karena materi itu sendiri melainkan karena kekeliruan pembinaan sikap terhadap kitab yang cenderung diajarkan secara doktriner, sehingga santri yang kebanyakan masih dalam usia perkembangan kepribadian, akan mengikuti pola yang ditanamkan gurunya secara terus menerus. Hal ini bisa dilihat dari ketaatan santri terhadap kiai atau guru secara mutlak.

Peran kiai yang sangat dominan dan signifikan dalam keberlangsungan dan eksistensi sebuah pesantren, menunjukkan bahwa dalam kehidupan pesantren, kiai mengatur irama perkembangan dan kelangsungan hidup suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, kharisma, dan ketrampilannya.[22]

[22] Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan*..., hlm. 49.

Ketaatan dan kesetiaan terhadap para guru yang berlebihan, secara hierarkies melahirkan sikap yang memposisikan kitab kuning sebagai sesuatu yang sakral, sehingga pantang menerima perubahan. Selanjutnya santri kehilangan daya dan sikap kritisnya. Penghormatan yang tinggi seringkali menjadikan santri sebagai sosok yang sangat pasif karena khawatir kehilangan *barakah*. Hal ini juga melekat pada kitab kuning yang diajarkan oleh sang kiai/ ustadz. Bagi para santri, kiai dan kitab kuning merupakan sumber otoritas, bahkan sumber hukum. Sikap demikian juga bisa menumbuhkan inkonsistensi di mana santri berbuat yang terbaik dihadapan kiai dan berbuat maksiat ketika jauh dari kiai, sekalipun mereka merasa menjadi santri dan bagian dari pesantren.

Pengenalan konsep dan praktek baru dalam kurikulum pendidikan merupakan proses yang kompleks dan rumit yang memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pimpinan pondok dan seluruh staf pengajarnya. Partisipasi seluruh pihak dalam proses pengembangan kurikulum yang sensitif gender merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, para pengajar harus memiliki sensitivitas gender [23], mengerti kepentingan tujuan dan manfaat dari kurikulum sensitif gender tersebut. Kepekaan dan kesadaran gender perlu ditumbuhkan sejak awal bagi kiai sebagai pimpinan pondok serta seluruh pengajarnya, melalui forum diskusi, seminar lokakarya, ataupun pelatihan pelatihan yang berwawasan gender.

Upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan akan dapat berhasil bila memiliki tenaga pendidik yang

[23] Sensitivitas gender adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sensitivitas gender diharapkan mampu menjadi alat untuk melihat ketidakadilan yang muncul berkaitan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki baik di ranah domestik maupun publik. Lihat Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim PPBA Departemen Agama RI, 2001), hlm. 126.

sensitif gender. Dengan demikian maka guru atau pendidik merupakan faktor kunci dalam proses pemberdayaan perempuan. Agama bukanlah alat legitimasi untuk menempatkan perempuan agar selalu tunduk pada lelaki, namun justru agama merupakan salah satu referensi yang cukup kuat yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki.

Upaya rekonstruksi terhadap pendidikan Islam merupakan hal yang harus selalu dilakukan untuk menampilkan wajah Islam yang santun, egaliter, adil, dan berlaku universal untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, dan juga jenis kelamin. Islam untuk semua dan untuk itu pendidikan Islam juga untuk semua.

Melalui pendidikanlah wajah Islam akan terbaca dan bersinar menerangi semesta. Untuk itu wajah pendidikan Islam harus ditampilkan untuk mengantarkan berkas-berkas sinar yang dimiliki peserta didik (laki-laki dan perempuan) untuk menuju kematangannya, sehingga sinar tersebut menjadi sinar yang teduh dan menyejukkan yang semua orang akan selalu merindukan kehadirannya, bukan sinar terik yang semua orang menghindar darinya.

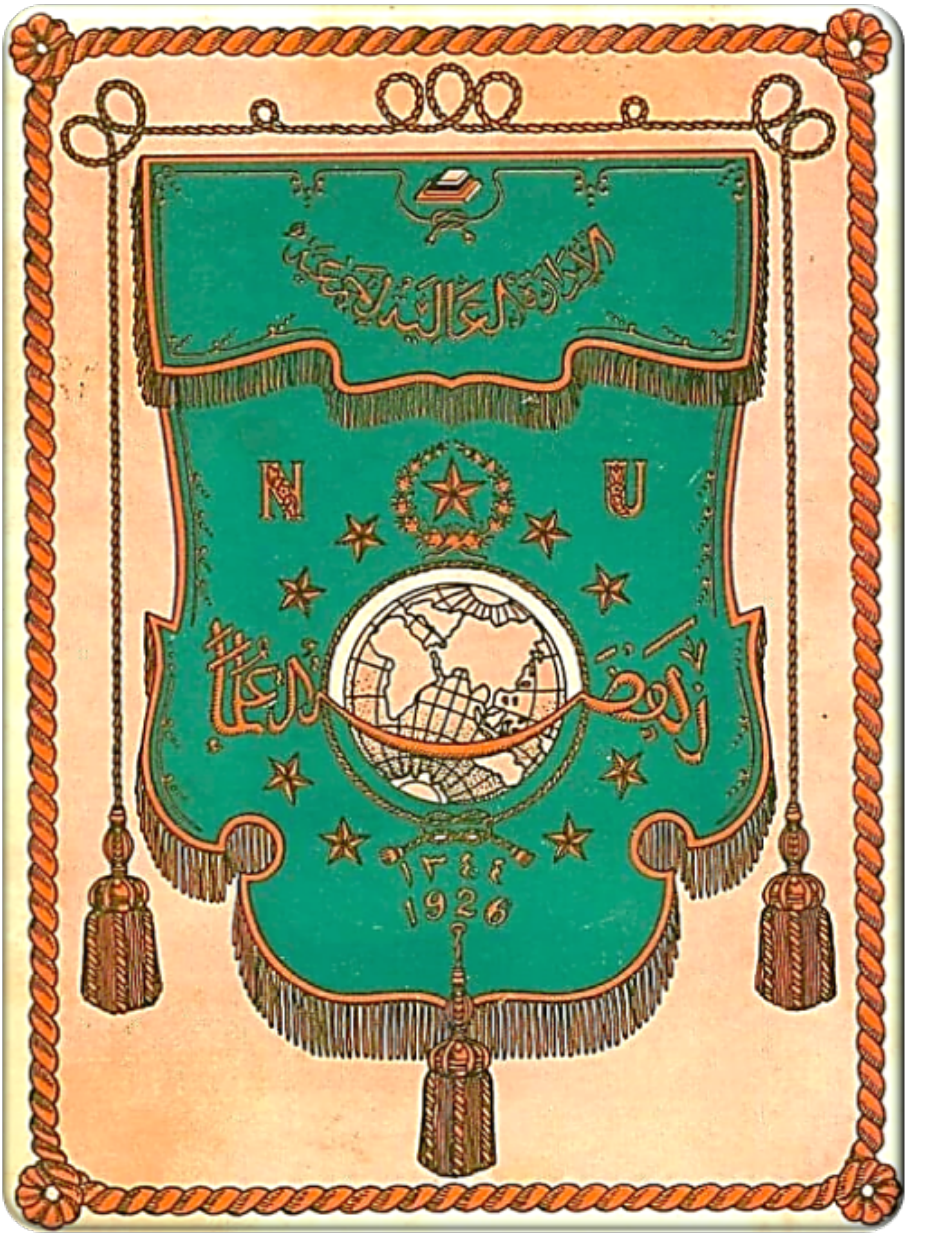
N
U
١٣٤٤
1926

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian terhadap pemberdayaan perempuan dalam pendidikan Islam yang merupakan sebuah studi kasus di Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan yang penulis teliti yaitu:

Pemahaman kalangan Pesantren Tremas mengenai persoalan pemberdayaan perempuan bisa dilihat dari bagaimana mereka memahami permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran perempuan serta bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan dalam mensosialisasikan pemahaman yang mereka miliki.

Secara umum, pemahaman mereka mengenai persoalan keagamaan yang menyangkut tentang perempuan masih bersifat tekstual, artinya hanya sebagian kecil dari mereka yang memahami persoalan keagamaan seputar perempuan secara kontekstual. Mereka sering kali tidak melihat dalam konteks apa dan dalam kondisi sosio-kultural seperti apa sebuah teks keagamaan diturunkan.

Namun demikian bukan berarti perempuan sama sekali tidak mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki menurut pemahaman kalangan pesantren, karena dalam beberapa hal gaya berpikir mereka sudah cukup kontekstual, meski masih terdapat nilai-nilar bias gender. Hal ini menjadi wajar karena memang wacana tentang kesetaraan ataupun keadilan gender belum masuk ke sana.

Ketika dalam pemahaman mereka masih terdapat pengakuan ataupun penghargaan terhadap hak-hak perempuan seperti hak reproduksi, waris, pendidikan, dan kesejahteraan yang merupakan hal mendasar yang harus diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan, berarti mereka juga ikut mendukung upaya pemberdayaan perempuan, karena pengabaian terhadap hak-hak tersebut berarti penindasan yang berkepanjangan terhadap kehidupan perempuan.

Pandangan mereka tersebut, baik yang sifatnya apreasiatif maupun yang tidak apresiatif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupinya, seperti latar belakang pendidikan,

aktifitas sosial keagamaan, buku-buku yang dipelajari, serta kedalaman dalam memahami ajaran agama.

Proses pemberdayaan perempuan yang berlangsung di Pesantren Tremas diprioritaskan pada aspek keagamaan, baik dalam bentuk pendidikan formal, non-formal maupun in-formal. Jika dikaitkan dengan kebutuhan praktis dan strategis gender perempuan, maka pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh Pesantren Tremas masih dalam taraf memenuhi kebutuhan praktis gender yang belum menyentuh wilayah struktur ketidakadilan gender dalam kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari muatan nilai-nilai pendidikan pesantren yang mensosialisasikan nilai-nilai bias gender yang masih mengedepankan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang baik.

Adapun mengenai beberapa faktor yang mendukung berlangsungnya proses pemberdayaan perempuan di Pondok Tremas adalah pendidikan keagamaan, keorganisasian, dan keterampilan yang merupakan perpaduan dari kegiatan pendidikan yang diberikan oleh pesantren dalam rangka mendidik santri menjadi perempuan shalihah. Melalui Pendidikan, perempuan bisa mengetahu hak dan kewajiban serta perannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesantren sebenarnya mempunyai potensi untuk memberdayakan perempuan, tetapi potensinya belum bisa diaktualisasikan dengan baik, karena meskipun tujuan pendidikan di pesantren tidak membedakan antara santri laki-laki dan perempuan, namun dari segi materi dan metode pembelajaran masih sarat dengan nilai-nilai yang bias gender.

Materi pendidikan yang disosialisasikan secara intensif masih mengacu pada karya-karya ulama terdahulu yang terkesan mengunggulkan laki-laki dan merendahkan perempuan, dengan tanpa disertai kontekstualisasi dengan kekinian. Metode pembelajaran yang diterapkan juga masih bersifat monologis sehingga pendidik dengan leluasa melakukan indoktrinasi terhadap peserta didik. Metode ini secara tidak sadar membunuh kreatifitas anak didik karena nilai-nilai yang disosialisasikan dianggap baku dan tidak membuka ruang dialog.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren cenderung mensosialisasikan

peran gender ketimbang menolaknya. Pendidikan semacam itu dianggap ikut melanggengkan ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun mengenai kendala implementasi pemberdayaan perempuan di pesantren secara garis besar, tidak terlepas dari hambatan budaya yang terkait dengan adanya pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang cenderung membatasi ruang gerak perempuan. Selain itu juga kondisi psikologis perempuan yang masih belum bisa menerima sepenuhnya gagasan kesetaraan gender. Hal ini disebabkan karena mereka belum menyadari bahwa posisinya dalam kedaan tertindas dan termarginalkan. Akibatnya mereka beranggapan bahwa wacana gender adalah pemikiran yang mengingkari budaya leluhur, budaya timur yang *adiluhung*.

Hambatan berikutnya adalah tafsir keagamaan yang masih bias gender. Selama ini penafsiran teks keagamaan yang menjadi sumber dasar ajaran Islam, al-Qur'an dan hadits, lebih didominasi oleh laki-laki sehingga sulit untuk menghindari adanya bias dalam menafsirkannya. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan, yang dikaji oleh para feminis muslim adalah bagaimana melakukan rekonstruksi terhadap penafsiran teks keagamaan yang membeda-bedakan laki-laki dan perempuan agar menjadi sebuah teks yang lebih manusiawi dan mengangkat derajat serta peran serta perempuan dalam setiap perubahan sosial.

Untuk lebih meningkatkan efektifitas pemberdayaan perempuan dalam pendidikan sehingga bisa mewujudkan nilai-nilai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khususnya bagi pondok Tremas, hendaknya mengembangkan terus upaya pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan. Materi pelajaran yang kebanyakan diambil dan kitab kuning, yang merupakan hasil penafsiran yang dilakukan oleh para ulama abad pertengahan, hendaknya dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini agar Islam benar-benar menjadi *rahmatan li al-'alamin*. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap para ulama yang telah banyak melahirkan karya-karya tersebut, kita harus berani mengkritisinya dalam rangka

menemukan formulasi keagamaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Oleh karena itu, inovasi dan pembaharuan dalam penataan kurikulum perlu direalisasikan, yaitu dengan merancang kurikulum yang mengacu pada tuntutan masyarakat sekarang, dengan tidak meninggalkan karakteristik pesantren yang ada. Adapun mengenai metode pembelajaran *bandongan* dan *sorogan* yang merupakan tradisi akademik di pesantren masih tetap relevan, namun perlu dikembangkan menjadi model *bandongan* dan *sorogan* yang dialogis. Disamping itu juga perlu pengembangan bahan pelajaran tertentu, terutama yang menonjolkan penalaran dan pemikiran filosofis. Bagaimanapun juga keberhasilan upaya pengembangan pesantren, sangat tergantung kepada pesantren yang bersangkutan, para pengasuh, dan ustadz pesantren memiliki posisi sentral untuk menggerakkan roda dinamika pesantren.

2. Bagi pemerintah yang sedang mencanangkan program pemberdayaan perempuan kiranya dapat memanfaatkan keberadaan pesantren dan menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang memberdayakan perempuan secara nasional. Upaya sosialisasi kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan pesantren merupakan langkah awal dalam proses menuju terciptanya keadilan gender dalam pendidikan pesantren. Hendaknya ada upaya dari pemerintah untuk merekomendasikan konsep kurikulum yang mencerminkan nila-nilai adil gender menjadi kurikulum pesantren di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

al-Abrasyi, M 'Athiyyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

----------, *Makanat al-Mar'ah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Mesir, tt

al-Attas, M Naquib, *Konsep Pendidikan dalam Islam,* terj Haidar Bagir, Bandung: Mizan, 1994.

al-Bukhari Muhammad Isma'il, *Shahih al-Bukhari,* t.tp.: Dar wa Mathabi' al-Sya'b, t.t.

al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1988.

al-Hakim, Luqman dan al-Ghozi, Jamaludin, *Selayang Pandang Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan*, Tremas: Majlis Ma'arif Press, 2002.

al-Jamall, Muhammad Fadhil, *Nahwa al-Tarbiyah al-Mukminah,* al-Syirkah al-Tunisiah li al-Tauzi', 1977.

al-Nahlawi, 'Abdurrahman, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, terj: Hery Nur Ali, Bandung: Diponegoro, 1989.

al-Qardlawi, Yusuf, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islimiyyah*, Kairo: Wahbah, 1996.

Arifin, H. M. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum),* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Arkoun, Muhammad, *Berbagai Pembacaan al-Qur'an*, terj: Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

Asad, Muhammad, *Massage of the Qur'an*, Gibraltar: t.p., 1980.

Azra, Azyumardi, "Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*; *Religiusitas Iptek*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, dan Pustaka Pelajar, 1998.

Baidhawy, Zakiyudin, *Wacana Teologi Feminis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Baried, S. Baroroh, "Konsep Wanita dalam Islam" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Konteksneal*, Jakarta: INIS, 1993.

Bashin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996.

Batliwala, Srilatha, "The Meaning of Women's Empowerment New Concept from Action" dalam Gita Sen et.al. *Population Policies Reconsidered Health, Empowerment and Rights*, New York: International Women's Health Coalition, (IWHC), 1994

Boserup, Ester, *Women's Role in Economic Development*, London: Allen and Unwin, 1970.

Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradist Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999.

----------"Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Depag RI. *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta:1986.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Diktat tentang Struktur, Peraturan dan Program Kerja Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur, Tahun Pelajaran 2002-2003.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

----------"Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

----------, "Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender, Sebuah Pengantar" dalam *Merekonstruks Realitas dengan Perspektif Gender*, Yogyakarta: SBPY dan OXFAM, 1997

----------, "Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan Gender" dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 5, 1999.

Hamzah, Amir, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, Jakarta: Mulia Offset, 1989.

Hidajadi. Miranti, "Perempuan dan Pembangunan" dalam *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No 17, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.

Hook, Sidney, "Filsafat Pendidikan John Dewey" dalam *Sidney Hook: Sosok Filsuf Humanis Demokrat dalam Tradisi Pragmatisme*, Jakarta: YOI, 1994.

Hubbies, Aida Fitalaya S., "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan" dalam *Membincangkan Feminisme*, ed: Dadang Anshori, dkk, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Husain, Syed Sajjad dan Ashraf, Syed Ali, *Krisis dalam Pendidikan Islam*, terj: Fadhlan Mudhofir, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2000.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, t.t.

Ilyas, Yunahar, *Perspektif Gender dalam Islam*, Makalah Seminar Nasional Bias Gender dalam dakwah, PSW UII dan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

----------, *Feminisme dalam Kajaan Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ja'far, Muhammad Anas Qasim, *al-Huquq al-Siyasah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri'*, Kairo: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah, t.t.

Jalaludin dan Said, Usman, *Filsafat Pendidikan Islam; Konsep dan Perkembangan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kahirat, Ahmad, *Markaz al-Mar'ah fi al-Islam*, Kairo: Dar-al-Ma'arif, 1983.

Kardinah, Suparjo Rustam, *Wanita, Maratabat dan Pembangunan*, Jakarta: Forum Pengembangan Keswadayaan, 1993.

Kartini, *Surat-surat kepada Ny.R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, Jakarta Djambatan, 1987.

Krisnawaty, Taty, "Gerakan Perempuan dan Demokrasi" dalam *Membincangkan Feminisme,* ed: Dadang Anshori dkk, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1989.

Mas'ud. Abdurrahman, "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, ed: Ismail SM dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002.

Mas'udi, Masdar F., "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya Risalah Gusti, 1996.

----------, "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning" dalam *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*, ed: Dawam Rahardjo. Jakarta: P3M, 1985.

----------, "Perempuan di Antara lembaran Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.

Miles, Matthew B dan Huberman, Michael, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Ul Press, 1992.

Moloeng, Lexy J, *Metodogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, terj: Hartian Silawati, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC dan Pustaka Pelajar, 1996.

Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987.

----------, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Muhammad, *Sejarah Pondok Tremas dan Perkembangannya*, Tremas: Majlis Ma'arif Press, 2001.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj: Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

Muhtarom H. M., "Urgensi Pesantren dalam Pembentukan Pribadi Muslim" dalam *Dinamika Pesantren dan*

Madrasah, ed: Ismail SM dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002.

Mukhtar, Naqiyah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning; Studi terhadap *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain* karya Muhammad Umar Nawawi al-Bantani, dalam *Majalah Ulumul Qur'an*, No 4 VII/1997.

Malkhan, Abdul Munir, *Paradigma intelektual Muslim*, Yogyakarta: SIPRESS. 1993.

Murpratomo, A. Sulasikin, "Pengaruh Kekuasan dalam Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Perempuan" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed: Mursyidah Tahir, Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000.

Muslim, *ash-Shahih*, juz III, hadits no 1829.

Muslim, Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, dalam *Kitab al-Imán*, hadits no 114 Kairo: al-Halaby wa Auwladuh, t.t.

Nasution, S., *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Poewadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Purbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Raharjo, M. Dawam, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Rahman, Budhy Munawar, "Islam dan Feminisme; dari Sentralisme kepada Kesetaraan" dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Tafsir al-Manár*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Roded, Ruth, *Kembang Peradaban; Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim,* terj: Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.

Rofangi, M. "Posisi Kiai dalam Pengembangan Tradisi Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religusitas Iptek,* Yogyakarta:

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, dan Pustaka Pelajar, 1998.

Rostiawati, Yustina, "Memutus Sosialisasi Ketimpangan Peran Gender" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Sadli, Saparinah, "Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif HAM" dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Saptandari, Pinky, Tantangan dan Peluang Gerakan Perempuan dalam menyongsong Otonomi Daerah" dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan dalam Transit Demokrasi dan Globalisasi,* Vol 6 No 1, Februari, 2001.

Saptari, Ratna, dan Holzner, Brigitte, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Saridjo, Marwan, dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1982.

Sarwar, Hafizh Ghulam, *Origin and Development of Islam*, *Life of Muhammad*, India: Adam Publishers and Distributors, 1996.

Schimmel, Annemarie, dalam Kata Pengantar Karya Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought,* Albany: State of University of New York Press, 1992.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Sugiyono, Sugeng, *Konsepsi Gender dalam Perspektif Islam*, (makalah Seminar Sehari Re-interpretasi Peran Gender dalam Perspektif Islam, KPSW BPP3M, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

Sukidi, "Pesantren Sebagai Pusat Krisis Perempuan", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 27 Oktober, 2000.

---------, *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren*,..

Sumaryono, E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Suryadi, Ace, "Perempuan Indonesia dalam Peta Pendidikan" dalam *Agama dan Gender News*, Edisi 12, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2002.

Sutrisno, Leo, "Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme" dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 2001.

Suyoto, "Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional" dalam *Pesantren dan Pembaharuan*, ed: Dawam Rahardjo, Jakarta: LP3ES, 1988.

Sya labi, Ahmad, *Tarih al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, Kairo: al-Kasysyaf, 1954.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.

Tan, Melly G." Perempuan dan Pemberdayaan" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Tilaar, HAR, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad XXI,* Magelang: Tera Indonesia, 1998.

Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam),* Jakarta: Tim PPBA Departemen Agama R1, 2001.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Wafi, 'Ali Abdul Wahid, *al-Musawah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Wahidah, Ariyana Fuad, "Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan*, ed: Mursyidah Thahir, Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000.

Wijaya, YB Mangun, "Mencari Visi Dasar Pendidikan" dalam *Basis* edisi khusus *Menggugat Dunia Pendidikan Kita*, No 01-02 tahun ke 47.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Yuarsi, Susi Eja. "Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender" dalam *Sangkan Paran Gender*, ed: Irwan Abdullah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Zais, Robert S Zais, *Curriculum Principles and Foundations*, New York: Harper & Row Publisher, 1976.

Zarkasyi, Abdullah Syukri, "Langkah Pengembangan Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek,* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, dan Pustaka Pelajar, 1998.

Zarkasyi, Amal Fathullah, "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah" dalam *Solusi Islam atax Problematika Umat, Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj: Butje B. Soenjoyo, Jakarta: P3M, 1986.

Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1991.

Zuhri, Saifudin, "Reformulasi Kurikulum Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, ed: Ismail SM dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002.

MUSLIMAT

N U

PIMPINAN WILAYAH

MUSLIMAT

Nahdlatul Ulama

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

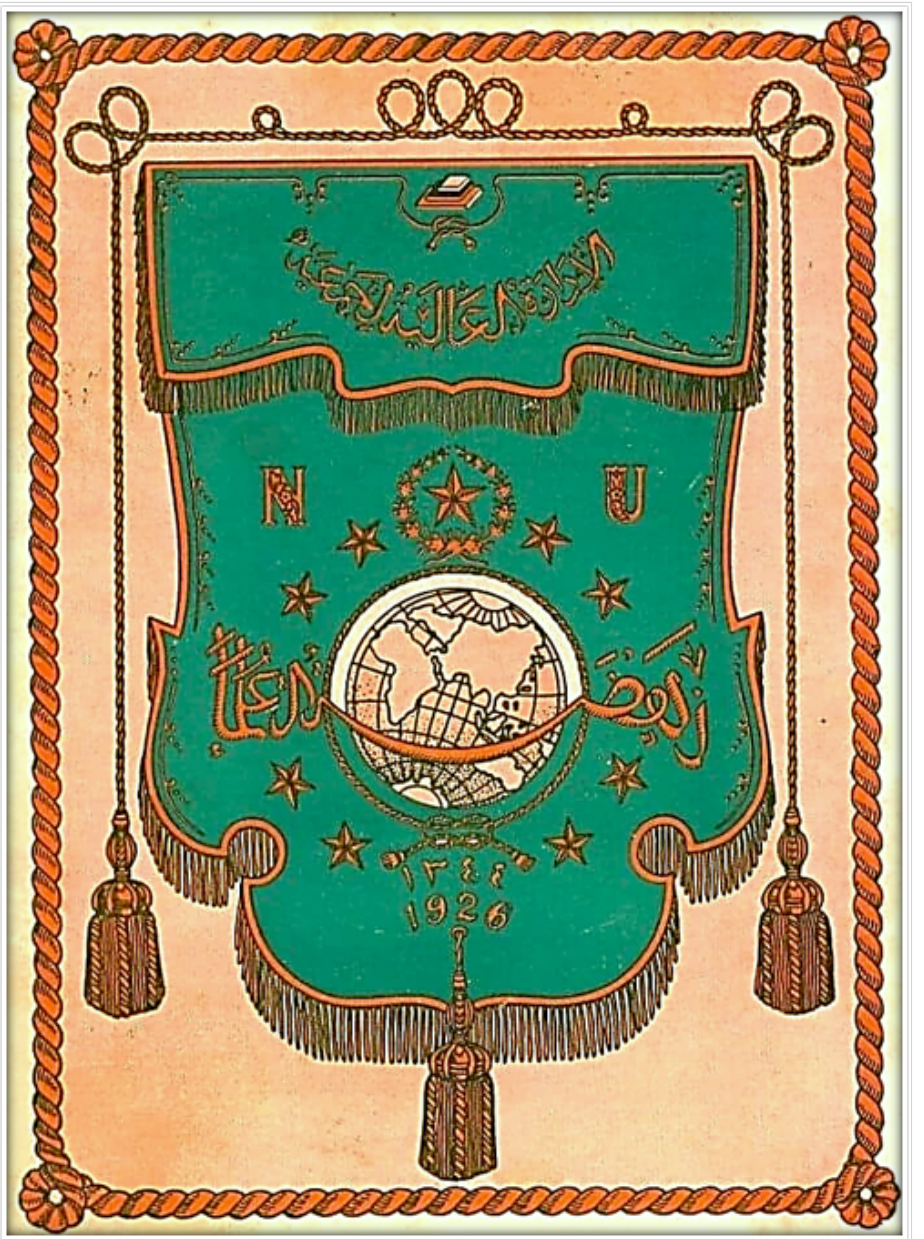
الإدارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

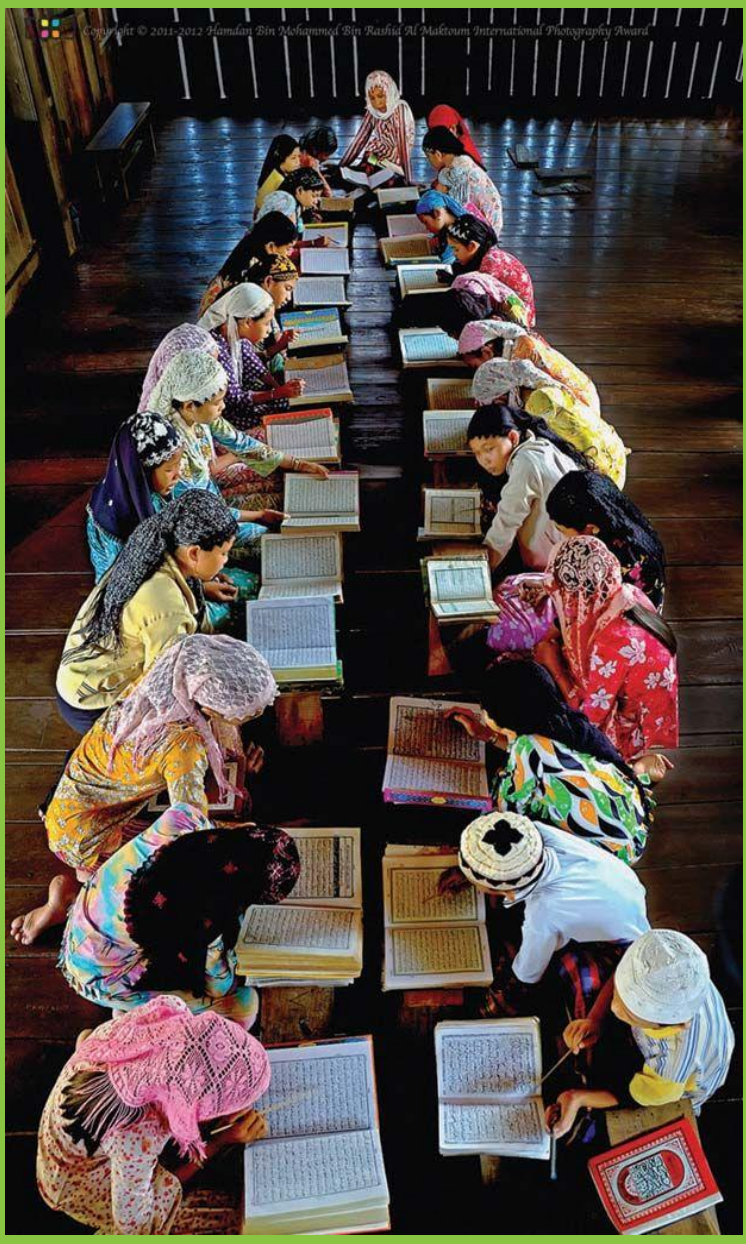

PASCASARJANA
FITK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ISBN 978-623-6095-28-7